

EDISI KHUSUS

# TEMPO

EDISI 30 SEPTEMBER-6 OKTOBER 2013

LEKRA

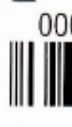


RP 33.000

WWW.TEMPO.CO

MAJALAH BERITA MINGGUAN

ISSN: 0126 - 4273



9 770126 427302

DAN GEGER 1965



## LEKRA DAN GEGER 1965

**T**IAP kali kita mengenang pembantaian massal 1965, tiap kali pula kita mesti mengutuk aksi tumpas kelor yang diterapkan tentara pendukungnya terhadap mereka yang dituding terlibat Partai Komunis Indonesia. Sedikitnya 200 ribu orang mati terbunuh—untuk menyebut angka yang paling moderat—dalam peristiwa itu. Ribuan lainnya menghuni kamp pembuangan di Pulau Buru. Ada juga yang mati kesepian sebagai eksil di luar negeri.

Aksi tumpas kelor—menghabisi musuh sampai ke akar-akarnya—memang menempatkan lawan hanya dalam dua kotak kategori: yang terlibat dan yang tak terlibat. Yang abu-abu dan yang ikut-ikutan juga dihabisi. Termasuk mereka yang ditumpas ini adalah seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—organisasi yang dituduh berafiliasi pada PKI.

Didirikan pada 17 Agustus 1950, Lekra pada awalnya merupakan reaksi atas kecemasan terhadap tumbuhnya feodalisme dan kolonialisme pasca-kemerdekaan, terutama di bidang kesenian. PKI belum digdaya ketika itu. Gagal dalam pemberontakan Madiun 1948, pemimpinnya masih kocar-kacir.

Dalam perjalanannya, terutama di daerah, Lekra menjadi organ PKI. Di pusat, tak semua anggota Lekra anggota partai komunis. M.S. Ashar, salah seorang pendiri Lekra, misalnya, anggota Murba—partai yang salah satu penyokongnya adalah bekas wakil presiden Adam Malik.

Prinsip realisme sosialis yang diusung Lekra layak diperdebatkan, tapi tak boleh dijadikan alasan untuk melibas. Gagasan itu mengidealkan seni sebagai alat perjuangan rakyat. Realisme sosialis menolak "seni untuk seni"—puisi tentang anggur dan rembulan atau seni rupa abstrak yang tak melukiskan perjuangan buruh dan kaum tani. Meski sebagian aktivis Lekra dan PKI ikut mengganggung mereka yang berbeda—misalnya dalam polemik mereka dengan pendukung Manifest Kebudayaan—aksi tumpas kelor tetap harus disesalkan.

Patut disesali juga hilangnya sejumlah seniman besar setelah geger itu. Pelukis Trubus Sudarsono—terkenal karena lukisan dan patung realis yang kini tersimpan di Istana Bogor—hilang dan diperkirakan tewas dibunuh. Penulis naskah drama Utuy Tatang Sontani mati dalam pengasingan di Moskow, Rusia. Nasib yang sedikit lebih baik dimiliki Sudharnoto, penyiar *Radio Republik Indonesia* dan pencipta lagu *Garuda Pancasila*. Ditahan di penjara Salemba, Jakarta, ia kemudian menjadi sopir taksi hingga akhir hayatnya.



Aksi pengganggungan "sisa-sisa PKI" mengabaikan kompleksitas dalam geger. Banyak studi menyebutkan prahara itu semata karena sikap *keblinger* Ketua PKI Dwikorita Gusti Adiningsih. Diteliti John Roosa, sejarawan dari Universitas British Columbia, Kanada, menyimpulkan Gerakan 30 September dilakukan sekelompok kecil elite Biro Khusus PKI. Dengan demikian, terjadi generalisasi. Roosa menyimpulkan Gerakan 30-S sebagai dalih dilakukannya pembantaian massal oleh tentara.

Menimbang dosa sejarah ini, pemerintah tak perlu ragu mengambil inisiatif meminta maaf kepada korban. Sikap ini merupakan langkah keluar paling realistis untuk menyembuhkan luka 1965. Permintaan maaf ini harus disertai pemberian kompensasi yang layak—kompensasi bisa menjalar ke masyarakat luas, bukan hanya para pelaku sejauh ini.

Memang, melakukan, meski bukan tak mungkin. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah merampungkan pemetaan pelaku pembantaian 1965. Dosa-dosa mereka—sesuatu yang bisa dipakai sebagai landasan tuntutan. Tapi, dengan usia pelaku yang lanjut—sebagian sudah almarhum—pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Trauma 1965 hanya bisa dihapus dengan bersikap wajar dan adil. Tak perlu membesar-besarkan komunisme. Tak perlu menempelkan frasa "bahaya laten" di depan kata itu. Ologi itu sudah lama bangkrut dan masuk kardus. Rusia dan Cina kini sama kapitalisnya dengan Amerika Serikat. Di era Orde Baru, stempel komunis kerap dipakai untuk menggebu-gebu musuh. Mengulang kesalahan Orde Baru di zaman keterbukaan sepertinya kurang bijak. Karang sama artinya dengan mengembalikan Indonesia ke masa yang gelap itu.

Tak perlu pula mempertahankan Ketetapan MPRS yang melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sebagai obyek studi, mempelajari ketiganya justru bagus untuk mengukur kekuatan dan kelemahan ideologi itu. Buku-buku yang memuat ajaran itu tak perlu dilarang atau dibakar. Diskusi tentang Marxisme justru bermanfaat untuk mereduksi salah kaprah yang selama ini lanjur dipercaya: seorang komunis pasti ateis.

Tak ada gunanya pula membanding-bandingkan penderitaan korban pengganggungan PKI dan korban tumpas kelor. Tak ada ukuran yang akurat terhadap rasa sakit. Memmaafkan adalah sikap paling arif untuk menghapus kenangan pahit masa lalu. Dengan geger 1965, setiap orang boleh jadi merupakan korban sekaligus pelaku. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 52



LIPUTAN KHUSUS

# LEKRA

LIMA TAHUN SETELAH REVOLUSI AGUSTUS, SEJUMLAH SENIMAN DAN POLITIKUS MEMBENTUK LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT. IA LAHIR DARI KEPRIHATINAN TERHADAP INDONESIA YANG BELUM LEPAS DARI PENJAJAH. MELALUI KONSEP SENI UNTUK RAKYAT, LEKRA MENGAJAK PARA PEKERJA KEBUDAYAAN MENGABDIKAN DIRI UNTUK REVOLUSI INDONESIA. MENARIK GARIS ANTARA "KAMI DAN MEREKA", IDE SENI UNTUK RAKYAT BERUBAH MENJADI KONFLIK TERBUKA. YANG BUKAN LEKRA DIGANYANG. SEBALIKNYA, KETIKA ZAMAN BERUBAH, YANG LEKRA DIHABISI. INILAH CERITA TENTANG CITA-CITA, POLEMIK, PENGKHIANATAN, DARAH, DAN KEMATIAN.

# ANATOMI SEBUAH GAGASAN





ILUSTRASI: KENDRA H. PARAMITA



**S**ETAHUN setelah Soeharto jatuh, Agam Wispi muncul di Jakarta. Usianya 76 tahun. Penyair tersohor Lembaga Kebudayaan Rakyat itu terlihat renta. Puluhan tahun ia mengembara sebagai pelarian politik. Agam satu-satunya eksil yang pernah hidup di tiga rezim komunis: Cina, Rusia, dan Jerman Timur. Pada 1988, ia menjadi warga negara Belanda.

Agam komunis sejak dalam kandungan. Ia putra Agam Putih, pendiri partai komunis di Aceh pada 1920-an. Sang ayah dekat dengan Tan Malaka. Putih melindungi Tan Malaka saat penganut Trotsky ini berada dalam pelarian di Singapura. Agam Wispi pada 1950-an terkenal dengan sajak "Matinya Seorang Petani". Puisi itu diciptakan setelah ia melihat aksi telanjang bulat ibu-ibu anggota Barisan Tani Indonesia di Medan melawan traktor pemilik perkebunan.

Saat tragedi 30 September 1965 meletus, Agam Wispi berada di Beijing, menghadiri perayaan ulang tahun Republik Tiongkok. Ia sadar tak bisa kembali. Ketika itu, ia baru menjejak beberapa hari di Beijing setelah selama tiga bulan menyusuri Vietnam Utara.

Di Vietnam, ia menyaksikan sendiri bom-bom Amerika Serikat berjatuh atas perintah Presiden Lyndon Johnson. Ia bertemu dengan Ho Chi Minh dan bertanya bagaimana pemimpin revolusi mendirikan basis pertahanan di gua-gua. Melalui Agam, Ho Chi Minh mengkritik pesta ulang tahun ke-40 Partai Komunis Indonesia di Senayan pada 1965 yang megah meriah. "Pesta itu akan membangkitkan harimau tidur," kata Paman Ho.

"Saya saksi hidup revolusi kebudayaan di Cina," ujar Agam suatu sore itu di Perpustakaan H.B. Jassin, Jakarta. "Saya terkejut. Revolusi ini biadab. Patung-patung candi dikapak. Apa Bung bisa terima kalau stupa-stupa di Borobudur dikapak karena mencerminkan nilai-nilai lama yang dianggap feodal?"

Agam bercerita bagaimana pada 1966-1970 ia dengan ribuan orang lain tinggal di kamp-kamp konsentrasi di Cina menjalani program turun ke bawah (turba) yang di Cina disebut re-edukasi. "Kami pergi ke desa-desa menjalani re-edukasi," kata Agam. "Kami disuruh mengangkat tahi dengan tangan. Banyak yang diserang disentri dan lever. Bersama beberapa kelompok, saya berontak."

Menjual cincin, arloji, dan kamera, Agam hengkang ke Moskow menumpang kereta Trans-Siberia. Di Soviet, indoktrinasi ternyata berlangsung lebih parah. Agam sempat ditawarkan menjadi dosen sastra, tapi menolak. Pindah dari Cina ke Soviet, Agam merasa keluar dari mulut harimau lalu masuk ke mulut buaya. Dari Moskow, ia menuju Berlin Timur.

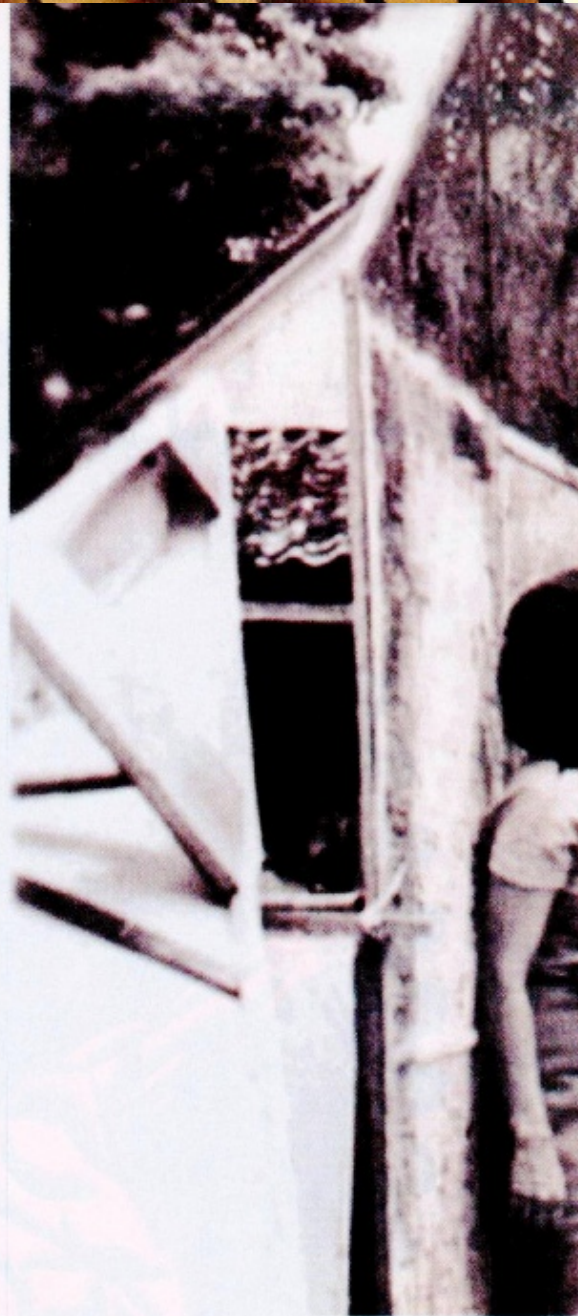
Di situ pun ia tak menetap lama. Ia gerah tat kala bi-



## AGAM WISPI

**Penyair tersohor Lembaga Kebudayaan Rakyat.** Komunis

sejak dalam kandungan. Ia putra Agam Putih, pendiri partai komunis di Aceh pada 1920 yang dekat dengan Tan Malaka.



rokrasi negara sangat menindas pemikiran. "Di Berlin Timur, hidup begitu dikontrol. Intel banyak. Ada gejala anti-orang asing." Dari Berlin Timur, Agam berangkat ke Berlin Barat—tempat yang ia gambarkan sebagai lampu yang terang-benderang. "Berlin Timur begitu suram, seperti kuburan."

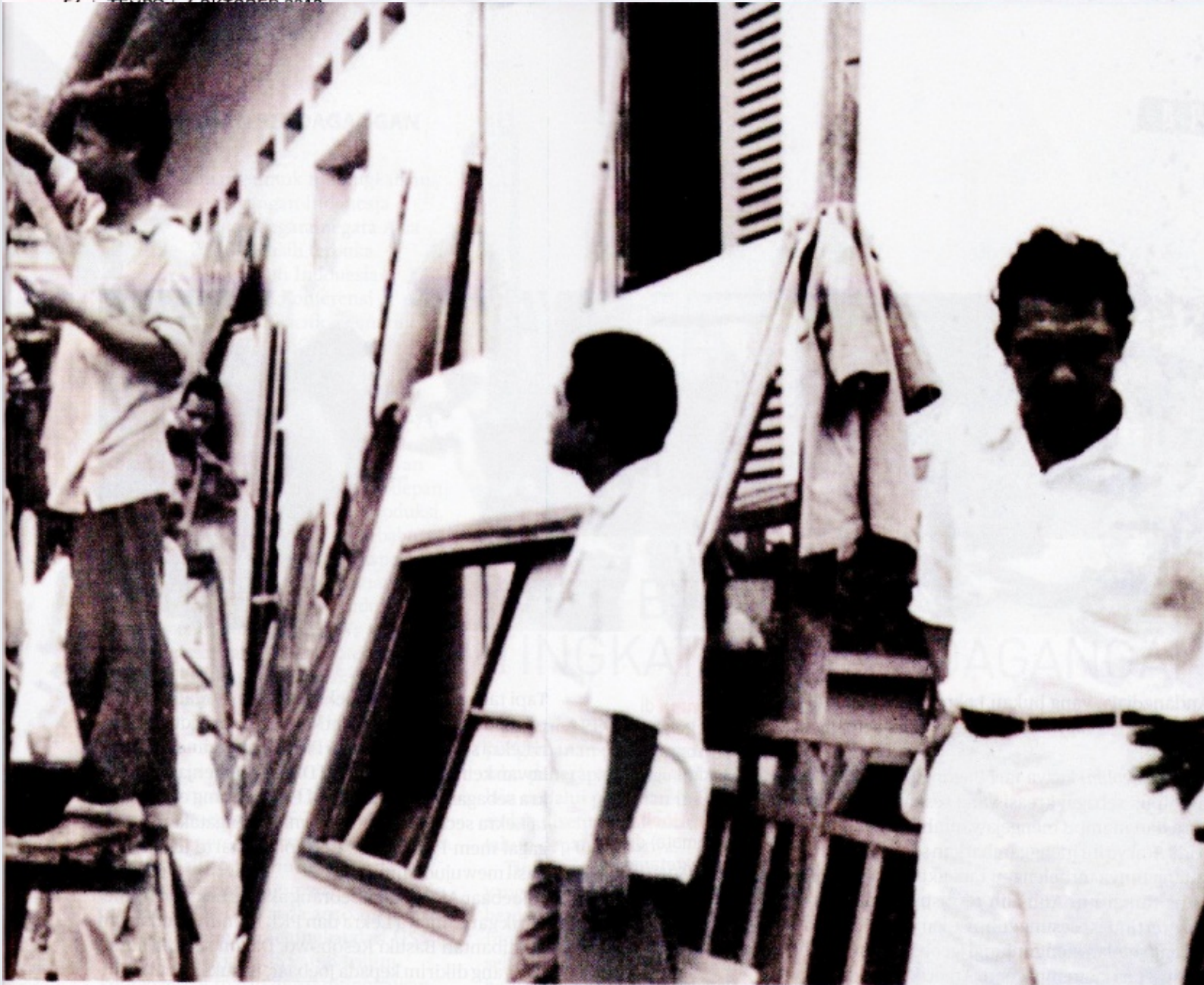
Di Perpustakaan H.B. Jassin, suatu sore pada 1990, Agam Wispi bukanlah komunis senior yang kukuh membela revolusi. Hari itu, ia adalah orang yang terbuka terhadap komunisme.

\*\*\*

INDONESIA 1960-an. Sebuah dekade ketika seisi negeri terasa begitu bergelora. Lekra sedang bugar-bugarnya. Di desa-desa, para aktivis wayang wong, ketoprak, ludruk, dan sandur bergairah mementaskan serbuan pertunjukan rakyat dengan tema antifeodalisme. Di pelosok-pelosok, para musikus bersemangat menyalakan hidupkan musik lokal. Para sastrawan malang-melang mengikuti kegiatan internasional: dari Sri Lanka sampai Tashkent. Pendidikan dan kursus budaya diadakan di mana-mana.

Tapi di zaman itu juga sebuah problem serius terjadi. Kebebasan mencipta, dalam pandangan Lekra, sel-





harus diikuti dengan tanggung jawab dan kesadaran politik. Sukarno menganggap Indonesia masih berada dalam periode *vivere pericoloso*—masa-masa genting. Kesenian yang bertanggung jawab adalah kesenian yang mendukung revolusi yang dipancarkan Sukarno.

Para seniman penyendiri—mereka yang sibuk memikirkan imajinasi personal dan tak peduli pada politik—adalah musuh revolusi. Abai pada politik adalah sikap yang dekaden. Seorang seniman yang menciptakan karya-karyanya dengan fantasi liar, bebas, tak terkekang, suka kepada eksperimen pribadi, tak ikut organisasi, dan hanya bertumpu pada humanisme merupakan gelandangan tanpa arah.

Pada masa kejayaan Lekra, mempersoalkan dominasi politik dalam seni adalah perbuatan durhaka—sesuatu yang mudah mendatangkan intimidasi. Lawan politik diganyang, termasuk dengan memberi cap kontrarevolusi.

Lalu Sukarno jatuh, zaman berbalik. Para aktivis Lekra dihabisi: ditangkap, dibunuh, dipenjara. Mereka yang menjadi eksil di negeri-negeri dingin mati kesepian. Di Eropa, selain Agam, ada Basuki Resobowo, Sobron Aidit, dan sejumlah aktivis lain. Utuy Tatang Sontani, sastrawan senior Lekra, mati

**Pembuatan dekorasi** untuk pertunjukan teater *Buih dan Kasih* di kantor Lekra, Cidurian 19.

di Moskow. Meninggal pada 1979, ia dimakamkan di Pekuburan Umum Moskow. Dalam sebuah liputan pada 2007, *Tempo* pernah mencari makam Utuy, tak ada lagi. Lama tak diziarahi, makam itu lenyap, mungkin ditindas kubur lain.

\*\*\*

INDONESIA hari ini: 48 tahun setelah prahara 30-S terlewati. Di antara riuh kemacetan dan marabahaya, kelangkaan kedelai, konvensi, dan korupsi, *Tempo* mengangkat laporan tentang Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini bukan laporan khusus tentang tokoh sejarah—sesuatu yang selama ini kerap jadi lihan kami. Lekra adalah gagasan dan orang-orang di belakang ide itu.

Dalam liputan ini, kami mempertanyakan kembali hubungan seni dan revolusi. Tentang mengapa seni "tak rakyat" ketika itu dimusuhi. Sastra yang progresif sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah dihami—untuk tak menyebutnya sebagai konsep arbitrer. Adalah Pablo Picasso, anggota Partai Komunis Spanyol, yang justru melukis kubisme—imajinasi yang tak menggambarkan peluh pekerja, otot buruh, dan lumpur di kaki petani. Sebaliknya, penyair





tojo Andangdjaja, yang bukan Lekra, justru menulis puisi "Rakyat", sajak yang menggelorakan semangat orang ramai.

*Ganjang Nekolim*, karya tari Bagong Kussudiardja, pernah dipuji sebagai kreasi yang sesuai dengan garis Lekra dan mampu mengejawantahkan keinginan D.N. Aidit. Karya itu menggambarkan seseorang yang kedua tangannya terbelenggu tapi akhirnya mampu memutus rantai itu. Alih-alih terinspirasi oleh rakyat yang tertindas, sesungguhnya karya itu diciptakan Bagong setelah mengunjungi Jacob's Pillow, salah satu festival tari kontemporer di Amerika Serikat.

Liputan ini juga menggali dinamika dalam tubuh organisasi itu. Para aktivis Lekra pada akhirnya terce-rai dan berkonflik—sebagian karena perbedaan pandangan, menyusul perbedaan pandangan Uni Soviet dan Cina perihal revolusi. Menurut Agam Wispi, konflik dalam tubuh Lekra lebih menyakitkan daripada konflik antara Lekra dan kelompok lain. "Kami korban konflik perang dingin antara Moskow dan Beijing." Agam justru menyayangkan sajak-sajak aktivis Lekra yang penuh semboyan. "Menurut saya, bagaimanapun, puisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara puitik, bukan secara politik."

Yang juga ditulis adalah hubungan Lekra dan PKI. Selama ini dipercaya Lekra adalah *onderbouw* PKI.

**Para perupa** di Sanggar Pelukis Rakjat, Yogyakarta, 1953 (kiri).

**Joebaar Ajoeb** (berkacamata) di kantor sekretariat Lekra, Cidurian 19, Jakarta, akhir 1950-an.

Tapi tak sedikit tokoh Lekra menolak organisasi nreka menginduk ke partai komunis itu. Njoto, penri Lekra sekaligus petinggi PKI, dikabarkan selalu nlawan keinginan Ketua PKI D.N. Aidit menjadikan Lekra sebagai organisasi resmi PKI. Seorang eks anggta Lekra secara bergurau pernah mengatakan, "Ai gagal mem-PKI-kan Lekra, tapi Soeharto justru bhasil mewujudkannya."

Joebaar Ajoeb salah seorang aktivis Lekra yang narik garis antara Lekra dan PKI. Namun pandang ini dibantah Basuki Resobowo. Dalam sebuah surnya yang dikirim kepada Joebaar, Basuki justru mepercayai bahwa PKI dan Lekra adalah badan gerak aksi yang sama. Menurut Basuki, pendapat yang nmisahkan Lekra dan PKI itu hanya beredar di kalarn elite Lekra. Di kalangan bawah, semua mengangap Lekra sebagai PKI. Basuki menuduh Joebaar bkompromi dengan Soeharto. Kepada Joebaar, ia nulis: "Yang lebih menyedihkanku adalah usaha kmembuktikan dengan segala alasan bahwa Lekra bstatus di luar PKI...."

Pembaca, bukan maksud kami mengorek luka lan Tak juga mendiskreditkan Lekra atau menyanyunyanjungnya. Lekra kami tulis sebagai bagian lain dsejarah kelam 1965. Perihal polemik seni-politik d mereka yang terusir dan terbunuh karenanya. ■

## TIM EDISI KHUSUS LEKRA

**Penanggung Jawab:** Purwanto Setiadi, Seno Joko Suyono **Kepala Proyek:** Sapto Yunus, Bagja Hidayat, Dody Hidayat, Philipus Parera

**Penulis:** Seno Joko Suyono, Sapto Yunus, Bagja Hidayat, Dody Hidayat, Philipus Parera, Sunudyantoro, Sandy Indra Pratama, Agus Supriyanto, Harun Mahbub, Yuliaw M. Reza Maulana, Dwi Riyanto Agustiar, Eko Ari Wibowo, Agung Sedayu, Dian Yuliasuti, Heru Triyono, Ahmad Nurhasim, Muhammad Iqbal Muhtarom, Ratnaning Asih

Mahardika Satria Hadi **Penyumbang bahan:** Nurdin Kalim, Yuliawati, Dian Yuliasuti, Agung Sedayu, Khairul Anam, Singgih Soares (Jakarta),

Arief Rizqi Hidayat (Surabaya), Ishomuddin (Jombang), Eko Widiyanto (Malang), Agus Supriyanto, David Priyasidharta (Sidoarjo), Sujatmiko (Bojonegoro, Tuban, Blora)

Ika Ningtyas (Banyuwangi), Sunudyantoro, Anang Zakaria, Pito Agustin, Shinta Maharani (Yogyakarta), Sohirin (Salatiga), Ahmad Rafiq (Solo), Hari Tri Wasono

(Tulungagung), Nofika Dian Nugroho (Ponorogo) **Penyunting:** Arif Zulkifli, Purwanto Setiadi, Leila S. Chudori, Seno Joko Suyono, L.R. Baskoro, Bina Bektati,

Tulus Wijanarko, Qaris Tajudin, Nugroho Dewanto, Budi Setyarso, Yosrizal Suriaji, Idrus F. Shahab, Yosep Suprayogi, Sapto Yunus, Dody Hidayat, Philipus Parera

**Periset Foto:** Jati Mahatmaji, Ijar Karim **Bahasa:** Uu Suhardi, Iyan Bastian, Sapto Nugroho **Digital Imaging:** Agustyawan Pradito

**Desain:** Djunaedi (koordinator), Agus Darmawan Setiadi, Aji Yulianto, Eko Punto Pambudi, Imam Yunni, Kendra Paramita, Rizal Zulfadli, Tri W. Widodo



LIPUTAN KHUSUS

# MEDAN PARA SENIMAN

LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT DIBENTUK UNTUK Mendukung REVOLUSI dan Menyokong USAHA MEMBANGUN KEBUDAYAANNYA SERTA MENCEGAH KEMEROSOTAN REVOLUSI. PARA PENDIRINYA MENGANGGAP PEKERJA KEBUDAYAAN HARUS IKUT MENGEMBAN TUGAS PENTING INI. LEKRA SEGERA MENJADI MAGNET BAGI PARA SENIMAN.

ARLEVIN/IST. HALL/2010/INSTITUT SENI RAKYAT, INDONESIA, JAKARTA



**Berdiri:** Jane (kedua dari kiri), Oey Hay Djoen (tengah), Sobri (di depan). **Jongkok:** Profesor Boejoeng Saleh Poeradisast (tengah) dan S. Anantaguna (kanan) di kantor Lekra.







# KARENA REVOLUSI BELUM SELESAI

[ LEKRA DIBENTUK DENGAN TUJUAN  
MENDUKUNG REVOLUSI DAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL. SIKAP KEBUDAYAANNYA SENI  
UNTUK RAKYAT. ]

**J**AKARTA, 17 Agustus 1950. Lima tahun setelah pecah Revolusi Agustus, sejumlah seniman berkumpul di Ibu Kota. Mereka tidak sedang berdiskusi tentang sastra, seni rupa, atau film, tapi mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Lekra.

Konsep perjuangan Lekra termaktub dalam mukadimah lembaga itu. Kalimat pertamanya menyebutkan, "Rakjat adalah satu-satunya pentjipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia-baru hanya dapat dilakukan oleh Rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakjat, disingkat Lekra."

Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah, mengatakan pembentukan Lekra tak bisa dilepaskan dari situasi politik Tanah Air kala itu. Setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada 1949, Indonesia tidak bisa dikatakan merdeka seratus persen. "Jadi pembentukan Lekra bertujuan membebaskan diri dari ketergantungan pada negeri penjajah," ujar Hersri, pertengahan September lalu.

Seperti ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhiidin M. Dahlan dalam *Lekra Tak Membakar Buku*, Lekra muncul untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi. Bukan cuma para politikus yang mengemban tugas penting ini, melainkan juga para pekerja kebudayaan. "Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi dan kebudayaan nasional."

Mukadimah Lekra juga menyebutkan lembaga itu bekerja di lapangan kebudayaan, terutama kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan para seniman, sarjana, dan pekerja kebudayaan lainnya. "Lekra mengajak para pekerdja-pekerdja kebudayaan untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta



Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pembaruan Indonesia."

Penggagas dan pendiri Lekra adalah A.S. Dha M.S. Ashar, Henk Ngantung, Herman Arjuno, Joeb Ajoeb, Sudharnoto, dan Njoto, yang bersama D.N. Aidit menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah gagal pemberontakan Madiun pada 1948. "D.N. Aidit tampaknya ikut hadir, tapi tidak aktif," ujar Hersri. Menurut dia, H.B. Jassin juga hadir, tapi tidak setuju dengan prinsip Lekra.

Putu Oka Sukanta, sastrawan Lekra asal Singaraja, Bali, mengatakan, meskipun proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan lima tahun sebelum Lekra dibentuk, penjajah tak serta-merta meninggalkan Indonesia dan membiarkan rakyatnya mengatur diri sendiri. Pengaruh kebudayaan feodal dan kebudayaan kaum penjajah masih sangat kuat. "Karena itu diperlukan sebuah gerakan yang mendukung usaha rakyat membangun kebudayaannya, yaitu kebudayaan dan kesenian yang bersumber dari rakyat itu sendiri," tutur Putu.

Tak lama setelah diumumkan, Mukadimah Lekra mendapat kritik dari berbagai kalangan. Joeb





Ajoeb dalam *Sebuah Mocapat Kebudayaan Indonesia* menyatakan kritik-kritik itu terutama menyatakan beberapa bagian Mukadimah tak cocok dengan keadaan Indonesia karena mengandung sejumlah jargon yang tak mudah dipahami umum. Karena itu, disusunlah Mukadimah baru dalam Konferensi Nasional Lekra pertama pada 1957, yang kemudian disahkan oleh Kongres Nasional Lekra pada 1959 di Solo.

Sekretaris Umum Lekra sejak 1957 itu menyatakan Lekra ingin seniman dan sastrawan yang berhimpun di lembaga ini atau di sekitarnya berani, mahir berpikir, dan mengasah intuisi kesenimanannya. "Agar kebudayaannya meninggi, mutu artistik dan ideologi karyawan menjulang, tahan kritik, tahan waktu, dan berfungsi dari masa ke zaman," tulisnya.

Joebaar menyebutkan Lekra dibentuk beberapa hari setelah Konferensi Nasional Kebudayaan Indonesia di Jakarta. Menurut dia, konferensi yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Indonesia itu berlangsung seru. Hampir semua kekuatan dan tokoh kebudayaan hadir untuk meminta pertanggungjawaban delegasi kebudayaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.

#### Basuki Resobowo

(paling kiri) dan Marah Djabal (paling kanan) bersama seniman Lekra di kantor Lekra, Cidurian 19, Jakarta.

Tokoh yang ambil bagian antara lain Ki Hadjar Wantara, Prof Dr Poerbatjaraka, Armijn Pane, Soedono Sastroamidjojo, dan Trisno Sumardjo. Joebaar menulis bahwa Moh. Yamin, anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar yang memberikan tanggungjawaban, menghadapi gugatan para tokoh kebudayaan itu. "Konferensi ini menunjukkan bahwa berkelindannya hubungan antara politik dan kebudayaan, seni, sastra, dan ilmu," Joebaar menulis.

Pada 1950, sejumlah seniman dan sastrawan menyatakan sikap patriotisme mereka dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, yang merupakan manifestasi kebudayaan Angkatan 45. Bagi angkatan ini, revolusi adalah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-usang yang harus dihancurkan. Mereka berpendapat revolusi di Tanah Air belum selesai. Menurut Joebaar, hubungan antara Angkatan 45 dan Lekra sangat erat karena sebagian kekuatan penting Angkatan 45 kemudian mewujudkan dalam Lekra.

Sastrawan Lekra lainnya, Amarzan Ismail Harjo, mengatakan ia untuk pertama kalinya setuju dengan definisi rakyat yang tercantum dalam Mukadimah Lekra merumuskan rakyat sebagai semua golongan di dalam masyarakat yang menentang penjajahan. Kalau dia tidak menentang penjajahan, dia musuh rakyat. "Kemudian itu diperluas menentang penjajahan dan penindasan. Saya sudah menyimak mukadimah semua organisasi di Indonesia, tidak ada yang bisa mendefinisikan rakyat," ujarnya.

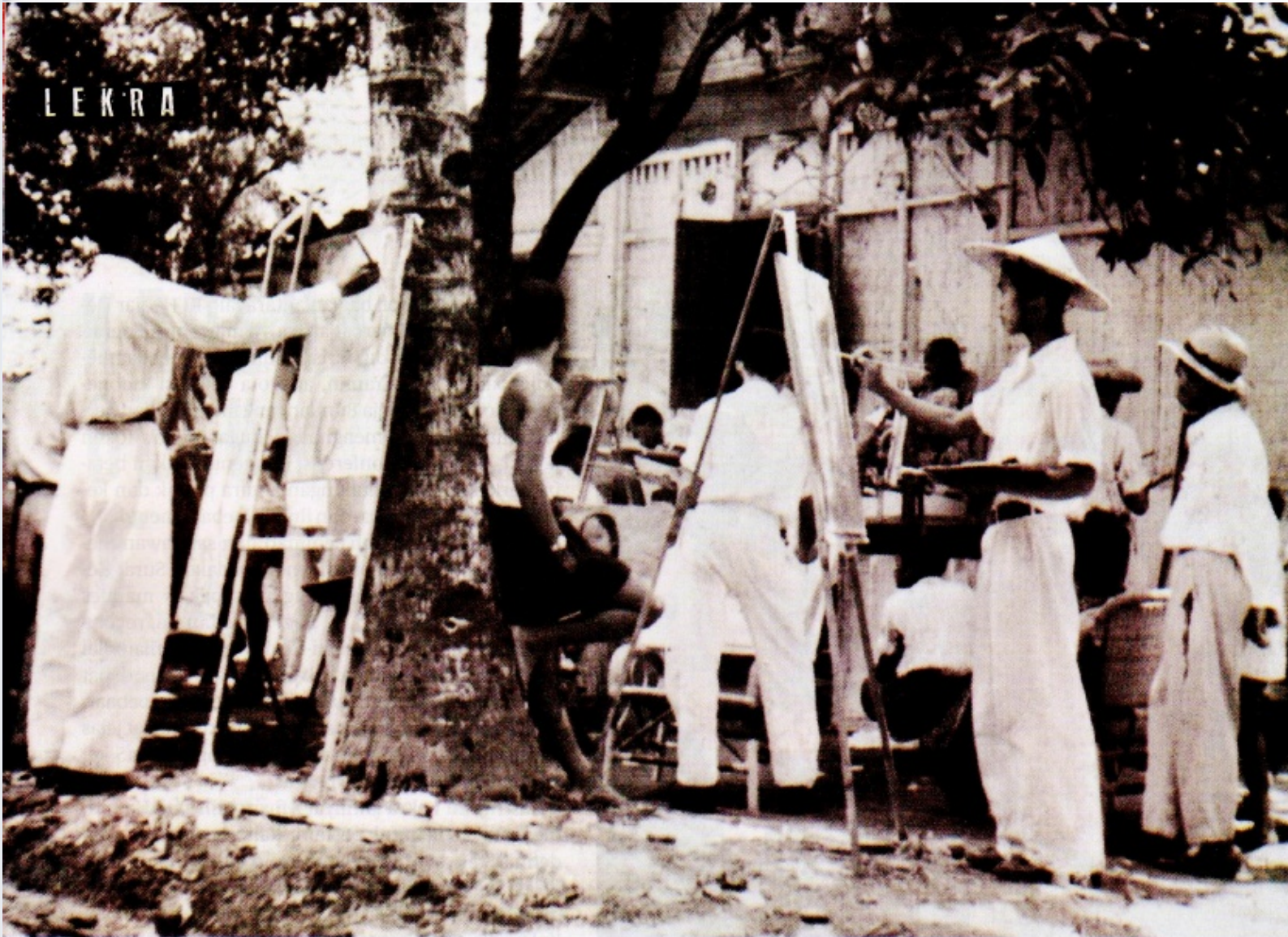
Dharta terpilih sebagai sekretaris umum pertama Lekra. Ajip Rosidi secara khusus menyebutkan nama-nama sastrawan yang memiliki banyak nama samaran ini, antara lain Kelana Asmara dan Klara Akustia. Dalam *Mengenang Hidup Orang Lain*, Ajip menyebutkan Dharta bersama beberapa seniman dan pengarang lain membentuk Lekra di rumah sahabatnya, Azhar Azhar.

Rumah Dinas Perhubungan di Jalan Wahidin 10 Jakarta, itu pula yang kemudian menjadi kantor Sekretariat Pusat Lekra sebelum pindah sebentar ke Jalan Salemba 9 dan akhirnya, sejak 1958, hijrah ke Jalan Cidurian 19, Menteng, Jakarta. Rumah di Jalan Wahidin itu kini tak ada lagi. Di lokasi rumah itu kini berdiri bangunan nomor 8, yang menjadi markas Kepolres Sektor Metro Sawah Besar. Di seberangnya berdiri gedung Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 1. "Tidak ada nomor 10 di sini," kata Tamzil, 79 tahun, yang sudah tinggal di kawasan itu sejak 1973.

Demikian pula di Jalan Wahidin I dan II tak ditempati rumah nomor 10. Sebagian besar bangunan di dua ruas jalan itu milik TNI Angkatan Darat, seperti kantor perwakilan markas Komando Daerah Militer VII Wirabuana dan Komando Daerah Militer IV Divisi 1.

Bekas kantor sementara Lekra di Jalan Salemba





juga telah berubah menjadi kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. "Saya tak tahu kalau kantor itu dulunya kantor Lekra," kata Mainah, 82 tahun, yang tinggal di belakang gedung itu.

Dalam *Kepada Seniman Universal: Kumpulan Esai Sastra A.S. Dharta*, Budi Setiyono mengutip Martina Heinschke, yang menulis disertasi doctoral "Between Gelanggang and Lekra: Pramoedya's Developing Literary Concepts". Heinschke menulis bahwa Dharta menyatakan Peristiwa Madiun bukanlah perselisihan antara kekuatan komunis dan nasionalis, melainkan konflik antar-angkatan. Angkatan 45 gagal karena komitmennya lemah, pecah, dan kurang ketajaman politik. Dharta menuntut para pengarang menyusun awal baru dengan basis komitmen politik yang tegas.

Ia berpendapat Agustus 1945 bukan permulaan revolusi kesusastraan, melainkan permulaan revolusi kemasyarakatan yang ikut mempengaruhi kesusastraan. Bagi Dharta, itu membuktikan kebenaran pendapat bahwa seorang sastrawan tak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya.

Pembentukan Lekra merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak, yakni para seniman dan politikus Partai Komunis Indonesia. Yahaya Ismail dalam *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* menyebutkan Lekra didirikan setelah kurang-lebih 15 orang peminat dan

**Kegiatan melukis**  
di Sanggar Pelukis  
Rakjat, Yogyakarta,  
1952.

pekerja kebudayaan di Jakarta menerima mukamah dan konsep Lekra.

Penulis asal Malaysia itu menyatakan aktivitas Lekra dapat dilihat dari pesatnya kader-kader kebudayaan organisasi ini mendirikan cabang-cabang daerah. Pada 1951 saja, cabang Lekra sudah tersebar di sejumlah kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, Bogor, Bandung, Semarang, Malang, Medan, Bukittinggi, Palembang, Manado, dan Balikpapan.

Awalnya, kata Yahaya, aktivitas kebudayaan Lekra diwadahi dalam lembaga-lembaga kreatif, yang meliputi lembaga seni rupa, film, sastra, dan seni drama. "Untuk melicinkan perjalanan organisasi, setiap cabang Lekra mempunyai seorang wakil yang duduk dalam pimpinan pusat."

Namun, menurut Amarzan, Joebaar pernah beritahu kepadanya bahwa Lekra didirikan mula-mula sebagai sebuah lembaga semacam LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). "Jadi, dia tidak bercabang-cabang, makan dipilih lembaga," ujarnya.

Yang terjadi kemudian, kata dia, setelah Lekra bercabang-cabang, banyak cabang dan bahkan anak cabang yang tidak didirikan oleh Lekra, tapi oleh Partai di daerah merasa tidak lengkap tubuhnya kalau tidak punya Lekra. "Misalnya Deli Serdang. Komite Seksi PKI Deli Serdang membentuk Lekra, baru laporkan ke pimpinan daerah." ■



# YANG SEIRING BERTUKAR JALAN

**S**URAT Kepercayaan Gelanggang dan Mukadimah Lembaga Kebudayaan Rakyat memiliki kemiripan. Sekretaris Umum Lekra sejak 1957, Joebaar Ajoeb, dalam buku *Sebuah Mocapat Kebudayaan Indonesia*, mengatakan keduanya bertujuan memajukan kebudayaan Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa, termasuk dalam bersikap terhadap revolusi Indonesia baru, sejarah, dan masa depan. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan manifes politik Angkatan 45. "Keduanya sangat berkaitan. Sebagian kekuatan penting dari Angkatan 45 nantinya akan mengejawantah pada Lekra," kata Joebaar.

Surat Kepercayaan Gelanggang pertama kali dipublikasikan majalah *Siasat*, mingguan politik dan kebudayaan, edisi Oktober 1950 dalam rubrik Cahier Seni dan Sastra, yang juga bernama Gelanggang. Surat ini merupakan upaya menerjemahkan kebudayaan dan revolusi nasional dengan unsur-unsur universalisme yang humanis dan dipengaruhi budaya Barat. Surat Kepercayaan Gelanggang ini menjadi ibu kandung Manifes Kebudayaan.

Beberapa bulan sesudah Surat Kepercayaan Gelanggang diumumkan pada 17 Agustus 1950, dibentuk Lekra, yang pandangan dan haluan politiknya tertuang dalam Mukadimah. Isinya, rakyat adalah masyarakat yang menentang penjajahan, dan revolusi harus diperjuangkan. Lekra berjuang melalui seni dan ilmu.

Joebaar mengatakan ada perbedaan antara Surat Kepercayaan Gelanggang dan Mukadimah Lekra. Dia mencontohkan soal cara memahami dan mengemban amanat pembaruan, kemanusiaan, dan keindahan kebudayaan yang dikandung Revolusi Agustus 1945 serta peran rakyat Indonesia dan sikap terhadap khazanah kebudayaan dunia. Sementara Angkatan 45 bersikap intuitif terhadap revolusi, Lekra mencoba mengembangkannya menjadi konsep yang dilembagakan. "Lekra menjabarkan secara detail dan aktual bagi kepentingan pembaruan kebudayaan umumnya, seni, dan sastra," ujarnya.

Seniman Angkatan 45 memang tidak dilembagakan. Ikat-

an mereka ada dalam roh pembaruan yang datang dari Revolusi Agustus 1945. Mereka hanyalah komunitas seniman yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan, tanpa diikat organisasi. Mereka sering berkumpul di Jalan Menteng Raya 31. Kegiatan perkumpulan seniman Angkatan 45 biasanya diarahkan untuk melawan motif-motif politik dan budaya kolonial. Mereka berkarya dan berjuang dengan jiwa anti-penjajahan.

Perbedaan yang lebih jelas antara seniman Angkatan 45 dan Lekra terletak pada orientasi sandaran, kegiatan, dan pengabdian praktisnya. Lekra secara terbuka menyebutkan kegiatannya diabdikan kepada rakyat, yaitu kaum buruh, tani, dan prajurit. Surat Kepercayaan Gelanggang tidak



**Sebuah acara Lekra** di Jawa, awal 1960-an.

merumuskan hal itu. Angkatan 45 lebih mengutamakan individualisme. Mereka juga sering mengkritik dan menghujat revolusi. Bahkan karya-karyanya bersifat satire atau sindiran. Di sinilah terjadi persimpangan antara Angkatan 45 dan Lekra. "Mereka bagaikan orang yang seiring bertukar jalan," katanya.

Kenyataannya, paham Surat Kepercayaan Gelanggang dan Lekra tak seiring, bahkan berlawanan. Lekra bahkan menilai sinis Angkatan 45. A.S. Dharta, salah seorang pendiri Lekra, menyebutkan Angkatan 45 telah mati. Penolakannya terhadap karya seni Angkatan 45 tercantum dalam buku *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*, yang ditulis Alexander Supartono. ■



# MAGNET BAGI PARA SENIMAN

**[** LEKRA MENYEDOT PERHATIAN PARA SENIMAN MUDA. MENEBAR PENGARUH DAN MENGUASAI PANGGUNG KESENIAN. **]**

**G**REGORIUS Soeharsojo Goenito mengenang Balai Pemuda di Surabaya sebagai saksi bisu kejayaan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pada 1963-1965, kata dia, di gedung itu para seniman Lekra kerap mengadakan pertunjukan seni. Mereka mendominasi pentas drama, musik, paduan suara, serta pameran seni rupa. Beragam atraksi kesenian rakyat, seperti sendratari, ludruk, wayang kulit, dan reog, hampir selalu dijejali penonton.

"Lekra sangat berpengaruh dan menguasai panggung kesenian waktu itu," kata seniman Lekra ini saat ditemui di rumahnya di Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu tiga pekan lalu. Ia mengatakan, begitu besarnya pengaruh Lekra, sehingga tak ada lembaga kesenian lain yang mampu menyejajarkan diri dengannya.

Pria 77 tahun asal Madiun itu merupakan satu dari sekian banyak seniman yang *nyemplung* ke Lekra. Alasannya memilih organisasi yang berdiri pada 17 Agustus 1950 di Jakarta ini adalah banyaknya kesempatan belajar bagi seniman muda. Terlebih seni rupa ketika itu sedang naik daun.

Greg muda menghabiskan waktu melukis di Sanggar Sura di belakang Balai Pemuda. Satu-satunya tempat berlatih melukis di Surabaya ini diasuh langsung pemimpin Lekra Surabaya, Roestamadji dan Sukaris S.G. "Mereka aktif membimbing seniman muda," ujarnya. Sederet pelukis papan atas Indonesia, seperti Affandi, Hendra Gunawan, dan Sudjojono, sering menggelar pameran di Balai Pemuda.

Pentas seni berkualitas oleh seniman-seniman terkemukalah yang menarik minat Greg merantau ke Surabaya, ketika dia berusia 24 tahun, pada 1960. Tiga tahun kemudian, ia bergabung dengan Lekra. Ia

mengatakan karya para seniman kala itu mengamati tema revolusi dan kondisi rakyat yang tertindas.

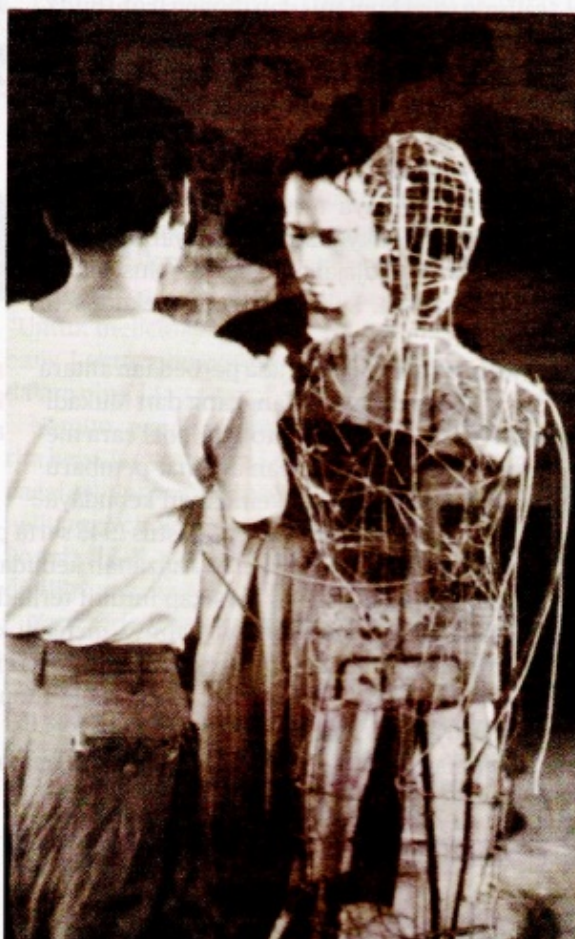
Pesona Lekra juga menjejak di Yogyakarta. Seniman sanggar seni Bumi Tarung, Djoko Pekik, mengatakan banyak seniman muda Yogyakarta tertarik masuk Lekra lantaran kepincut ideologi kiri yang mengusung kredo kerakyatan. Semangat perlawanan terhadap kapitalisme dan neokolonialisme mem bakar semangat mereka, yang kebanyakan mahasiswa baru. Sanggar seni yang awalnya beranggotakan sepuluh orang itu perlahan berkembang jumlah anggotanya menjadi 30 seniman. Sebagian besar di antaranya masuk Lekra, termasuk Pekik.

Ia mengatakan seniman muda Bumi Tarung ya masuk Lekra tergiur oleh propaganda dan agitasi kerakyatan. Selain berkarya atas nama seni kerakyatan, mereka rutin turun ke bawah (turba) bersama buruh dan tani. Militansi sanggar seni yang berdiri pada 1950 itu juga tecermin dari slogannya, yaitu mengabdikan pada buruh dan tani. "Karena masih muda, mereka bersemangat mengacungkan tangan dan mengepuk tinju ke langit," tuturnya.

Bagi wartawan Amarzan Ismail Hamid, 72 tahun, ada dua alasan yang memikatnya masuk Lekra. Pertama, ia tertarik oleh keberpihakan Lekra pada rakyat. Kedua, Lekra menjadi tempat berkumpulnya tokoh seni terkemuka, dari pelukis Affandi dan Basuki

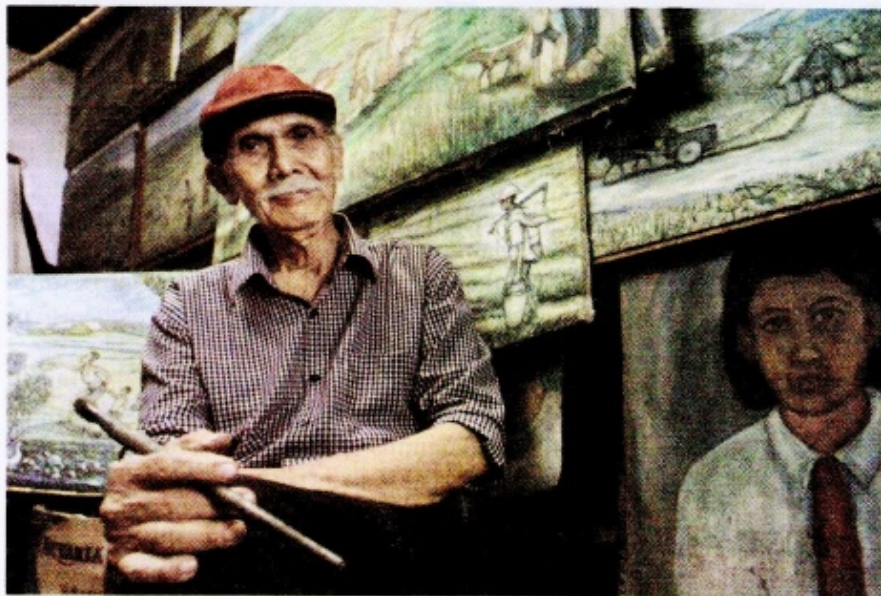
## Batara Lubis

di Sanggar Pelukis Rakjat, Yogyakarta, 1952.



KOLEKSI IMAA/MIKHAEL SUSANTO





**Gregorius Soeharsojo Goenito**, 77 tahun, mantan anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat, di rumahnya, Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur, 22 September 2013.

Resobowo, aktor dan sutradara Basuki Effendy, hingga musikus Sudharnoto dan Amir Pasaribu. Bahkan sastrawan Angkatan 45 yang ia idolakan, seperti Rivai Apin dan Utuy Tatang Sontani, juga bergabung di Lekra. "Puisi mereka, sewaktu saya di SMP, saya taruh di bawah bantal, dan sekarang kami jadi teman," katanya.

Amarzan bergabung dengan Lekra pada 1957, saat ia berumur 16 tahun. Ketika itu, ia memperoleh undangan mengikuti Konferensi Daerah I Lekra di Tanjung Balai, Sumatera Utara. "Di situ, saya kenal dengan orang-orang Lekra," ucapnya. Sejak itu, ia aktif terlibat dalam pelbagai kegiatan Lekra. Ia mengaku bangga bisa mengenal dan bekerja bersama para seniman tersohor saat umurnya masih belasan tahun.

Menurut pelukis Amrus Natalsya, 80 tahun, setiap seniman harus memiliki sikap dan prinsip. Begitu pula saat mendirikan sanggar seni. "Untuk apa kami melukis, melukis untuk siapa, apa manfaat melukis," ujar kolega Pekik saat mendirikan Bumi Tarung itu.

Lekra menuangkan arah dan tujuan berkesenian secara jelas di dalam mukadimahnyanya. "Membela buruh dan tani itu hal yang berat karena tidak bisa *ngawur*," Amrus menambahkan. Keselarasan ide inilah yang mendorongnya bergabung dengan Lekra.

Ada alasan lain seniman bergabung dengan Lekra. Pekik mengatakan sebagian seniman yang berhimpun ke Lekra mendapat fasilitas sekolah ke luar negeri. Ia menyebut Trubus Sudarsono—seniman Lekra yang juga anggota PKI—yang pernah dikirim belajar ke Cekoslovakia. Tentu tidak semua seniman Lekra mendapat fasilitas itu.

Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan dalam *Lekra Tak Membakar Buku* membenarkan ucapan Pekik. Mereka menyebutkan Lekra menjadi

daya tarik karena kerap memberikan "donasi politik" bagi para perupa.

Lekra, menurut Rhoma dan Muhidin, memberikan santunan perjalanan ke luar negeri dengan memanfaatkan jaringannya di sejumlah negara "berideologi serumpun" yang tersebar di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Lekra memperoleh modal jarringan dari kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia, yang muncul lagi di pentas politik nasional setelah menempati posisi keempat dalam Pemilu 1955. "Usaha Lekra menjadi jembatan bagi perupa untuk ke luar negeri menyaingi usaha serupa yang biasa dilakukan Sticusa, yang kerap memberikan beasiswa bagi seniman Indonesia untuk 'mencicipi' pengalaman di luar negeri, terutama ke negeri Belanda," demikian mereka menulis.

Menurut Pekik, Lekra terbentuk atas anjuran Presiden Sukarno, yang mendorong semua partai memiliki lembaga kebudayaan. Seketika itu Lekra menjadi alat propaganda politik para seniman. Mereka menggunakan seni sebagai media perlawanan terhadap ideologi kapitalisme.

Pekik menambahkan, pengaruh Lekra cukup kuat lantaran memiliki struktur lembaga yang mengikat dari pusat hingga daerah. Struktur organisasi hingga tingkat kecamatan menaungi kegiatan seni tradisional, seperti tari, reog, ludruk, wayang, dan ketoprak. Adapun seni rupa hanya ada di tingkat kabupaten. "Seni rupa ini karya Lekra yang elite."

Tahun 1960-an menjadi puncak kejayaan Lekra. Ketika itu, lembaga ini sangat gencar menggelar pertunjukan dan pameran seni. Biasanya, mereka mengambil momentum peringatan Hari Kemerdekaan, ulang tahun PKI, dan ulang tahun Lekra. Di Yogyakarta, misalnya, Lekra kerap mementaskan ketoprak—tempat pertunjukan yang sifatnya darurat untuk mengisi acara seni di Sekatenan. Mereka berbondong-bondong dari desa ke desa.

Di Surabaya, Lekra mendongkrak popularitas ludruk, yang berbasis di perkampungan. "Tidak ada ludruk yang tidak masuk Lekra," kata Greg. Kelompok yang sudah ada sebelum Lekra, seperti Ludruk Mahen, Cinta Massa, Tresno Enggal, Enggal Tresno, dan Ludruk Arum Dalu, juga memutuskan bergabung dengan Lekra.

Namun segala keriuhan dan kemilau pertunjukan seni itu harus berakhir setelah meletus tragedi 30 September 1965. Lekra, yang dianggap sebagai *derbouw* PKI, dan semua senimannya diburu tentara. Greg ditangkap pada Juni 1966. Ia menghabiskan tiga tahun berpindah tempat tahanan dan sembilan tahun dikucilkan ke Pulau Buru. Meski begitu, ia mengaku bangga pernah bergabung dengan Lekra. "Terlepas dari saya merasa terharu ketika mengingatnya."



# NJOTO DAN PARA PENDIRI

[ NJOTO TAK SETUJU LEKRA "DIMERAHKAN". DI ANTARA SESAMA PENDIRI, DIA PUNYA PENGARUH BESAR. ]

**N**JOTO kerap datang ke rumah di Jalan Wahidin 10, Jakarta Pusat, pada pertengahan 1950-an. Di kediaman M.S. Ashar itulah Wakil Ketua Central Komite Partai Komunis Indonesia ini bertemu dan berdiskusi dengan seniman-seniman muda, termasuk Amrus Natsalsya. Kala itu masih berusia 25 tahun, Amrus bolak-balik ke Jakarta untuk mengerjakan pesanan dekorasi dan poster. Dia kerap singgah di rumah yang dipakai sebagai markas Lembaga Kebudayaan Rakyat itu.

Amrus mengenang Njoto sebagai orang yang tak segan-segan mengulurkan tangan kala dia kesulitan dalam urusan pekerjaan. Kalau tak punya uang untuk membeli bahan patung dan lukisan, "Saya bilang saya perlu kayu. Dia membantu," kata perupa yang kini berusia 80 tahun itu, menceritakan pengalamannya kepada *Tempo*, awal September lalu.

Setelah karya seninya jadi, Amrus kadang meminta bantuan Njoto menjualkannya. Dia tak peduli Njoto orang PKI atau bukan. "Yang pasti, dia orang yang mendukung saya untuk menjadi seniman," ujarnya.

Lahir pada 1927 di Jember, Jawa Timur, Njoto dikenal sebagai pemuda jenius. Ayahnya, Raden Sosro Hartono, mendidiknya dengan tegas, keras, dan berdisiplin. Pada usia 16 tahun, dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta, wakil Partai Komunis Indonesia Banyuwangi. Padahal dia masih duduk di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)—setingkat sekolah menengah pertama—di Solo, Jawa Tengah. Di Yogya, Njoto bertemu dengan Aidit dan M.H. Lukman. Mereka bertigalah yang lalu membangun kembali PKI setelah meletus peristiwa Madiun, 19 September 1948.

Njoto, D.N. Aidit, dan sejumlah seniman mendirikan Lekra di Jakarta dua tahun setelah Peristiwa Madiun. PKI juga mulai bangkit. Sebagai Pemimpin Redaksi *Harian Rakjat*, Njoto memberi ruang luas bagi seniman-seniman Lekra untuk menulis dan mengekspresikan pendapat.

Mantan jurnalis *Harian Rakjat* dan seniman Lekra, Amarzan Ismail Hamid, kini 72 tahun, tahu per-

sis Njoto adalah politikus dan seniman multi-kemampuan. Selain berorasi, Njoto lihai menulis puisi dan esai, meniup saksofon, berdansa, serta fasih berbicara soal musik. "Dia seniman serba bisa," kata Amarzan, pertengahan September lalu.

Njoto pula yang menjaga "garis" Lekra tidak diubah menjadi "merah" oleh PKI. Njoto tahu tak semua anggota Lekra komunis dan dia ingin tetap mempertahankan posisi Lekra seperti itu.

Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, Aidit sempat khawatir Njoto akan membikin partai kiri yang baru di luar PKI. Maka PKI menyelenggarakan sendiri Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner pada September 1964 di Jakarta untuk menarik para seniman. "Pengaruh Njoto saat itu besar di kalangan seniman," ujar Asvi dalam diskusi di *Tempo*, Agustus lalu.

Njoto pula yang mendorong jargon "Politik selangai Panglima" untuk diadopsi Lekra. Ironisnya, kala itu huru-hara politik pula nasib dan keberadaan Njoto tak diketahui setelah 1965.

\*\*\*

SEMENTARA Njoto orang PKI, Ashar dikenal sebagai orang Partai Murba. Amarzan mengenal Ashar dan keluarganya. Tubuhnya besar dan tinggi. Orang Padang ini kenal dekat dengan Presiden Sukarno dan Menteri Penerangan Burhanuddin Mohammad Diah—dikenal sebagai B.M. Diah. Di era Sukarno, B.M. Diah menjabat menteri pada Juli 1966–Oktober 1966.

Menurut Amarzan, Ashar salah satu penyair yang cukup dikenal kala itu dan terlibat di lembaga sastra Lekra. "Puisinya tak ada yang istimewa, tapi dia punya peran besar di awal Lekra," kata Amarzan, yang masuk Lekra pada 1957.

Riwayat hidup Ashar tak banyak terungkap. Amarzan tak tahu persis apakah Ashar ikut dituduh atau tidak setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia hanya ingat, setelah peristiwa berdarah itu, Ashar ditampung B.M. Diah di harian *Merdeka*. Amarzan yang sempat ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru hanya sekali bertemu lagi dengan Ashar, pada 1990-an. "Dia duduk di kursi roda. Ada juga istrinya," ujarnya, mengenang pertemuan di sebuah pasar swalayan di Rawamangun, Jakarta Timur.

\*\*\*

A.S. Dharta lahir dengan nama Endang Rodji di





**Njoto**, akhir 1950-an.

anjur pada 1924. Sebelum ikut mendirikan Lekra dan menjabat sekretaris umum, dia malang-melintang dalam gerakan revolusi dan gerakan buruh. Dia pernah menjadi jurnalis di *Harian Boeroeh* di Yogya. Dia memimpin Serikat Buruh Kendaraan Bermotor, Serikat Buruh Batik, Serikat Buruh Pelabuhan, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.

Dalam pengantar *Kepada Seniman Universal: Kumpulan Esai Sastra A.S. Dharta*, Budi Setiyono menuliskan, pengalaman Dharta dimatangkan lewat International Union of Students, World Federation of Democratic Youth, dan World Federation of Trade Union. "Organisasi inilah yang membuatnya memahami dampak buruk kolonialisme dan imperialisme."

Dharta ikut mendirikan Masyarakat Seni Djakarta Raja. Dia penyair yang kerap menggunakan sejumlah nama pena saat menulis sajak. Klara Akustia salah satu nama yang populer. Nama lainnya Kelana Asmara, Jogaswara, Barmara Putra, dan Adi Sidharta.

Menurut Ajip Rosidi dalam *Mengenang Hidup Orang Lain*, Klara Akustia adalah nama panggilan kesayangan untuk istri Dharta, Klara. Nama sebenarnya Aini. Istrinya dibawa kabur tentara Belanda. "Untuk membuktikan dia tetap setia, dia gunakan nama Klara Akus(etia)," tutur Ajip.

Budi, yang intensif mewawancarai Dharta untuk menyusun biografi setahun sebelum kematiannya pada 2007, menceritakan di masa revolusi Dhar-

ta bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia yang kantor pusatnya di Menteng 31, Jakarta. Di situ, Aini dikawin-paksa dan dibawa kabur ke Belanda oleh Letnan Verwey, perwira Netherlands Indies Forces Intelligence Service, yang mengubek-ubek Dharta di Palembang. "Dia adalah korban revolusi," kata Dharta sebelum kematiannya.

Dharta sempat duduk sebagai anggota Konstituante dari calon tak berpartai lewat PKI pada 1955. Tapi, pada November 1958, dia dipecat dari jabatan sekretaris umum dan anggota Lekra karena diketahui berselingkuh. Di Lekra-juga di PKI-selingkuh dan poligami diharamkan.

Pemecatan itu, menurut Hersri Setiawan, diungkapkan di *Harian Rakjat*. "Pengumuman pemecatan itu, menurut saya, agak kelewatan," katanya. Dia sempat ditahan di penjara Kebonwaru, Bandung, dan baru dibebaskan pada 1978.

\*\*\*

HENK Ngantung-nama lahirnya Hendrik Henyus Joel Ngantung-memimpin Lembaga Seni Indonesia, salah satu lembaga kreatif bentuk Lekra. Di lembaga yang lahir pada Februari 1959 itu, menurut Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Henk bertugas menyediakan fasilitas berbagai kegiatan seni seperti pameran tunggal dan pameran bersama.

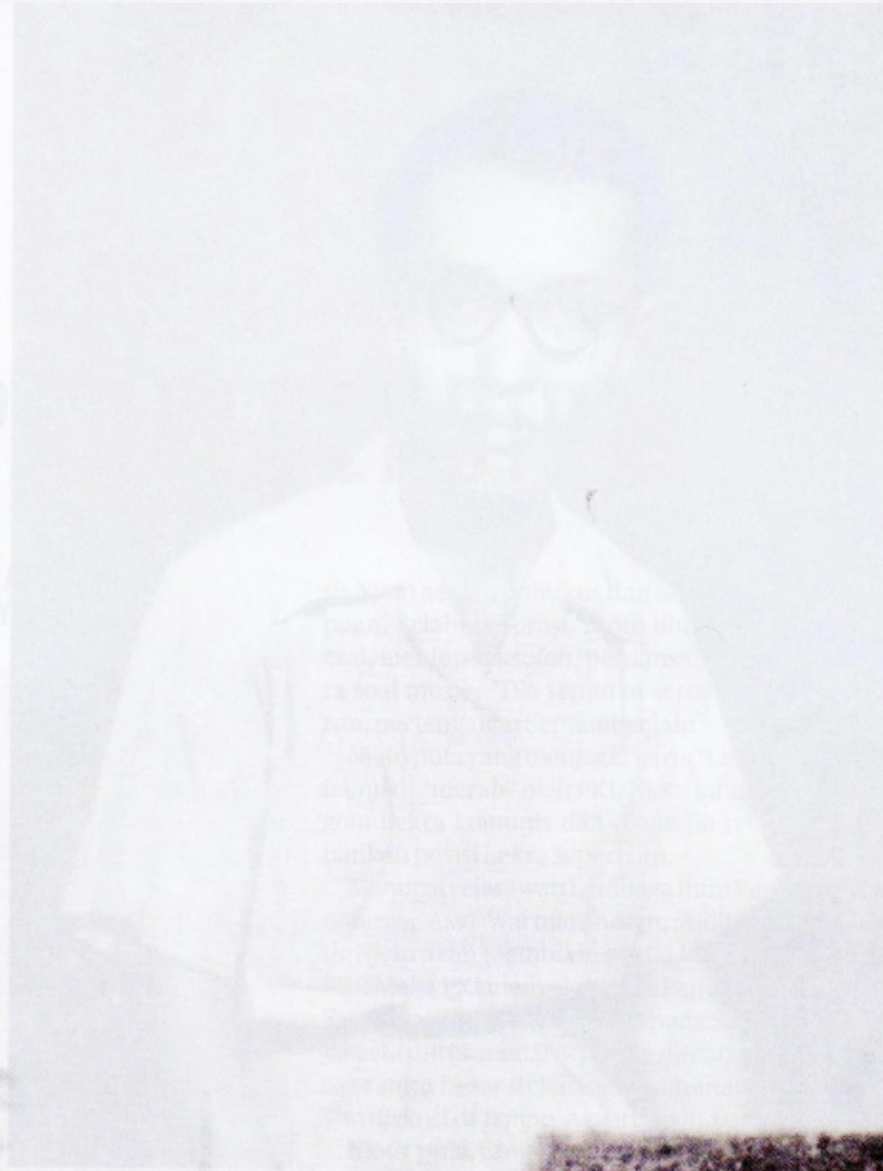
Dia lahir di Bogor pada 1921. Sejak kecil Henk memang bercita-cita menjadi pelukis. Saat menemukannya di Bandung, dia belajar melukis kepada Rudolf Hart, pelukis potret populer asal Austria.

Bersama Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan, dan Basuki Resobowo, Henk adalah anggota pimpinan pusat Lekra. Dia juga menjabat Wakil Sekretaris Umum Lekra. Pada masa Orde Lama, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Gubernur DKI (1960-1964), kemudian Gubernur DKI (1964-1965). Setelah peristiwa berdarah 1965, dia kepalanya dicopot oleh Jenderal Soeharto. Dia kemudian menjadi pelukis hingga meninggal pada 1990.

Tentang pendiri PKI lainnya, seperti Herman Sedyatno, tak banyak informasi yang bisa dirujuk. "Saya pernah bertemu dengan dia," kata Amarzan. Adnan Sudharnoto, menurut Hersri Setiawan dalam *Kisah Gestok*, adalah penggubah *Mars Pancasila* berwujud Prahar pada 1956. Lagu ini dikenal sebagai *Gestok Pancasila*. Bersama Orkes Hawaiian Indonesia pimpinan Maladi, Sudharnoto menjadi pengisi sajian musik RRI di Surakarta. Sejak 1952, dia menjabat kepala Seksi Musik RRI Jakarta. Dia juga menjabat sebagai Lembaga Musik Indonesia, lembaga kreatif bentuk Lekra. Gara-gara kegiatannya di Lekra, pada 1964 Sudharnoto dipecat dari RRI. Dia menjadi tahanan politik di Rumah Tahanan Salemba. ■



**Kongres Lekra** di Taman Sriwedari, Solo, Januari 1959.







LIPUTAN KHUSUS

# SENI UNTUK RAKYAT

UPAYA LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT  
MENANCAPKAN BENDERA SENI UNTUK RAKYAT  
KIAN TERORGANISASI PASCA-KONGRES NASIONAL  
DENGAN METODE TURUN KE BAWAH, PARA  
SENIMAN LEKRA DIDORONG UNTUK MENGOLAH  
TEMA "KEHIDUPAN DAN PERJUANGAN RAKYAT  
PEKERJA". MEDIA MASSA, SEPERTI *HARIAN  
RAKJAT* DAN *BINTANG TIMUR*, TURUT BERPERAN  
MENYEBARLUASKAN KARYA DAN PEMIKIRAN  
MEREKA.



# TURBA DAN JURUS

## 1-5-1

KONGRES PERTAMA LEKRA BERHASIL  
MERUMUSKAN PRINSIP KERJA BERKESENIAN.  
MEMBANGUN ORGANISASI LEBIH SISTEMATIK.

**T**AMAN Sriwedari di Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi Nomor 275, Kota Surakarta, bersolek. Gapura dihiasi lukisan, tiang bendera Merah Putih dan umbul-umbul dipancang sepanjang tepi jalan. Di area Taman tergelar sembilan pameran: pertunjukan musik dan tari, seni lukis, drama, patung, poster, penerbitan, pakaian adat, sampai instrumen tradisional.

Di panggung utama tampil bergantian ludruk, ketoprak, wayang orang, reog, tarian, dan nyanyian. Begitulah *Harian Rakjat* edisi 31 Januari 1959 menggambarkan kemeriahan hajatan bernama Pesta Kebudayaan itu. Koran trompet Partai Komunis Indonesia itu menyebut acara ini paling meriah dalam sejarah pergelaran seni di Surakarta.

Presiden Sukarno pun berkunjung pada hari pertama. Dia malah turun menari bersama rakyat. Setiap malam jumlah pengunjung mencapai 9.000-15 ribu orang. Pekan Kebudayaan selama sepekan sejak 23 Januari 1959 itu merupakan bagian dari Kongres Nasional I Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang dibuka esok harinya. Inilah kongres pertama dan terakhir Lekra sekaligus bukti kebesaran organisasi yang berdiri pada 17 Agustus 1950 itu.

Kongres itu memperlihatkan Lekra yang matang sebagai gerakan kebudayaan. Bukan hanya mukadimah direvisi dan peraturan dasar diputuskan, juga struktur diperjelas, dan arah serta sikap dirumuskan. Di situ tugas dan kedudukan rakyat dipertegas: "rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan".

Hersri Setiawan, 77 tahun, saat itu Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah, terlibat dalam kepanitiaan dan menyusun acara. Menurut dia, kongres sukses karena berhasil merumuskan Prinsip 1-5-1, yang men-



jadi pedoman gerakan kebudayaan dan arah kerja Lekra. Prinsip 1-5-1 adalah kerja kebudayaan yang berorientasi politik sebagai panglima dengan lima komposisi: meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, serta realisme sosial dan romantik revolusioner. Semua dipraktekkan dengan metode turun ke bawah (turba).

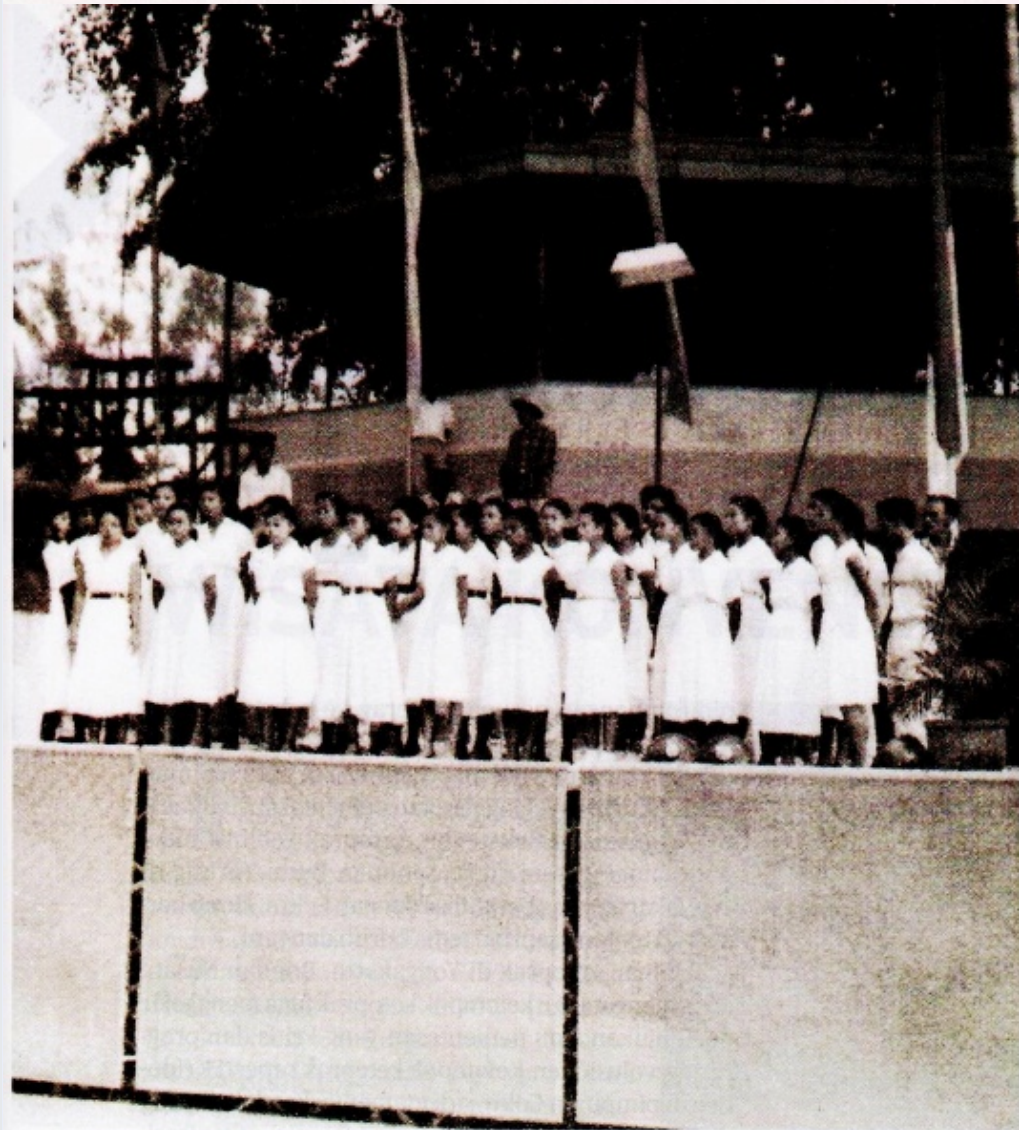
Hersri mengatakan entah dari kearifan siapa Prinsip 1-5-1 muncul. Yang pasti bukan dari Njoto seorang, melainkan diturunkan dari kongres. Tapi yang mendasar dan mendukung konsep politik sebagai panglima adalah Njoto dalam pidatonya. Menurut anggota Sekretaris Pimpunan Pusat Lekra yang juga Wakil Ketua Central Komite PKI itu, politik dan kebudayaan harus dilekatkan di tempat yang semestinya. "Kekeliruan besar yang mempersilakan kebudayaan berjalan sendiri, politik tanpa bimbingan politik," tulis Njoto.

\*\*\*

DALAM pandangan Putu Oka Sukanta, 74 tahun, anggota Lekra yang juga penulis, Prinsip 1-5-1 semesta, semacam tuntunan penciptaan. "Ini hanya bacaan teoretis. Tidak ada yang mengharuskan. Boleh jadi kebanyakan seniman Lekra tak tahu," katanya.

Meski tidak ada keharusan, yang jelas perumusan Prinsip 1-5-1 dalam kongres itu didengar oleh wakil Lekra dari berbagai daerah di Indonesia. Joebaar Ajoeb c





lam Laporan Umum-nya menyebutkan kongres itu dihadiri wakil seluruh Lekra daerah. "Sekarang belum pasti berapa jumlah anggota kita, tapi yang terang jumlahnya tak seperti dikatakan pepatah: 'bisa dihitung dengan jari tangan sebelah'," seperti ditulis Sekretaris Umum Lekra 1957-1965 itu.

Soal jumlah anggota memang kontroversial. Oey Hay Djoen, anggota Sekretariat Pimpinan Pusat Lekra, dalam acara Diskusi Bulan Purnama pada Januari 2002 mengatakan sudah beberapa kali Lekra gagal meregistrasi anggotanya. "Tidak ada orang yang memegang kartu anggota." Menurut Merle Calvin Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, "Jumlah front intelektual PKI, Lekra, mencapai 100 ribu orang pada Mei 1963."

Oey (wafat pada 2008) mengatakan orang-orang Lekra adalah anggota di basis-basis kesenian, seperti Pelukis Rakyat dan Ludruk Marhaen, yang sudah ada sebelum Lekra. "Mereka bangga menyebut diri anggota Lekra." Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menyebutkan Lekra turut berperan dalam keberhasilan PKI masuk empat besar pada Pemilihan Umum 1955. "Kampanye PKI sejak awal menyertakan grup-grup kesenian. Inilah jasa orang-orang Lekra."

\*\*\*

SEJALAN dengan ditelurkannya konsep 1-5-1, Lekra merombak struktur organisasinya. Beberapa bulan

**Paduan suara** saat pembukaan Kongres Lekra di Solo, Januari 1959.

setelah kongres, Lekra menyusun enam lembaga kreatif: Lembaga Sastra Indonesia, Lembaga Seni Indonesia, Lembaga Musik Indonesia, Lembaga Tari Indonesia, Lembaga Film Indonesia, dan Lembaga Seni Drama Indonesia.

Lembaga Seni Rupa Indonesia berdiri pada Februari 1959 dan diketuai Henk Ngantung. Lembaga Film Indonesia didirikan April 1959 dan diketuai Bachtiar Siagian. Lembaga Sastra Indonesia berdiri pada April 1959, ketuanya Bakrie Siregar. Lembaga Musik Indonesia didirikan sesudahnya. Dalam konferensi pada Oktober 1964, LMI mengutuk pencampuran lagu-lagu Indonesia oleh Malaysia.

Adapun Lembaga Seni Tari Indonesia dibentuk belakangan. Penciptaan tari menjadi fokus pembicaraan dalam konferensi pada 1964. Lembaga Seni Rupa Indonesia (LSDI) mengurus beberapa seni pertunjukan rakyat, seperti ketoprak, ludruk, dan wayang orang. Untuk mengintensifkan seni pertunjukan, lembaga itu menyerukan produksi naskah sebanyak-banyaknya.

Menurut seniman ber julukan Pelukis Satu Rupa, Djoko Pekik, 76 tahun, LSDI memiliki struktur pusat hingga kecamatan. Sedangkan seniman seni rupa hanya sampai kabupaten. "Seni rupa ini Lekra yang elite," ujar pelukis dari Sanggar Burung yang berafiliasi dengan Lekra itu.

Semua lembaga kreatif wajib menarik perhatian atau teman seniman. Hersri, yang bergabung dengan Lekra pada 1958 saat masih mahasiswa, ingat bagaimana dia mengajak sesama seniman. Ia, misalnya, pergi ke Semarang dan setiap malam mengunyah Pasar Yaik. "Saya lihat wayang *thithi* setiap Rabu yang di Sobokartti, dan wayang orang Ngesti Pulo. Tiga kesenian ini potensial," kata Hersri, sembilan tahun kemudian mendekam di Pulau Buru.

"Wayang *thithi* akhirnya bisa dipegang karena banyak orang Tionghoa itu mau diajak bermain wayang," ucap Hersri. Setelah mendekati para pemain wayang, ia bergerak ke panggung rakyat di Tambak Lorok, permukiman nelayan miskin di pesisir Semarang.

Dengan metode demikian, tak mengherankan Lekra menjadi semakin besar. Tiap lembaga memiliki anggota yang militan dan kegiatan yang agresif. Tasi besar Lembaga Film Indonesia, misalnya, sukses mengampu Festival Film Asia-Afrika II pada 1964, yang diikuti 27 negara. Pergelaran ini lalu diikuti dengan pemboikotan American Movie Picture Association of Indonesia (AMPAI), distributor film Amerika Serikat. Pada pagi hari 16 Maret 1965, ratusan film Lekra bergerak menduduki gedung AMPAI di Jalan Sagara. "Film2 AS sumber moral bedjat", bunyi salah satu poster.



# BURUH SENI BERSATULAH

**S**ENIMAN-seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah pekerja seni yang bisa diandalkan untuk mengerjakan proyek besar. Karena itulah Presiden Sukarno meminta seniman Lekra menghiasi hotel milik negara, seperti Hotel Indonesia di Jakarta, Ambarrukmo di Yogyakarta, Bali Beach Hotel di Sanur, dan Pangeran Beach Hotel di Jawa Barat.

Di empat hotel ini, seniman Lekra membuat relief, patung taman, mozaik, dan lukisan. "Ada lukisan besar karya seniman Gambir Anom dipajang di Hotel Indonesia," ujar pelukis Djoko Pekik, yang pernah aktif di Lekra, dua pekan lalu.

Sejumlah patung di Jakarta yang bisa kita lihat hingga saat ini—semisal Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng—juga mendapat sentuhan seniman Lekra. Trubus, meski pematung utamanya Edhi Sunarso bukan anggota Lekra. Pelukis Lekra, Sudjojono, juga diminta membuat relief yang fenomenal di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta.

Bagi seniman Lekra, yang berkesenian dengan politik sebagai panglima, berkarya adalah bagian dari perjuangan. Meski tak langsung berada di bawah Partai Komunis Indonesia, seniman Lekra bekerja seperti mesin politik. "Karena seniman Lekra pekerja kebudayaan yang ilmunya tak diperoleh di sekolah, tapi di masyarakat," kata Hersri Setiawan, mantan Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah.

Ini seperti kewajiban bagi para seniman. Kewajiban ini juga berlaku pada Permadi Lyosta, kini 83 tahun. Agar terhindar dari kewajiban itu ia pindah dari Yogyakarta ke Bali pada akhir 1950-an untuk menghindari pembuatan patung pesanan negara. "Karena saya batuk-batuk terus kena debu," ujarnya kepada *Tempo*, 6 September lalu.

Meski tak lagi mengerjakan patung pesanan negara, Permadi tak berhenti bekerja untuk kebudayaan rakyat. Pelukis dari Sanggar Pelukis Rakyat ini mengkoordinasi seniman di Bali jika ada permintaan kegiatan untuk partai atau Lekra pusat. Biasanya mereka meminta penari atau pemain gamelan untuk acara atau pameran seni rupa di dalam dan luar kota. Pernah juga dia mengadakan pameran dan memim-

DALAM BERKARYA, PARA SENIMAN LEKRA SEPERTI BURUH: AJEK DAN TAK KENAL LELAH. DIANGGAP PERJUANGAN.

pin rombongan perupa pameran ke beberapa negara Eropa.

Selain berkarya dalam proyek besar, para seniman Lekra aktif menyelenggarakan pementasan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada 17 Agustus, sekatenan, ketoprak keliling, maupun pameran seni rupa. Seniman Bumi Tarung Yogyakarta, yang berafiliasi dengan Lekra, kerap berdiskusi tentang seni bertema buruh dan tani.

Seniman ketoprak di Yogyakarta, Bondan Nusantara, mengatakan kelompok ketoprak juga menggabungkan pertunjukan atau pementasan yang kritis dan progresif revolusioner. Kelompok ketoprak seperti Kriyadarmas pimpinan Cokrojadi mementaskan lakon yang diubah ceritanya sesuai dengan visi-misi organisasi. Misalnya lakon *Suminten Edan*, yang berakhir dengan cerita poligami. "PKI dan Lekra antipoligami, diubah ceritanya." Atau *Bandung Bondowoso*, yang bercerita tentang pembuatan seribu candi, diubah ceritanya menjadi kerja paksa yang menindas rakyat.

Karena ini adalah perjuangan, mereka tak berniat mengkomersialkan karya. Bahkan tak jarang mereka harus menyisihkan pendapatan buat membiayai kegiatan kesenian untuk rakyat. Para pemain dan a-

gota Badan Kontak Ketoprak Seluruh Indonesia rela menyisihkan penghasilan pribadi untuk organisasi, pembelian peralatan, jaringan, dan kegiatan lainnya. Tujuannya meningkatkan kualitas sehingga ketoprak menjadi ujung tombak visi-misi Lekra.

Untuk menghidupi bang atau ranting, mereka biasa mengandalkan donatur atau iuran anggota. Seperti di Cepu, Bondan Nusantara, tak kurang dari 100 seniman yang bermain di daerah itu rela menyumbangkan uang mereka dan rela tak dibayar oleh organisasi. ■

## Memahat relief

desain Sudjojono yang bertema *Manusia Indonesia*, Jakarta, 1957.





# TURBA MENCARI IDE

[ KREATIVITAS BISA  
MUNCUL DENGAN CARA  
HIDUP BERSAMA RAKYAT.  
BUKAN PERINTAH  
ORGANISASI. ]

**S**UATU hari pada 1963, sebuah perintah datang kepada Kusni Sulang. Pemimpin grup musik Merah Kesumba—yang rajin menghibur rakyat di sudut-sudut kampung di Yogyakarta—itu diminta segera datang ke kantor Lembaga Kebudayaan Rakyat Semarang.

Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju terminal bus yang saat itu berada di belakang Pasar Beringharjo—sekarang menjadi Taman Pintar dan pusat penjualan buku Shopping Centre.

Kusni ingat hari itu ia tidak memegang uang sepeser pun. Akhirnya ia menumpang truk pengangkut ayam. Ia sudah biasa *nebeng* seperti ini. "Aku memang banyak dibantu para sopir truk," kata Kusni seperti ia tulis dalam buku *Aku Telah Dikutuk Jadi Laut*.

Sesampai di Semarang, Kusni, saat itu 23 tahun, diperintahkan pergi ke Klaten. Ketika itu, di sejumlah desa di sana sedang berlangsung Gerakan Aksi Sepihak menuntut pelaksanaan perubahan sistem agraria dan bagi hasil. Tuntutan ini sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, yang sama-sama diterbitkan pemerintah pada 1960.

Namun sebenarnya bukan itu misi pokok Kusni ke Klaten. Keterlibatannya dalam Gerakan Aksi Sepihak akan menjadi bahan baginya untuk menulis drama tentang kaum tani. "Kemudian mementaskannya dengan pemain dari kaum tani sendiri," ujar Kusni, yang belakangan dikenal dengan nama Jean Jacques Kusni alias J.J. Kusni.



**Dokumentasi**  
perjalanan anggota  
Lekra melihat  
kemiskinan di Tanjung  
Priok, 1964.

Dia merasakan langsung gemuruh aksi sepihak bersama-sama dengan petani di sejumlah desa di Klaten, seperti Wedi, Kraguman, Jogonalan, dan Trucuk. Tidak berjarak dan langsung berada di tengah-tengah petani, Kusni bisa merasakan kekuatan kaum tani. "Klaten mulai saya rasakan sebagai kampung kedua," kata Kusni dalam buku *Di Tengah Pergolakan: Turba Lekra di Klaten*.

Kekuatan itu terlihat ketika pemimpin Gerakan Aksi Sepihak akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Klaten. Kusni menuliskannya: hari itu ribuan petani datang dari berbagai penjuru. Setiap 500 meter, polisi bersiaga dengan senjata otomatis Bren. Tapi itu tidak membuat nyali para petani ciut. Saat pemimpin gerakan Abdul Madjid diturunkan dari truk, para petani mengalunginya bunga. "Aku sendiri hadir di tengah-tengah kaum tani yang mengikuti sidang dari luar," tulis Kusni.

Pengalaman Kusni terlibat dalam Gerakan Aksi Sepihak di Klaten selama 1963-1964 itu menghasilkan drama yang berjudul *Api di Pematang*. Drama dua babak ini pernah dimuat di *Harian Rakjat*.

Dalam ulasan di *Harian Rakjat* edisi 13 September 1964, *Api di Pematang* disebut sebagai tafsir kenyataan



an terhadap petani Klaten yang menuntut penerapan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. Kusni kemudian dijuluki penyair kebangkitan petani oleh penyair dan pemimpin teras Lekra, H.R. Bandaharo.

*Api di Pematang* mengisahkan kehidupan gadis petani yang, karena keadaan, terpaksa bekerja sebagai pembantu di rumah seorang tuan tanah demi menghidupi keluarganya.

Drama ini telah dipentaskan di Klaten, Yogyakarta, dan Semarang serta di Jakarta dalam Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner, yang diselenggarakan PKI, 1964. Ketua Central Komite PKI D.N. Aidit menyaksikan pertunjukan drama ini dan terharu. "Dan drama itu mengabadikan suatu peristiwa revolusioner masa kini," kata Aidit seperti dikutip dalam ulasan *Harian Rakjat*.

Dalam tulisannya 26 tahun kemudian, Kusni mengatakan, bagi Lekra, sumber kreativitas dan ide adalah kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Turba atau turun ke bawah adalah cara untuk mempelajari kenyataan itu. Bagi dia, ide dan kreativitas tidak datang dari lamunan. "Seniman yang rajin tidak akan pernah kekeurangan ilham selama ia dekat dengan kehidupan," tulis Kusni.

Turba sebagai metode kerja dalam berkarya dipusatkan dalam Kongres Nasional Lekra I di Solo pada 1959. Ini dari Mukadimah Lekra yang menyebutkan: "mengandjurkan pemahaman yang tepat atas kenyataan didalam perkembangannya hari depannya" dan "untuk setjara dalam mempelajari kebenaran yang hakikihidupan, dan untuk bersikap setia kepada kenyataan dan kebenaran".

Metode turba kemudian dijabarkan dalam "tiga sama": bekerja bersama, makan bersama, dan tidur bersama. "Tidur bersama, ya, artinya tidur bersama warga yang dikunjungi. Makan bersama, ya, makan apa yang dimakan warga," ucap mantan Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah Hersri Setiawan.

Meskipun menjadi keputusan resmi organisasi, menurut Hersri, tidak ada ketentuan dari Lekra kapan dan berapa kali turba harus dijalankan. Kebijakan turba lebih banyak datang dari inisiatif tiap seniman dan kelompok seniman di daerah-daerah. Begitu pula biaya operasionalnya. "Waktu tergantung keadaan setempat. Tidak ditentukan setahun berapa kali. Tidak ketat," kata Hersri kepada *Tempo*.

Itu misalnya yang dilakukan para seniman yang tergabung dalam Pelukis Rakjat. Seusai hajatan Kongres Nasional Lekra I di Solo, mereka berinisiatif membentuk kelompok kecil berjumlah lima orang untuk mempraktekkan konsep turba dan menamai program mereka dengan "Operasi Gempa Langit".

Dalam buku *Lekra Tak Membakar Buku* disebutkan,



**Karya anggota Pelukis Rakjat,** di Yogyakarta, pertengahan 1950-an.

hingga Juni 1959, Pelukis Rakjat sudah melakukan tiga kali turba. Pertama dilakukan di sebuah desa di Gunungkidul. Yang kedua di Tambak Lorok, wasan pinggir pantai Kota Semarang. Dan yang ketiga di permukiman di muh Kota Semarang.

Turba menjadi semacam praktek kerja lapangan bagi para seniman Pelukis Rakjat. Saat turba ke Tambak Lorok, Hersri bersama seniman Pelukis Rakjat lainnya, seperti Martean Sagara, S. T. no, Wijayakusuma, H. no, dan Yohed Munir,

ikut larut dalam keramaian tengkulak berebut ikan. Hersri mengatakan agenda mereka sudah tersusun rapi. Siang mereka melukis atau membuat sketsa rahu nelayan. Malamnya mereka menonton pertunjukan teater yang dimainkan para nelayan. Sandiwanya itu menceritakan keluarga nelayan yang ditindas oleh tuan ikan, tuan tanah di kampung nelayan. Suami menggadai nasibnya, bersabung di tengah lautan; sementara istri dipaksa melayani nafsu tuan ikan.

Bukan hanya Pelukis Rakjat, sejumlah kelompok perupa lainnya, seperti Gempa Langit di Jawa Tengah, Bumi Tarung di Yogyakarta, Maris di Jawa Barat, dan Mawar Merah di Sumatera, menjadikan turba sebagai agenda yang terprogram.

Pada akhir 1950, Hersri "turba" ke Desa Saradug, tak jauh dari Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, sekarang. Ia bertujuan mendata dongeng rakyat yang masih dikenal di sana. "Desa ini sering dikaitkan dengan dongeng Bandung Bandawadjan dan Naga Bandung, tentang ular yang bertapa dan palanya ada di daerah Tuntang, Ambarawa, Kabupaten Semarang," ucapnya. Dari sana dia tahu dongeng asal-muasal lesung dan konser gamelan lesung.

Putu Oka Sukanta, aktivis Lekra asal Bali, juga melakukan turba. Sebagai sastrawan, dia berkeinginan membuat novel-novelnya dari kehidupan nyata di lapangan.

Dia pun pergi ke Tambak Lorok, Semarang; Batang, Batang; dan Bantul, Yogyakarta. "Tidak ada yang luar biasa, tapi saya jadi tahu detail apa yang terjadi di lapangan," ujar pria berambut putih ini.

Dia mengaku tak ada perintah untuk menulis sesuai keinginan organisasi atau partai.



# PRAVDA DI PINTU BESAR SELATAN

[ OPLAH *HARIAN RAKJAT* PERNAH MENCAPAI 100 RIBU EKSEMPLAR PADA 1958. PROPAGANDANYA MENIRU KORAN KOMUNIS RUSIA. ]

**P**ERJUMPAAN dengan Samosir, Pemimpin Umum *Harian Rakjat* (HR), di Paviliun Cidurian 19, Cikini, Jakarta, pada awal Juni 1963 itu mengubah nasib Amarzan Ismail Hamid. "Mak comblang" pertemuan itu adalah Oey Hay Djoen, pemilik paviliun tempat Amarzan tinggal. "Zan, ini Bung Samosir," Amarzan menirukan ucapan Oey—yang punya nama pena Samandjaja.

Pada pertemuan itu Samosir menawarkan Amarzan pekerjaan sebagai redaktur *Harian Rakjat* edisi Minggu, dikenal sebagai *HR Minggu*, dengan muatan kebudayaan. Tadinya, lembar kebudayaan *HR* terbit pada hari Sabtu, dengan judul *Kebudajaan*. Tak berpikir lama, Amarzan—ketika itu 22 tahun—langsung mengangguk meski tahu tujuannya ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. "Gila jika menolak, pada usia segitu ditawari jadi redaktur di media nasional," kata Amarzan di kediamannya di kawasan Bekasi, medio September lalu.

Jadilah Amarzan berkantor di Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 93, Jakarta Kota. Selama 15 tahun kantor itu menjadi markas *HR*. Tepat di seberangnya ada kantor lama harian *Kompas*. Bekas kantor *HR* itu kini ditempati PT Biru International, perusahaan kontraktor interior dan bahan bangunan.

Awalnya lantai dua kantor itu digunakan untuk percetakan. Tapi, pada akhir 1964, percetakan dipindahkan ke Jalan Pintu Air Raya 2, Jakarta Pusat, di seberang utara Masjid Istiqlal. Setelah tragedi 1965, percetakan itu disita tentara dan digunakan untuk mencetak harian *KAMI*.

Pada masa Orde Baru, bahkan hingga era reformasi, *HR* merupakan bacaan "tabu". Pada 2007, sejarawan Rhoma Dwi Aria Yuliantri menemukan *HR* di perpustakaan daerah Yogyakarta dengan cap "Bacaan Terlarang". Tumpukan koran itu dikerangkeng



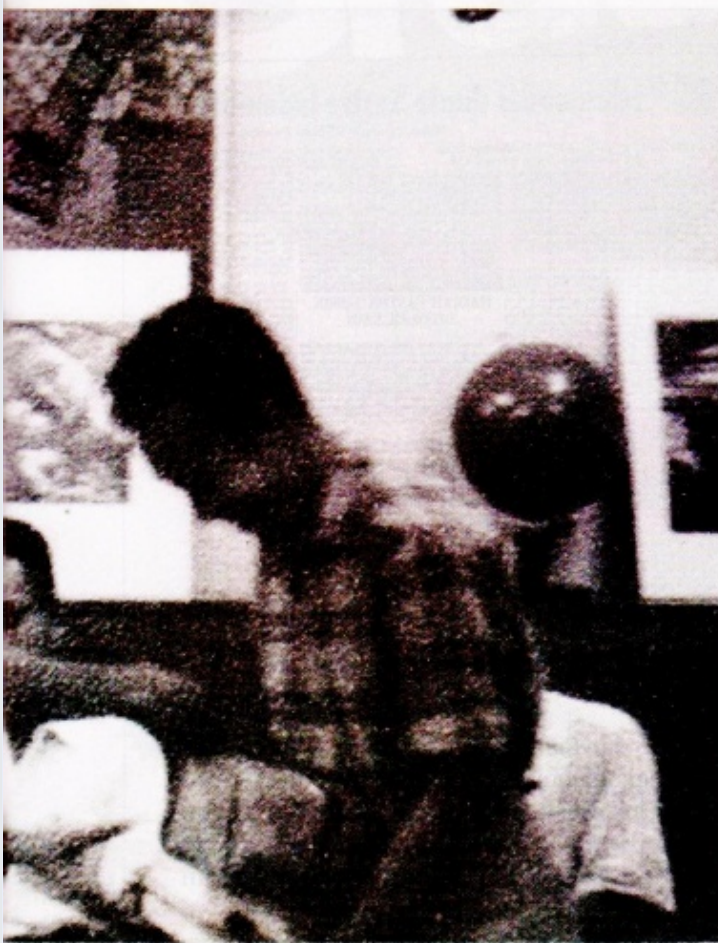
kotak besi seluas 1,5 meter persegi. "Tersimpan selama 30-an tahun dan dipenuhi rayap," kata Rhoma yang menelusuri 15 ribu artikel kebudayaan *HR*, mulai edisi April 1951 sampai Oktober 1965, untuk menulis buku *Lekra Tak Membakar Buku* (2008).

Gaya jurnalisme *HR* memang meledak-ledak dan tembak langsung. Tidak sungkan menyerang lawan dengan istilah: jambak, sikat, dan pukul. Gaya bahasa yang hemat, lincah, dan terus terang itu, menurut penyair Lekra Busjari Latif, sesuai dengan Marxisme dan Leninisme. Bahasa ini mudah dimengerti petani dan buruh yang menjadi basis massa PKI.

Menurut Rhoma, *HR* merupakan titisan koran-koran kiri pendahulunya: *Sinar Hindia*, *Api*, *Njala*, dan *Mawa*. Gaya bahasa koran-koran itu mewakili golongan kelas bawah yang tidak suka dengan bahasa intelektual yang kabur dan berbelit. Tapi, sebagai corong partai, *HR* tidak hanya memberitakan, tetapi juga menarik kesimpulan berita demi kepentingan PKI.

Harian setebal empat halaman ini memang organ resmi PKI. Terbit perdana pada 31 Januari 1951 dengan nama *Suara Rakjat*. Pendirinya Siauw Giok Tjhan wartawan majalah *Liberty* dan *Pemuda*. Menurut Rhoma, Njoto "mengakuisisi" *Suara Rakjat* karena ti-





**Njoto** memberikan kenang-kenangan kepada seorang pengarang muda Lekra, di kantor Lekra, Cidurian, awal 1960-an.

dak mempunyai surat izin pembelian kertas. Tjhan, yang saat itu Ketua Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, tidak menolak.

Ketika Tjhan digantikan Njoto, tampilan *HR* berubah dari 8 menjadi 9 kolom. Alasannya, agar berita lebih banyak. Muncul sejumlah rubrik baru: "tinjauan ekonomi", "editorial", "kritik dan saran", "kebudayaan", dan "berita daerah". Sejak 1954, di koran itu terdapat jargon "Untuk rakjat hanya ada satu harian, Harian Rakjat". "Jargon itu dibuat oleh Njoto," kata Rhoma.

Menurut Amarzan, oplah *HR* pernah mencapai 100 ribu eksemplar. Sedangkan di buku *Program dan Pelaksanaan* susunan Kementerian Penerangan 1958, oplah *HR* disebut 60 ribu. Jumlah itu wajar kalau mengingat anggota PKI yang terdaftar waktu itu mencapai 3,5 juta jiwa. Mereka, kata Rhoma, diharuskan berlangganan.

Jumlah wartawan *HR*, dalam ingatan Amarzan, mencapai 30-an orang. Asal bisa menulis dan bahasa Inggris sedikit, kata dia, sudah bisa jadi wartawan. "Yang tidak enak gajinya." Redaktur hanya dibayar Rp 525 sebulan, yang menurut dia hanya cukup untuk hidup tiga minggu. "Mobil pemimpin re-

daksi saja cuma Mazda Kotak, B600," kata Amarzan, yang merangkap anggota pleno Lembaga Pers Jurnalis Indonesia.

Sebagai Ketua Dewan Redaksi *HR*, Njoto dikenal derhana, terbuka, dan egaliter. Menurut Rhoma, amat percaya diri. Bahkan sampai meminta revisi lain tidak menyunting tulisannya. Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta ini mengakui tulisan Njoto memang bagus dan jarang salah.

Kendati hanya sepekan sekali *ngantor*, keberadaan Njoto sangat berpengaruh. Amarzan mengatakan pentolan Lekra itu menentukan *angle* berita. Menurut dia, bentuk propagandanya mirip Partai Gerakan Karya di masa Orde Baru. "Pokoknya PKI baik, pembela rakyat. Yang tidak membela rakyat adalah musuh PKI," kata Amarzan.

Propaganda ala *HR*, menurut sastrawan Taufiq, meniru *Pravda*—koran komunis Rusia. "Musuh ideologi mereka akan menyandang predikat kontrarevolusi. Itu juga yang dituduhkan ke Buya Hamka," kata Taufiq, yang ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Peternakan Universitas Indonesia di Bogor mengaku selalu membaca *HR*.

*HR* juga menjiplak *Pravda* dalam menitikberatkan kekuatan beritanya pada koresponden. Koresponden *HR*, kata Rhoma, tersebar di Moskow (Anwar Ma'mun), Peking (Soerjono), dan Amsterdam (J. Mornin). Belum lagi di tingkat lokal. Namun, menurut Amarzan, di redaksi *HR* Minggu tidak pernah ada intervensi. Disiplin ketat ada di *Lentera*, halaman kebudayaan di koran *Bintang Timur* (yang berafiliasi dengan Partai Indonesia) yang diasuh Pramoedya Ananta Toer yang juga merupakan anggota Lekra. Di *Lentera*, Amarzan, Pram memiliki barisan penulis muda yang loyal dan produktif.

Mulai 30 Juni 1963—sejak terbitnya *HR Minggu*, para seniman Lekra semakin leluasa memamerkan karyanya. Sebelumnya hanya ada *Lentera* dan *Jaman Baru*, yang dikelola orang-orang Lekra. Menurut catatan Rhoma, sejak terbit sampai 26 Januari 1964, *HR Minggu* telah menyiarkan 120 sajak, 21 puisi pendek, 15 reportase, 23 resensi, 10 esai, 15 buah drama, dan 26 cukilan kayu.

*Harian Rakjat*, yang berada di atas angin di kurun waktu 15 tahun, akhirnya bertekuk lutut pada 1965. Untuk keenam kalinya harian itu dibredel pada Sabtu, 2 Oktober 1965. Setelah dibredel, tiwa G-30-S, *HR* termasuk 46 surat kabar yang dirang rang terbit. Semua anggota *HR* yang berasal dari Lekra dan PKI diburu, ditangkap, dipenjarakan, atau "lenyap". Amarzan merasa beruntung bisa tetap hidup. "Pada mulanya tidak ada ketakutan, karena merasa saya tidak melakukan apa-apa," kata dia yang kini 72 tahun itu. ■



# LENTERA GALAK PRAM

**B**INTANG Timur boleh dibilang media yang paling gencar mendukung Nasakom. Kata-kata yang digunakan jauh lebih berani dan agitatif, kalau tidak bisa disebut kurang ajar, dibandingkan dengan *Harian Rakjat*—media resmi Partai Komunis Indonesia.

Pada 1962, *Lentera*, lahir. Pramoedya Ananta Toer didapat menjadi pengasuhnya. Isi *Lentera* sebagian besar tulisan budaya, ditambah sajak atau cerpen, dan kolom. Pram sendiri lebih banyak menulis tentang budaya dan sastra. Tapi kadang ia juga menulis kritik pedas terhadap sastrawan yang dipandang tidak memihak revolusi.

Lima tahun pertama, *Lentera* menjadi corong bagi tiga kegemparan dalam dunia sastra. Pertama dalam soal Hamka. Novel Hamka, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, dituding merupakan jiplakan dari novel bahasa Arab, *Magdalena*, karya Mustafa Lutfi al-Manfaluthi, yang ternyata terjemahan dari *Sous les Tilleuls* karangan Jean-Baptiste Alphonse Karr. Tuduhan ini pertama kali dilancarkan Abdullah S.P. melalui tulisannya, "Aku Mendakwa Hamka Plagiat".

Yang kedua adalah peristiwa penolakan hadiah majalah *Sastra* tahun 1962 oleh Virga Bellan, Motinggo Boesje, dan Poppy Hutagalung. Berita penolakan ditulis besar-besaran di *Lentera*. Dikatakan, "Hadiah Sastra-Jassin 1962 telah nodai dunia Sastra Indonesia."

Virga menyatakan menolak penghargaan karena sikap redaksi *Sastra* yang "kontrarevolusioner" lantaran menerbitkan naskah drama *Domba-domba Revolusi* karangan B. Soelarto.

Lalu, untuk lebih "memojokkan" H.B. Jassin, Lekra menu-runkan tulisan bersambung "Bagaimana Kisah Dikibarkannya Humanisme Universal, Menyingkap Satu Babak Gelap dalam Sejarah Sastra Indonesia" pada Mei 1963. Dalam tulisan tersebut, pembelaan Jassin terhadap humanisme universal dituding sebagai sebuah sikap pongah.

Benturan makin keras setelah Jassin dan beberapa seniman mendeklarasikan Manifes Kebudayaan pada 17 Agustus 1963. Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) pada awal 1964, yang diprakarsai Bokor Hutasuht, salah satu seniman penanda tangan Manifes Kebudayaan, jadi bulan-bu-



**Lentera** edisi 3 Maret 1963.

lanan *Lentera* dan *Bintang Timur*. Misalnya, nama konferensi disingkat menjadi KK-PSI untuk mengesankan pertemuan itu diselenggarakan oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI). *Bintang Timur* menuding pendukung "Manikebu" simpatisan Masyumi dan PSI, yang ketika itu merupakan partai terlarang.

Pada 15 Maret 1963, *Lentera* memuat pidato Pram dalam penutupan sidang pleno Pengurus Pusat Lekra di Palembang, 28 Februari, yang mencerca konferensi itu. Pram menggolongkan "manikebu" dengan tikus dan "tengku" (Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman) sebagai target untuk diganyang.

Setelah Manifes Kebudayaan dinyatakan terlarang, redaksi *Lentera* bersorak dan menurunkan tulisan "Matinya Nenek Manikebu dan Warisannya" pada 17 Mei 1964. Di sana ditulis, pelarangan "Manikebu" memungkinkan perguruan tinggi menjadi lembaga ilmiah pendidikan kader revolusi. "Sengaja kita garis bawahi kata ilmiah, karena setiap sarjana Manikebu sebenarnya bukan sarjana, bukan ilmiawan, karena Manikebuan itu sama sekali tidak ilmiah dan tidak pernah ilmiah."

Sehari sebelumnya, *Bintang Timur* menurunkan tulisan "Dasar Manikebu" tanpa nama penulis, bercerita tentang para pendukung Manifes Kebudayaan yang berusaha menyelamatkan diri. Salah satunya Bokor Hutasuht, yang disebut sebagai "barongsai manikebu yang galak".

Begini bunyi penggalan berita itu: "Idiiih, dasar Manikebuis. Lagaknya saja dalam *slagorde* Manikebu mau lancarkan 'pengaman'. Mempertahankan otaknya sendiri saja sudah tersingsal-singal, kompal-kampil!" ■

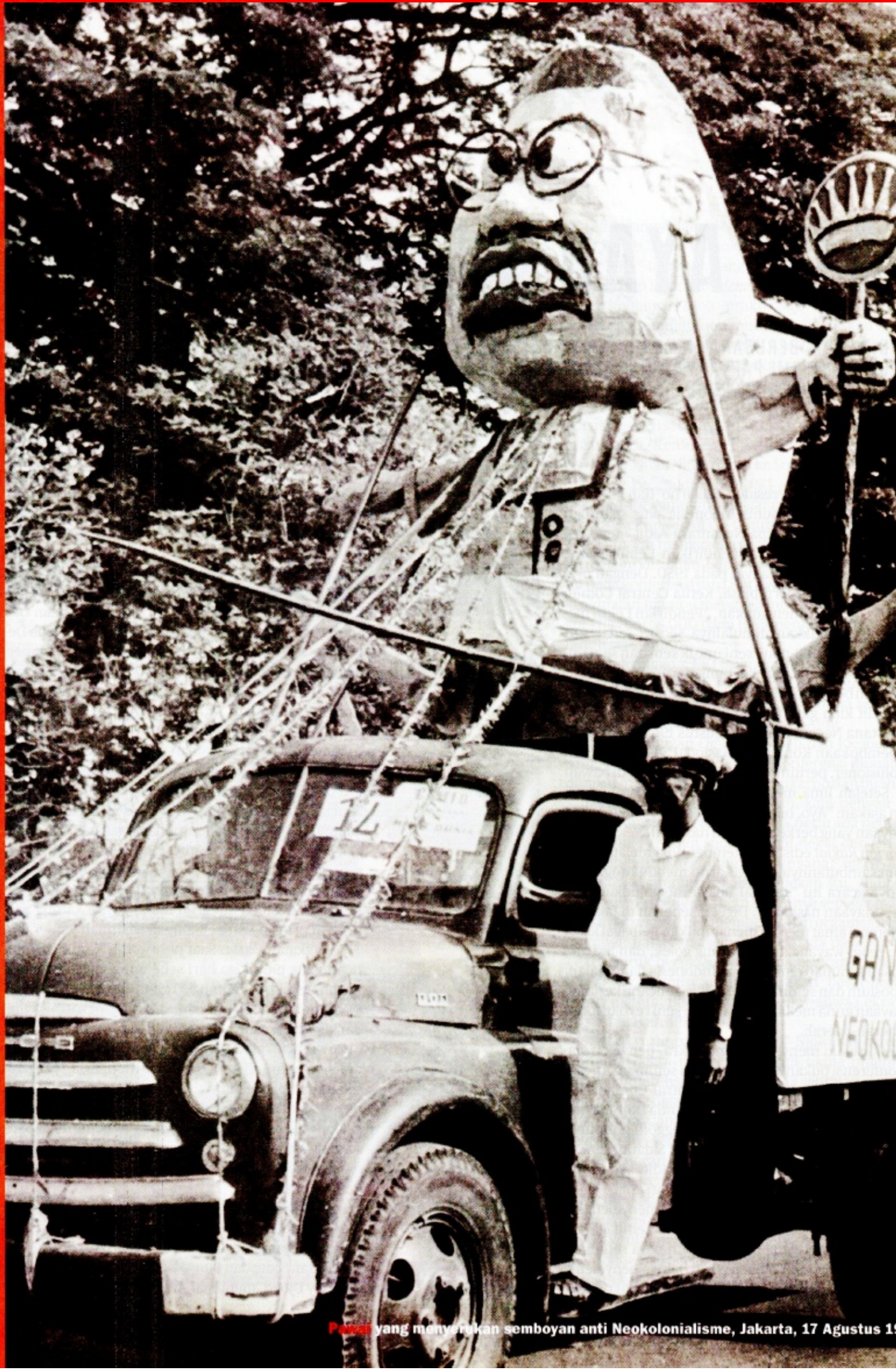


LIPUTAN KHUSUS

# SENIMAN KIRI VERSUS PKI

[ SULIT MENCARI KONEKSI LANGSUNG ANTARA LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT DAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. MESKI NJOTO DAN D.N. AIDIT PENDIRINYA, LEKRA BUKAN ORGANISASI RESMI AGITASI DAN PROPAGANDA PARTAI. GAYA HIDUP SENIMAN DI MARKAS CIDURIAN 19 DIKRITIK TERLALU BORJUIS. ]





Pawai yang menyebarkan semboyan anti Neokolonialisme, Jakarta, 17 Agustus 19



# SATU AYAH LAIN RUMAH

[ D.N AIDIT BERUSAHA MENARIK LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT MENJADI ORGAN RESMI PARTAI KOMUNIS INDONESIA. ALAT UNTUK MENDEKAT PADA KEKUASAAN SUKARNO. ]

**D**i depan Presiden Sukarno dan petinggi Partai Komunis Indonesia plus sejumlah seniman, Dipa Nusantara Aidit menegaskan alasannya mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat pada 1950. Dengan orasinya seperti biasa, Ketua Central Komite PKI itu mengatakan, "Pendirian Lekra menunjukkan dimulainya secara sadar PKI mengibarkan panji-panji seni untuk seni dan seni untuk revolusi seperti gagasan Bung Karno."

Hadirin bertempik-sorak, Presiden manggut-manggut. Aidit kian garang membacakan orasinya. Pidato di Istana Negara pada 27 Agustus 1964 itu menandai pembukaan Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner, perhimpunan seniman resmi di bawah PKI. Setelah lima menit, ia menutup pidatonya dengan ajakan: "Ayo, bersama Bung Karno kita bina kebudayaan yang berkepribadian nasional."

*Harian Rakjat* edisi 6 September 1964 melaporkan, dalam sambutannya, Bung Karno mendukung sepenuhnya acara itu "sebagai upaya mewujudkan kerja kebudayaan nasional". Digelar sepekan di Jakarta, Konferensi amat meriah menampilkan pelbagai kesenian: reog, wayang kulit, wayang golek, dan ludruk. Ratusan seniman dari seluruh Indonesia hadir dalam simposium dan seminar membahas rencana kerja kebudayaan guna meluaskan gagasan seni revolusioner ke daerah-daerah.

Meski selalu menyebut nama Lekra, penyelenggara Konferensi bukan organisasi para seniman ini, tapi oleh Departemen Kebudayaan Central Komite PKI. Departemen ini dipimpin penyair Banda Harahap alias H.R. Bandaharo yang menjabat anggota pimpinan Lekra. "Sebab, konfernas ini amanat Sidang Pleno II CC PKI pada Desember 1963," kata Aidit, seperti dimuat koran resmi partai itu di edisi yang sama.

Tak ada yang tahu persis alasan PKI menyelenggarakan acara ini, sementara sudah ada Lembaga Kebudayaan Rakyat yang menghimpun para seniman. Berulang-ulang Aidit menegaskan bahwa penyelenggara konferensi itu adalah PKI sebagai partai politik.

Belakangan diketahui, seperti pengakuan sejumlah pentolan Lekra yang aktif di partai, keputusan mengedepankan nama PKI dalam konferensi bukan tanpa alasan.

Pada 2005, terbit buku karangan Antariksa berjudul *Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa Lekra 1950-1965*, yang memuat wawancara dengan Oey Hay Djoen. Oey adalah pentolan Lekra dan Ketua Dewan Pakar Ekonomi PKI. Ketika menulis atau merevisi novel-novel Rusia atau *Das Kapital*, ia memakai nama samara Samandjaja atau Ira Iraman. Rumahnya di Jalan Cidurian 19, Jakarta Pusat, menjadi Sekretariat Pusat Lekra.

Menurut Oey, pernyataan Aidit dan niatnya menggelar konferensi tak lain untuk menegaskan bahwa PKI didukung para seniman. "Juga untuk menguji apakah para seniman Lekra berada di belakang PKI atau tidak," katanya. Karena itu, semua pidato menyerukan penggantian seni Manifes Kebudayaan, yang berlawanan dengan haluan dalam memandang kesenian.

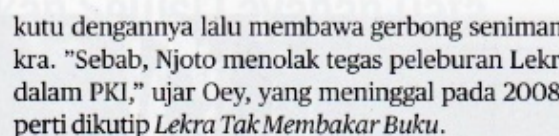
Tahun 1964 merupakan tahun genting, ketika kekuasaan Presiden Sukarno mulai goyah karena perbedaan prinsip dan persaingan sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat. Saat peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 1964, tiga hari sebelum konferensi, Bung Karno berpidato tentang "Tahun Vivere Pericolo" ("Tahun-tahun Genting"), yang disingkat "Tahun dan dianggap sabda "Pemimpin Besar Revolusi".

Goyahnya kekuasaan Presiden tak didukung politiknya sendiri, Partai Nasional Indonesia, yang sebelumnya mulai lembek. Dalam konteks itulah Aidit menggelar konferensi. Ia tak terang-terangan menentang PKI, tapi memberi sinyal bahwa PKI layak untuk menyelenggarakan konferensi para seniman itu karena perseteruan diam-diamnya dengan Njoto—pendiri Lekra yang menjadi Wakil Ketua Central Komite PKI.

Di Lekra, Njoto amat disegani karena kemampuan orasi dan pengetahuannya yang luas tentang kesenian. Ia juga menjadi konseptor dan penulis pidato Presiden. Kedekatan Njoto dan Bung Karno inilah yang, menurut Oey Hay Djoen, membuat Aidit cemas Presiden ber-

**Presiden Sukarno**  
pada perayaan ulang tahun ke-45 Partai Komunis Indonesia di Stadion Utama Senayan, Jakarta, 23 Mei 1965.





Pertimbangan Njoto praktis saja: di Lekra belum ada seniman nonkomunis yang bukan anggota partai, seperti Pramoedya Ananta Toer dan U. T. Tatang Sontani. Membuat Lekra menjadi organ resmi partai hanya akan mendorong seniman-seniman terkenal dan berpengaruh itu hengkang. Karena itu, menurut Joesoef Isak—anggota Lekra pemilik penerbit Hasta Mitra—Konferensi dibuat Adit "sebagai barometer kalau-kalau Njoto hijrah ke Sukarno".

Dalam kacamata Aidit, PKI membutuhkan organisasi resmi seniman sebagai motor pendulang. Dan Lekra, selama 14 tahun setelah didirikan, bukti ampuh menggaet anggota dan simpatisan melalui kesenian. Seperti tercatat dalam pidato di pada konferensi itu, Lekra yang merambah hampir semua kecamatan mampu menggelembungkan jumlah anggota PKI dari 8.000 pada 1955 menjadi 3 juta sepuluh tahun kemudian.

Jumlah anggota PKI itu menjadikan partai ini sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia dan Cina. "Satu dari tiga orang Indonesia sekurang-kurangnya simpatisan partai," kata Aidit.

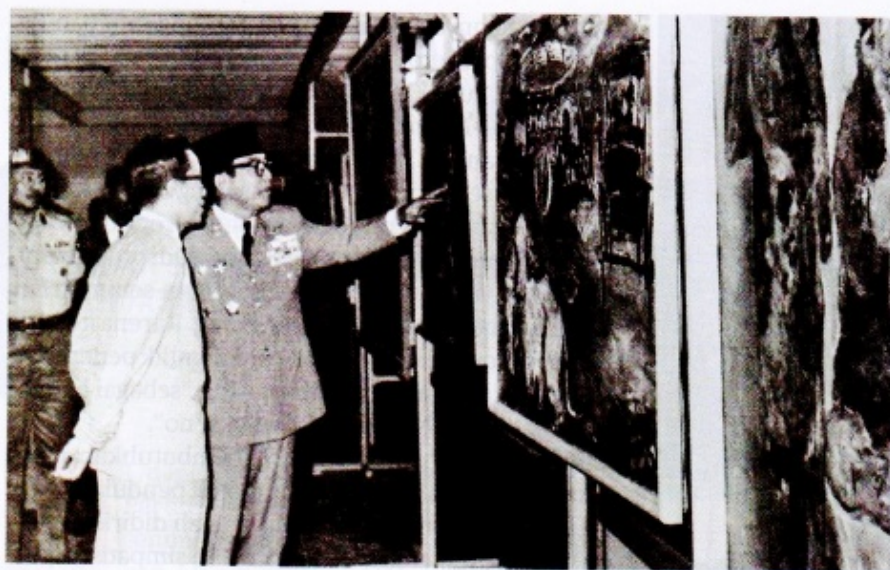
Berbeda dengan Oey Djoen dan Joesoef I Amarnas Ismail Hamid sangsi konferensi dibuat dipakai Aidit untuk mendekati Sukarno dan buah saingannya dengan Njoto. Sebab, kata penyair Medan yang kini 72 tahun itu, tak perlu ada persaingan karena Presiden sudah sangat dekat dengan "Terlalu jauh jika dihubungkan ke sana," ujarnya

Dalam konferensi selama sepekan itu, Aidit berulang-ulang mengingatkan perannya sebagai perantara Lekra dan alasan PKI membutuhkan organisasi ini untuk memberi panggung seluasnya kepada para seniman Lekra untuk berpidato ataupun berbicara dalam forum publik. Konferensi diselenggarakan besar-besaran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Lekra ada di belakang PKI.

Seperti turut pada "komando" Njoto, tak satu seniman Lekra menyebut-nyebut nama organisasinya di konferensi itu. Sebanyak 13 seniman dari bidang yang digarap lembaga ini—seni rupa, film, teater, drama, dan musik—tak menyebut kehadiran rekta di sana sebagai utusan perhimpunan. Dalam laporan-laporan tentang Konferensi, *Harian Rakjat* hanya sekali menyebut Lekra. "Kami datang sebagai pribadi," kata Sutikno W.S., penyair 74 tahun dari Pacitan, Jawa Tengah.

Agak sulit mencari bukti bahwa Lekra organ resmi PKI. Joebaar Ajoeb, Sekretaris Umum Lekra yang pertama, dalam *Mocopat Kebudayaan* yang diterbitkan





#### Presiden Sukarno dan Njoto

mengunjungi pameran lukisan Lekra di Gedung Pertemuan Umum, Jakarta, Agustus 1963.

terbatas pada 1990, menegaskan bahwa organisasi ini bersifat terbuka. Anggotanya bisa siapa saja, bukan hanya seniman yang aktif di partai, bahkan yang tak mendukung komunisme. Kewajiban anggotanya hanya satu: aktif di salah satu lembaga seni Lekra. Dua pendirinya, A.S. Dharta dan M.S. Ashar, bukan seniman komunis.

Sementara PKI memiliki kongres, Lekra juga menggelar kongres dan punya anggaran dasar sendiri dengan menegaskan tak ada kaitan formal dengan PKI. Kongres pertama Lekra, di Taman Sriwedari Solo pada 27 Januari 1959, melahirkan pelbagai konsep kerja kebudayaan, seperti asas "Politik sebagai Panglima", "meluas dan meninggi", juga metode 1-5-1 dan kewajiban para seniman turun ke bawah menyerap hidup rakyat sebagai sumber penciptaan.

Satu-satunya kongres Lekra itu digelar amat meriah. Selama dua pekan perhelatan dengan pameran lukisan, tari, dan pelbagai macam kesenian rakyat, acara itu dihadiri 17 ribu pengunjung setiap malam. Bukan hanya seniman daerah, perwakilan organisasi kesenian negeri-negeri komunis juga hadir. Presiden Sukarno bahkan menari bersama para seniman dan menyanyikan lagu *Suwe Ora Jamu*, *Potong Bebek Angsa*, dan *Manise-manise* di malam pembukaan.

Popularitas Lekra yang luas itu membuat Aidit tertarik melegalkannya di bawah partai. Karena itu, Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner digelar semeriah Kongres Lekra itu. Dalam resolusi di akhir perhelatan, Aidit merumuskan bahwa "seni dan sastra revolusioner harus mengakui dan menaati pimpinan Partai". Inilah pembeda utama Konferensi dengan Lekra. Konsep lain sama persis, kecuali prinsip realisme sosialis yang diganti Aidit menjadi realisme revolusioner.

Masalah menjadi pelik karena anggota Konferensi

juga seniman-seniman yang aktif di Lekra. Utuy tang Sontani, dramawan Lekra yang eksil dan meninggal di Rusia pada 1979, terang-terangan melangkah PKI membentuk Konferensi. "Sebagai orang nonkomunis, dengan jujur saya akui hanya yang menjadikan seni dan sastra sebagai alat perjuangan politik," ujarnya seperti dikutip *Harian Rakjat* edisi 29 Agustus 1965.

Karena itu, agak sulit menyebut Lekra sebagai *derbouw* PKI. "Tapi juga salah jika menyebut Lekra tak punya hubungan sama sekali dengan PKI," ujar Amarzan, kini redaktur senior *Tempo*.

Lekra di daerah lebih cair. Sutikno W.S. tak pernah mendaftar menjadi anggota kendati aktif di cabang Purwokerto. "Di sini pemimpin Lekra malah orang PNI," ujarnya. Sejak menjadi kontributor koran *Tempo*—harian yang terbit di Semarang—hingga bekas di *Harian Rakjat* di Jakarta, Sutikno tak mengantongi kartu anggota Lekra.

Meski begitu, seniman-seniman yang aktif di Lekra mendapat posisi penting di *Harian Rakjat* berkat Njoto, yang memimpin redaksinya. Karena PKI pula banyak seniman dan wartawan yang berangkat ke negeri-negeri menghadiri konferensi, bahkan melanjutkan studi di negeri-negeri komunis, seperti Rusia, Cina, dan Cekoslovakia.

Seniman Manifes Kebudayaan pun menganggap Lekra sama dengan PKI. "Banyak buktinya di buku *Manifes Kebudayaan*," kata Taufiq Ismail, penyair yang beresma D.S. Moeljanto menyusun buku yang merekam ruk-pikuk perseteruan Manikebu-Lekra itu. Sedang Sapardi Djoko Damono menunjuk antologi *Kepada Partai* yang dibuat Lekra untuk PKI.

Sapardi ikut menekan Manifes pada 1963, ketika mahasiswa tingkat akhir Jurusan Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut penyair *Hujan Bulan Juni* ini, kumpulan puisi itu bukti Lekra di bawah PKI. "Tuduhan itu sah," ujar Amarzan. Antologi yang berisi 14 puisi dari 12 penyair itu, kata Amarzan, memang dibuat sebagai kado ulang tahun ke-45 PKI pada 23 Mei 1965. Amarzan menyumbangkan satu puisi berjudul "Memilih Jalan".

Namun seniman-seniman lain menampik perhubungan itu. Soalnya, penghubungan itu mengandung konsekuensi gawat: seniman Lekra disamakan dengan aktivis dan petinggi partai, yang dipakai Presiden Soeharto untuk menumpas PKI hingga akhirnya. Barangkali lebih tepat memakai rumus Aidit yang menyebut Lekra dan PKI "satu ayah lain rumah yang berhimpun dalam keluarga komunis".

"Sebab, tak satu pun yang berhasil mem-PKI-kan Lekra kecuali Soeharto. Bahkan Aidit tak bisa," kata Prati Oka Sukanta, seniman Lekra dari Bali, yang menyumbangkan satu puisi untuk antologi *Kepada Partai*. ■



# HIKAYAT SEKRETARIAT PUSAT

RUMAH CIDURIAN 19 MENJADI JANTUNG KEGIATAN SENIMAN LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT. PAMER LUKISAN HINGGA PACARAN.

**H**ARI itu, 27 September 1965, rumah Oey Hay Djoen di Jalan Cidurian 19, Cikini, Jakarta Pusat, ramai karena ada rapat Fraksi Partai Komunis Indonesia. Padahal sehari-hari rumah jembar itu menjadi markas para seniman yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat.

Sastrawan Hersri Setiawan ingat ketika itu ia bertanya kepada penyair senior Lekra, H.R. Bandaharo, yang keluar dari rumah, soal apa yang dibahas dalam rapat itu. "Ia menjawab agar saya jangan ke sini lagi. Sebab, nanti tidak akan ada orang di sini," kata Hersri mengenang peristiwa itu dua pekan lalu.

Tak puas dengan jawaban itu, Hersri mendesak. Tapi tak ada jawaban lain dari anggota pimpinan pusat Lekra itu. "Saya menangkap gelagat tak enak," kata Hersri. Soalnya, ia lihat Bandaharo membawa bungkusan berisi peralatan mandi dan sarung yang ia pakai jika menginap di sana. Belum terjawab keheranan Hersri, rapat di dalam rumah bubar.

Hersri baru menyimpulkan belakangan apa yang dikatakan Bandaharo: tiga hari kemudian Gerakan 30 September pecah dan rumah Cidurian 19 tak ada lagi pengunjungnya. Kekuasaan Orde Baru memburu mereka yang dianggap tersangkut dengan PKI.

\*\*\*

MENGENANG rumah Jalan Cidurian 19, Putu Oka Sukanta berulang-ulang melukiskannya dengan satu kata: asyik. Meski menjadi Sekretariat Pusat Lekra, kata sastrawan asal Bali ini, suasana tidak seperti kantor. "Sangat romantis," katanya, "pacaran adalah salah satu agenda kami."

Di bedeng kayu bekas peti kemas yang dibangun di halaman belakang rumah Oey Hay Djoen—anggota pimpinan pusat Lekra yang menjabat anggota Dewan



Jane Luyke

Konstituante dan berlanjut ke DPR Gotong Royong dari PKI—itu suasana berkesenian terasa kental. Menurut Putu, kini 74 tahun, setiap hari pasti ada kesibukan latihan kesenian. Ada seniman yang melukis, diskusi sastra, menulis sajak, hingga memainkan musik.

"Tapi yang paling asyik kalau ada penari Zus Duriani yang mengajar tari serampang dua belas. Menurut Durinya cantik-cantik," ucap Putu. Duriani adalah panggilan Doroteha Lontoh, istri Profesor Bakri Siregar, salah satu pentolan Lekra. Seusai belajar menari, para seniman muda seperti Putu mengajak mengobrol mereka lalu mengantar pulang.

Putu Oka bertandang pertama kali ke Jalan Cidurian pada 1963, lima tahun setelah resmi menjadi Sekretariat Lekra. Putu masih ingat bagaimana denting piano yang dibunyikan pianis M. Karetum, musik Lekra, mengalun, yang kemudian dia iringi dengan pembacaan sajak ciptaan Putu. Perpaduan sajak Putu dan komposisi Karetum kemudian berbuah dua lagu semi seriusa terpopuler kala itu, *Di Kaki-kaki Tangkuban Perahu* dan *Bunga Merah*. *Tangkuban Perahu* menjadi lagu wajib Lomba Menyanyi di RRI.

Tiap Selasa di sana ada Forum Selasaan yang berdiskusi serius soal sastra. Tak jarang sesama seniman saling menghina tulisan. Tapi begitu waktu tidur, semua berebut kasur. "Yang kalah tidur di meja," kata Putu.

Perupa Amrus Natsalya, pendiri sanggar Bumi Tarung Yogyakarta, juga memiliki kemesraan yang sama kepada Cidurian 19. Dua pekan lalu ia bercerita tentang kenangannya di rumahnya di Sukabumi. Waktu itu Amrus mengunjungi Sekretariat Lekra dua bulan sekali. Cidurian ia jadikan pameran lukisan. "Yang paling menyenangkan saat diskusi buku," kata Amrus, yang kini 80 tahun.

Menurut Amrus, koleksi perpustakaan Cidurian melimpah. Amrus amat terkesan oleh koleksi buku dari Tiongkok yang mengoreksi komunisme Moskow, begitu juga sebaliknya. "Setelah membaca kami saling debat," katanya.

Tapi, gara-gara suka mengajak debat pula, Amrus kurang disukai di Cidurian 19. "Padahal saya ingin meminta masukan penerapan konsep 1-5-1 dalam berkarya," katanya.





Selain para seniman top masa itu, ke rumah Cidurian 19 kerap bersambang Njoto dan Dipa Nusantara Aidit, dua pemimpin PKI. Keduanya memang pendiri Lekra, selain M.S. Ashar dan A.S. Dharta, yang memang penyair. Pramoedya Ananta Toer dan Utuy Tatang Sontani juga kerap terlihat di sana, meski keduanya bukan seniman komunis. "Pokoknya berkumpul di situ keren," kata Amarzan Ismail Hamid, penyair yang kini menjadi Redaktur Senior *Tempo*.

Saat itu, Amarzan mendamparkan diri di Cidurian lantaran ingin kuliah di Universitas Indonesia, tapi gagal karena keburu bekerja di media resmi PKI pimpinan Njoto, Wakil Ketua II CC PKI, *Harian Rakjat Minggu*. "Bayangkan saja pelukis Basuki Resobowo. Dia orang yang dibuatkan puisi khusus oleh Chairil Anwar. Berada satu tempat bersama mereka rasanya seperti mimpi dahsyat," ujar Amarzan.

Menurut Amarzan, selain banyak aktivitas yang sifatnya bersenang-senang dalam berkesenian, Lekra kerap melakukan diskusi sastra yang serius dan formal. Sebut saja, kata dia, dalam film *Cidurian 19*, ketika sanggar Lekra di Cidurian kedatangan penulis Willi Bredel, yang dijuluki Ernest Hemingway dari Jerman Timur. Saat itu, diskusi berlangsung khidmat

#### Seniman Lekra

berpose di teras kantor Sekretariat Lekra, Jalan Cidurian 19, Jakarta.

yang dipandu Pramoedya Ananta Toer.

"Ada juga kegiatan Sekolah Lekra Pusat dan Sekolah Akting Kotot Sugardi yang serius tapi tetap santai dan menyenangkan," katanya.

Bagi lelaki yang lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 1941, itu letak Cidurian sangat strategis. Mudah untuk mencapai kantor *Harian Rakjat* di Jalan Pintu Besar di kawasan Harmoni sekaligus dekat ke Pasar Senen, pusat belanja dan hiburan di tahun 1960-an. "Ke Pasar Senen tinggal jalan kaki agar bisa mampir pijat di pinggir jalan," kata Amarzan.

Cidurian juga termasuk kawasan elite. Tentang rumah keluarga Oey Hay Djoen bukan sembarangan orang. Di seberang depan adalah rumah Jenderal Achmad Tirtosudiro, yang setelah peristiwa Gerakan 30 September menjabat Kepala Badan Urusan Logistik pertama Indonesia. Selang satu rumah dari situ ada rumah Ratna Sari Dewi Sukarno, salah satu istri Presiden Sukarno.

Saat Dewi pindah ke Wisma Yaso, rumah yang dulu menempati di Jalan Cidurian diubah fungsi menjadi asrama perwira Resimen Tjakrabirawa. Letnan Kolonel Untung Sutopo bin Syamsuri—pemimpin Gerakan 30 September—adalah kepala rumah tangganya. "Sa-



ditangkap, saya pernah diinterogasi soal Untung, tapi saya memang tak tahu apa-apa," ujar Amarzan.

Jane Luyke, istri Oey Hay Djoen, adalah saksi sejarah bagaimana Lekra berkembang di Jalan Cidurian 19. Berkat Jane pula Lekra bisa menempati rumah di bilangan mentereng itu. Rumah dengan luas tanah 1.000 meter persegi milik Oey dan Jane tersebut dibeli setelah mereka mengontraknya beberapa saat sesudah pindah dari Semarang pada 1957.

Jane tak ingat berapa harga rumah yang dibelinya. Yang jelas, suaminya pernah meminta izin untuk memakai rumah bagi kegiatan Lekra. "Bagi suami saya, kepala juga ia berikan kalau diminta organisasi. Jadi, tak banyak pilihan, saya izinkan," kata perempuan 78 tahun itu kepada *Tempo*.

Menurut Jane, yang datang ke sanggar bukan hanya anggota Lekra. Banyak pula orang yang bukan anggota Lekra *nongkrong* dan bergaul di sana. Bahkan beberapa nama yang sudah tenar, semacam aktris Fifi Young, sering muncul dan bergaul. Namun, di balik keterbukaan pergaulan, ada peraturan yang diterapkan dengan keras oleh Oey Hay Djoen. "Setiap yang datang harus membawa referensi dari orang yang sudah dipercaya tinggal di Cidurian. Kalau tidak, tak bisa masuk," ujarnya.

Kemajemukan individu yang berinteraksi di dalam lingkungan Cidurian 19, menurut Jane, menerangkan secara eksplisit bahwa sebenarnya Lekra tak memilih bersanding dengan PKI. "Jadi saya termasuk orang yang menolak kalau komunitas Cidurian diidentikkan dengan PKI, apalagi disebut *onderbouw*," katanya.

Jane membenarkan kabar bahwa ada orang-orang PKI di Cidurian. Suami Jane, Oey Hay Djoen; Njoto; dan beberapa pendiri Lekra adalah orang PKI. Namun, dalam berkesenian ataupun kehidupan organisasi, menurut dia, "Cidurian tak pernah bergantung pada PKI."

Akibat pergaulan yang terlalu terbuka, sastrawan Hersri Setiawan, yang menjabat Sekretaris Umum Lekra Cabang Jawa Tengah, sempat heran. Seusai perjalanan dari Kolombo, Sri Lanka, untuk mewakili Indonesia dalam organisasi Persatuan Pengarang Asia-Afrika pada 24 Agustus 1965, ia merasa banyak terjadi pergeseran gaya hidup Cidurian menjelang akhir masa jayanya. "Tiba-tiba banyak anak muda bersepatu mengkilap. Kalau memakai jas, kata Basuki Resobowo, sudah borjuis," ujar Hersri, yang mengaku rutin sebulan sekali bertandang ke Sekretariat Pusat.

Hersri menduga pergeseran gaya hidup komunitas Cidurian terpengaruh lantaran makin mesranya sebagian dari mereka dengan kekuasaan Sukarno sehingga banyak yang mengerjakan karya pesanan. Be-



#### Gedung Tri Dharma

**Widya**, bekas kantor Lekra, di Jalan Cidurian 19, Cikini, Jakarta Pusat.

**Sutarni**, Istri Njoto, saat menjamu tamu dan seniman Lekra di kantor Lekra di Cidurian 19, Jakarta, awal 1960-an (kanan).

berapa seniman menganggap mengerjakan pesanan bukan masalah dalam kesenian.

Menurut Hersri, para seniman Cidurian 19 sa-  
dekat dengan kalangan Istana. Yang membuat ce-  
justru kedekatan itu berbuah tuding dari lawa-  
wan politik PKI. Dewan Jenderal bahkan sudah m-  
umumkan Lekra sebagai organ PKI.

Menjelang akhir September 1965, Hersri tak m-  
sakan lagi kemesraan saat berkumpul di depan ko-  
ikan di Cidurian seperti sebelumnya. Ia merasa  
asing. Sebagian orang waktu itu bergegas, sibuk  
ngan dandanan necis dan sepatu mereka yang be-  
lat-kilat. Sebagian lain tampak larut dalam keteg-  
an, entah karena apa.

Ketegangan itu berpuncak pada 27 Septem-  
ber 1965 itu, ketika markas Lekra tersebut menjadi t-  
pat rapat Fraksi PKI. Itu hari terakhir rumah Oey  
Djoen tersebut ramai oleh hilir-mudik seniman. S-  
lah itu suwung.

Amrus Natalasya pernah datang ke sana sekitar 2  
tober 1965, persis setelah Gerakan 30 September  
letus dan PKI dituding sebagai dalang di balik p-  
bunuhan tujuh jenderal. Amrus mampir ingin me-  
ri tahu apa yang terjadi sebenarnya pada malam  
ror itu.

Di rumah itu Amrus hanya bersirobok dengan  
orang anggota staf Sekretariat. Amrus lupa na-  
orang yang ia temui itu. Bersama orang itu Amrus  
duk di beranda mengobrolkan kejadian dan suas-  
genting ini. Tiba-tiba sebuah truk tentara lewat.

Para serdadu turun dan merangsek masuk h-  
man Cidurian sambil menodongkan senjata ke a-  
wajah mereka berdua. Serdadu lain memeriksa se-  
jengkal rumah dan menyita barang yang ada.  
hari terakhir saya ke Cidurian," katanya.

Sejak itu, Cidurian hanya tinggal nama yang  
lekat dalam ingatan para seniman Lekra yang  
sisa. ■



# KEPUL ASAP DAPUR MBOK IYEM

"Ada masakan apa hari ini, Mbok?"

**P**ERTANYAAN itu terlontar sering sekali. Tak peduli pagi, siang, atau petang merembang. Bukan hanya dari satu-dua orang, melainkan dari semua yang mampir dan melongok ke dalam dapur rumah di Jalan Cidurian 19, bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada awal 1960-an.

"Mbok Iyem itu pembantu saya sejak gadis. Dia sering kesal pada pertanyaan itu," kata Jane Luyke, perempuan manis pemilik rumah yang menjadi Sekretariat Pusat Lembaga

kerap berkumpul di rumah novelis M.S. Ashar di Jalan Dr Wahidin Nomor 10, Jakarta. "Tanpa banyak alasan, saya setuju."

Sejak itu, rumah Oey gegap-gempita. Setiap hari tak pernah sepi. Tetamu mengalir. Konsekuensinya, rumah tak boleh kekurangan makanan. "Waktu itu keuangan kami kewalahan juga," kata Jane. Karena itu ia tak membedakan mana makanan untuk tamu mana makanan untuk keluarganya. Semua mengambil dari piring yang sama.

Awalnya kegiatan para seniman bercampur baur di dalam rumah. Setelah berjalan setahun, Jane meminta Oey memindahkan segala kegiatan itu ke belakang rumah dan membuat bangunan khusus.

Sebuah paviliun didirikan dengan kayu bekas peti kemas yang diambil dari Kedutaan Polandia. Para seniman pun pindah *nongkrong* ke sana. Anggaran untuk makan-minum pun bisa diatur lebih rapi. Jane tak lagi kerpotan karena lambat-laun Lekra punya anggaran sendiri yang berasal dari patungan para seniman.

Keluarga Oey Hay Djoen tinggal di Cidurian hanya sampai 1963. Mereka lalu pindah ke Rawamangun, seiring dengan kesehatan Jane yang kadang menurun. Taman Kanak-kanak Melati yang didirikan Jane ikut ditutup.

Rupanya, kepulan asap dapur Cidurian 19 juga membangkitkan kenangan sastrawan Lekra, Putu Oka Sukanta, 74 tahun. Ia ingat menu nasi jagung yang sering didapati kala menginap di sana. Menu sedikit berubah kalau ada beberapa kawan mendapat proyek kesenian. "Kalau ada uang, baru semua orang mendadak saling traktir," katanya.

Menurut Putu, Lekra menghidupi organisasinya sendiri. Selain dari sumbangan senior, para seniman menyisihkan honor untuk dapur Cidurian. Ada semacam daftar tak tertulis soal siapa saja yang bisa makan dan hidup di sana. "Harus ada rekomendasi dari yang sudah bergaul lama di dalamnya," ucap penyair asal Bali ini.

Amrus Natsya, perupa Lekra yang juga pendiri sanggar Bumi Tarung Yogyakarta, mengibaratkan rumah Cidurian semacam surga kala ia bertandang ke Jakarta. "Kalau lapar dan tak punya uang, mampirnya pasti ke Cidurian," katanya.

Lekra dibubarkan lewat Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Sejak saat itu, rumah Cidurian 19 dijadikan asrama militer. Beberapa keluarga sempat tinggal di situ sebelum rumah tersebut dijual dengan harga sangat murah.

Medio 1990, bangunan yang berada di pojok Jalan Cidurian dan Cimandiri itu dijual kepada orang lain. Kini berdiri di atasnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya.

"Saya masih ingat kepul asap dan sibuknya dapur Mbok Iyem," kata Mado, putri pasangan Oey Hay Djoen dan Jane Luyke, tentang rumahnya di Cidurian 19.



ga Kebudayaan Rakyat dua pekan lalu.

Mereka yang datang adalah para seniman yang tinggal di Jakarta dan yang mampir dari daerah. Menurut Jane, kini 78 tahun, Surtiyem selalu masak setiap hari untuk menjamu para seniman yang pergi satu datang seribu.

Tentang rumah itu, Jane mengenangnya sebagai istana keluarga yang istimewa. Bersama suaminya, Oey Hay Djoen, yang menjabat Ketua Dewan Pakar Ekonomi Partai Komunis Indonesia, ia membeli rumah seluas seribu meter persegi itu setelah mengontraknya. Transaksinya persis setelah anak kedua mereka lahir pada 1956. Oey pengusaha asal Semarang yang hijrah ke Jakarta.

Jane mengenang, suaminya meminta ia bersetuju rumah mereka dijadikan markas Lekra. Sebelumnya, para seniman



# DI BUMI SENIMAN PETARUNG

**[** DIDIRIKAN SEKELOMPOK PERUPA MUDA YANG SECARA SUKARELA MENJADI ORGAN DI BAWAH LEKRA. BANGGA DICAP RADIKAL. **]**



**R**UMAH bercat putih itu berdiri tepat di pojok Jalan Amri Yahya, Gampingan, Yogyakarta. Letaknya berseberangan dengan gedung Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), yang kini menjadi gedung Jogja National Museum. Halamannya rindang dikelilingi pagar tanaman bambu.

Di atas lahan bangunan itu dulu pernah berdiri Sanggar Bumi Tarung, sanggar seni rupa Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang diberangus pemerintah Orde Baru pada 1965. "Sanggar dibangun dari bekas tolong pembakaran gamping yang kami renovasi," kata Amrus Natalsya, pendiri dan mantan Ketua Sanggar Bumi Tarung, dua pekan lalu.

Amrus kini tinggal di Lido, Sukabumi. Perupa kela-

**Gedung dtA**, dulu lokasi Sanggar Bumi Tarung.

hiran Medan, 21 Oktober 1933, itu masih tampak semangat. Ratusan karyanya, dari patung, lukisan vas, hingga lukisan kayu, memenuhi rumah empat lantai yang sekaligus dijadikan galeri itu. Di dinding, peran teras bersandar dua lukisan setengah jadi ukuran 1,5 x 5 meter.

Amrus mendirikan sanggar Bumi Tarung pada 1965 bersama mahasiswa ASRI lain, seperti Djoko Poedjono, Ng Sembiring, Isa Hasanda, Misbach Tamrin, Kusnadi, Budiman, Sutopo, Adrianus Gumelar, Sabri Djaenani, Suharjiyo Pujanadi, Harmani, dan Harjanto.

Mereka menyewa lahan dari Mbah Rono, inisiatif semang Amrus. Karena keterbatasan dana, penggunaan sanggar mereka kerjakan sendiri. "Saya mengaduk semen dan menata bata," ujar Djoko Poedjono, 75 tahun, dua pekan lalu. ASRI kini menjadi kultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kampusnya juga telah pindah ke Sewon, Bantul.

Bentuk sanggar sederhana, mirip benteng ber dinding bata merah tanpa plester dengan sebuah papan nama dari gedek. Nama Bumi Tarung, yang secara harfiah berarti palagan atau tempat bertarung, diusulkan oleh Amrus. "Karena bumi ini tempat perjuangan, bertarung melawan penindasan dan ketidakadilan, bukan untuk *leyeh-leyeh*," katanya.

Bukan hanya sebagai sanggar, bangunan itu menjadi tempat tinggal para anggotanya. Balas Amrus mengajak istri dan dua anaknya—Prayati, dan Aninda Jagat Baja—tinggal di sana. Amrus dan keluarganya menempati satu ruangan, sedangkan yang lain tidur di ruang utama yang sekaligus menjadi ruang diskusi. "Saya dulu sehabis kuliah langsung ke sanggar," ucap Suharjiyo Pujanadi, 74 tahun, ketika ditemui di rumahnya di Bareng Lor, Klampayan, pertengahan September lalu.

Dari sisi kelembagaan, Bumi Tarung termuat unik. Ketika sanggar-sanggar seni rupa lain pada masa itu berupaya mempertahankan otonomi mereka dari Lekra, Bumi Tarung justru menempatkan diri sebagai organ yang langsung di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lesrupa), unit Lekra di bidang seni rupa yang dipimpin Basuki Resobowo.

Posisi ini tak membuat sanggar mendapat sumbuhan. Untuk menghidupinya, setiap seniman mesti menyumbang 80 persen hasil penjualan lukisan. "Itu masuk untuk menghidupi anggota lain yang lukisannya belum laku," kata Amrus.





mesti masuk Lekra dan menerapkan asas 1-5-1 dalam berkarya.

Menurut Misbach Tamrin dalam *Amrus Natalsya dan Bumi Tarung*, pola itu membuat karya seni di sanggar ini banyak menyorot isu buruh dan tani. Ketika Bumi Tarung menggelar pameran perdana pada 1962, Amrus memajang lukisan *Tangan-tangan yang Agung*—tentang sistem kapitalis yang memperlakukan buruh seperti robot. Tema petani tampak dalam lukisan *Peristiwa Djengkol*, *Melepas Dahaga di Matahari yang Bening*, dan *Mereka yang Terusir dari Tanah*. Ketiga lukisan Amrus itu menggambarkan petani yang menjadi korban sistem feodal.

Meski baru berdiri, Bumi Tarung dibicarakan di dalam dan di luar Lekra. Bumi Tarung, yang secara terang-terangan tampil sebagai organ Lekra, mengundang ketegangan antara mereka dan kelompok seniman lain. Pada 1963, di sebuah diskusi di Gedung Sono Budoyo, Yogyakarta, pelukis Danarto dan Sanggar Bambu mengkritik Bumi Tarung yang menerapkan politik sebagai panglima dan memaksakan realisme sosialis menjadi acuan berkesenian.

Sebagian seniman lain meledek karya Bumi Tarung anarkistis. Itu karena dalam lukisan kerap digambarkan petani dan buruh yang gahar. Pada lukisan *Cuaca Kayu Bojolali* karya Kusmulyo, misalnya, buruh dan petani digambarkan meninju "tujuh setan desa", istilah yang dipakai Barisan Tani Indonesia untuk menyebut tujuh musuh petani. Meski begitu, Misbach menolak jika karya-karya Bumi Tarung disebut anarkistis. Ia lebih sepakat dan bangga menyebutnya dikal.

\*\*\*

SIARAN radio pada 1 Oktober 1965 malam itu menghentikan kesibukan Amrus dan beberapa seniman yang tengah membuat poster film di gedung Korwensi Anti Pangkalan Militer Asing di Jalan Cikini, Jakarta. Soeharto mengumumkan pengambilan alih dari Angkatan Darat dan mengatakan PKI di balik percobaan kudeta. Sejak itu, PKI dan organ-organ di bawahnya diburu.

Amrus meminta teman-temannya tetap di Jakarta karena lebih aman. Namun mereka memaksa pulang. "Akibatnya, mereka ditangkap dan dihabisi," katanya. Amrus sendiri ditangkap pada 1968 dalam Operasi Kalong dan masuk bui selama lima tahun.

Sutopo, Djoko Pekik, Suroso, dan Sudiyo ditangkap di Yogyakarta. Ng Sembiring diterungku di astagi, Karo, Sumatera Utara. Misbach Tamrin diaduk di Banjarmasin. Nasib tragis menimpa Harjo dan Harjanto, yang pulang ke Tulungagung. Mereka ditangkap dan dibunuh. Begitu pula Mulawesdin, saat pulang ke Siantar, Simalungun. ■

Biasanya mereka menjual lukisan dengan perantara Wen Peor. Pelukis keturunan Tionghoa itu memiliki cukup banyak akses ke para kolektor.

Seperti halnya Lekra, Bumi Tarung tidak memiliki hubungan organisasi dengan Partai Komunis Indonesia. Namun komunikasi antara Bumi Tarung dan PKI Yogyakarta terjalin baik. Satu pekan sekali Amrus bertemu dengan Ketua PKI Yogyakarta untuk mendapatkan informasi perkembangan partai. "Informasi itu selanjutnya saya sampaikan ke anggota," ujarnya.

Menurut Amrus, keputusan menjadikan Bumi Tarung sebagai sanggar Lekra merupakan kesepakatan para pendiri sanggar tanpa ada intervensi dari pengurus Lekra pusat dan daerah. "Kami juga tidak pernah minta izin ke Lekra," katanya.

Meski secara pribadi Amrus dekat dengan Njoto, ia membantah gagasan pendirian Bumi Tarung atas permintaan pemimpin Lekra pusat itu. Njoto pernah membantu Amrus menggelar pameran patung kayu di Lapangan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada 1957. Sejak itu, mereka berteman akrab. Amrus juga kerap meminta Njoto menjualkan lukisannya.

Menjadikan Bumi Tarung sebagai sanggar resmi Lekra bukan tanpa konsekuensi. Semua anggotanya

#### Amrus Natalsya

di Lido, Sukabumi,  
Jawa Barat,  
12 September lalu.



# TUGAS PARTAI DI PANGGUNG KETOPRAK

AKTIVIS LEKRA GIAT MENGGARAP LEMBAGA SENI DI  
DESA-DESA. SENIMAN MENDAPAT KURSUS POLITIK.

1

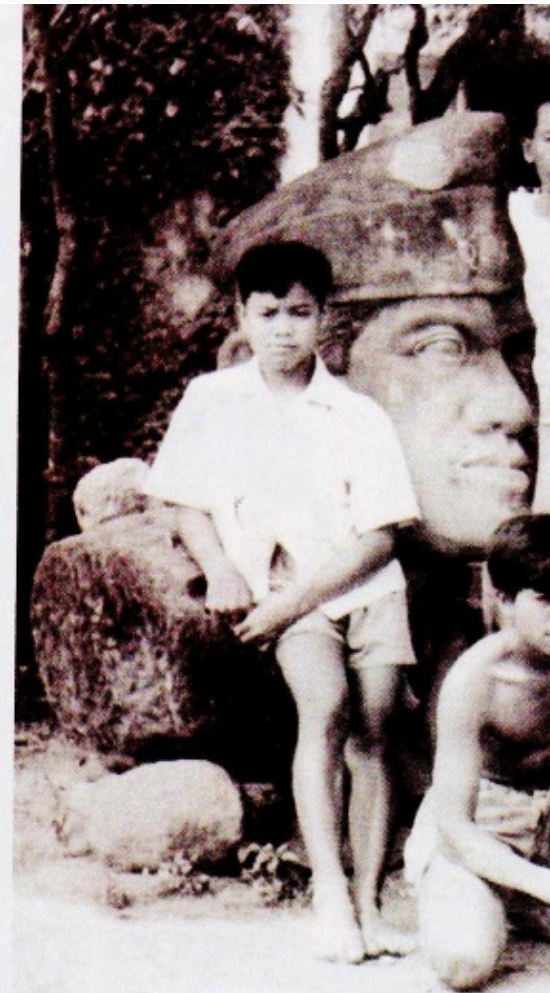
**P**ATUNG Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi penanda rumah di Jalan Batikan, Yogyakarta, itu. Arca raja Keraton Yogyakarta ini berbentuk kepala dan pundak. Tingginya sekitar satu setengah meter. Pematung Rustamadji memahat batu kali untuk mengukir kepala Sultan yang berpeci dan berseragam tentara dengan pangkat bintang dua.

Rumah ini dulu pusat kegiatan Sanggar Pelukis Rakjat. Hendra Gunawan mendirikan organisasi itu pada 1949. Ia menyewa rumah Mbah Mangun. Kini rumah itu ditinggali Krisna Aryanto, 41 tahun. Krisna adalah cucu Mbah Mangun.

Dulu rumah itu berdinding gedek, kini berdinding tembok. Rumah itu tanpa teras. Jendela dan pintu warna biru menghiasi. Rumah itu beralamat di Mergangsan II Nomor 66. Meski begitu, banyak orang lebih mengenal alamat lama, Jalan Sentul Rejo Nomor 1. "Tukang pos pun tahunya, ya, Sentul Rejo," kata Krisna di rumahnya, Senin dua pekan lalu.

Bagi pematung tersohor Edhi Sunarso, 81 tahun, rumah itu menjadi saksi perkawinan seni dan politik, bagaimana Lembaga Kebudayaan Rakyat mengembangkan sayap di Yogyakarta. Sejumlah seniman Pelukis Rakjat tinggal di rumah itu. Selain Edhi, ada Trubus Sudarsono, Rustamadji, Abas Alibasyah, Batara Lubis, dan Permadi Lyosta.

Pada 1955, Trubus, Yuski Hakim, Martian Sagara, dan Trisno ikut kursus kader partai. Hendra Gunawan pun bergabung dengan Lekra. Edhi mengenang, sejak saat itu, obrolan di sanggar lebih kental bermuatan politik. Edhi berseberangan dengan Lekra. Bagi



dia, seni memang untuk rakyat, tapi bukan versi Lekra, yang berbau politik. Seni untuk rakyat, kata dia, harus murni buat kemanusiaan.

Edhi, yang tinggal di sanggar sejak 1950, memili luar dari rumah itu pada 1955. "Tapi saya tetap an Pelukis Rakjat," ucapnya. Belakangan Rustamad Ali, dan Abas Alibasyah menyusulnya. Edhi mer kan sebagian seniman Pelukis Rakjat memang b bung dengan Lekra. Namun, secara organisasi, baga ini bukan bagian dari Lekra. Berhimpun ke l merupakan pilihan politik masing-masing.

Di Yogyakarta, kata Edhi, Lekra tak punya tor sendiri. Lekra berkembang dengan cara m ke organisasi seniman. Selain Pelukis Rakjat, ad jumlah organisasi seniman lain yang sebagian gotanya bergabung dengan Lekra. Sebut saja man Indonesia Muda bentukan S. Sudjojono. juga Pelukis Indonesia Muda, yang dimotori Na Djamin, Widayat, dan Sayogo. Begitu juga San Bumi Tarung, yang sebagian besar anggotany niman Lekra.

Di Klaten, Jawa Tengah, dalang Setya Raharja mengembangkan Lekra. Warga Pedan yang kini usia 78 tahun ini masih hafal lagu propaganda u kampanye PKI pada Pemilu 1955. Ini satu di an nya: *kethuk jangga kempul/kendang gong kenong pethuk pada kumpul/timbang dewe dewe/fo lali lili lihane/pilihane milih palu arit wae.*

Tembang itu semacam lagu wajib dalam se pertunjukan kelompok seni Lekra di Klaten. B nya Slamet membawakan lagu ini dalam pentas yang. Segmen dagelan pada wayang merupakan gian penting untuk propaganda. Berbagai lirik





bang diubah sesuai dengan haluan politik. Lekra juga masuk ke kesenian rakyat di Pedan melalui tari Gancuni. Ada yang meyakini tarian ini berasal dari Cina, yang menceritakan petani sedang memanen jagung. Slamet piawai menarikannya. Dia juga jago berpidato. Ia seniman Lekra yang menonjol di Klaten.

Slamet mendapatkan pendidikan singkat khusus di Komite Distrik Besar di Semarang sekitar setengah bulan. Pendidikan berlanjut hingga Central Komite di Senen, Jakarta. Ia digembleng untuk tugas khusus: merintis perkembangan PKI di Palu, Sulawesi Tengah. "Kesenian jadi pintu masuk," kata Slamet di rumahnya, Jumat tiga pekan lalu.

Setahun Slamet bermukim di Sulawesi. Sama seperti di daerah asalnya, dia tak masuk struktur PKI ataupun Lekra. Tugasnya hanya berkesenian. Ketika pecah peristiwa 1965, Slamet lolos dan menyelip pulang ke Klaten. Selang beberapa hari tiba di rumah, ia dididik tentara. Slamet dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan dan bebas pada 1971.

Masuknya Lekra ke kelompok seni tradisi juga diungkapkan seniman ketoprak Bondan Nusantara. Pria kelahiran 1952 itu ingat bagaimana ibundanya, Khadariyah, jadi primadona ketoprak. Menurut Bondan, seni tradisi mulai kuat di Jawa pada 1950-an dan Pemilu 1955 mendorong partai gencar mengajak masyarakat berpolitik. "Seniman yang semula tak paham politik mencoba masuk ke situ," kata Bondan.

Kini Khadariyah berusia 88. Ia memegang tongkat untuk menyokong langkahnya yang tertatih. Khadariyah adalah bintang panggung ketoprak Kridomardi, yang dipimpin Cokrojadi, sejak 1950-an. Cokrojadi

**Anggota Pelukis Rakjat** di samping patung Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Sanggar Pelukis Rakjat, Yogyakarta, 1950-an.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta hasil Pemilu 1955.

Kridomardi berada di bawah Lekra dan punya sekretariat di dekat Keraton Yogyakarta. Segenap perwujudan tempat di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat sudah pernah Khadariyah lajahi. Setelah Pemilu 1955 menempatkan PKI sebagai pemenang keempat, Khadariyah merasakan keseruan rakyat kian banyak membawa muatan politik. Pakem ketoprak ditafsir ulang untuk corong partai. "Itu tugas dari partai," ujar Khadariyah.

Bondan menceritakan diubahnya lakon *Suminten Edan*. Sesuai dengan pakem, lakon itu berkisah tentang Suminten, anak warok Ponorogo, yang batal sunting Subroto, anak Adipati Trenggalek. Subroto justru memilih Wartiyah, anak warok Ponorogo lain. Ini mengakibatkan Suminten gila. Tapi Suminten bisa disembuhkan ayah Wartiyah. Akhirnya Subroto menikahi keduanya.

Kridomardi mengolah dan mementaskan *Suminten Edan* dengan cara berbeda. Gilanya Suminten justru membuat para warok bersatu. Para warok mendung Subroto memilih Wartiyah dengan tujuan mengadu domba warok. Akhirnya, warok mengepung dipaten. "PKI antipoligami, jadi ceritanya diubah," kata Bondan.

Lekra membentuk Badan Kontak Ketoprak Seluruh Indonesia (Bakoksi) di Yogyakarta. Tugas Bakoksi mengorganisasi kelompok ketoprak di seluruh Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tiap kelompok ketoprak berkewajiban memberikan iuran 10 persen dari penghasilannya. Jika ada kelompok ketoprak akan tampil di daerah, Lekra menguruskan izin melalui partai. Semua honor pemain ketoprak juga ditong 10 persen untuk organisasi.

Ketoprak Siswo Budoyo Tulungagung, yang berdirinya pada 1958, juga didekati Lekra. Pemimpinnya, Siswondo, ditawarkan bantuan dan fasilitas oleh Lekra untuk mengembangkan tobongannya. Siswondo suka wafat. Menurut adiknya, Sunardi, kakaknya hanya diberi uang dan pemainnya mendapat bayaran. Lekra, tapi ditolak "Mas Sis condong ke Lembaga kebudayaan Nasional," ujar Sunardi.

Sedangkan di Ponorogo, reog menjadi sarana politik rakyat buat Lekra dalam mendukung partai. Menurut Achmad Tobrono Torejo, sesepuh kesenian reog Ponorogo, pada 1959-an, grup kesenian itu punya wadah bernama Barisan Reog Ponorogo, yang diketuai Paimin.

Sebanyak 303 dari 461 grup reog bergabung dengan Barisan Reog. Belakangan, Lekra mewarnakan Barisan Reog untuk menjaring dukungan massa. Tobrono memilih keluar dari Barisan Reog akibat perbedaan haluan politik. ■



# GUSTI ALLAH PUN NGUNDUH MANTU

[ SENIMAN LEKRA MENGUBAH KESENIAN TRADISIONAL MENJADI PROGRESIF REVOLUSIONER. BANYAK CERITA RAKYAT DIGUBAH. ]

**S**UDAH, biarkan saja dia menghina kami. *Gusti Allah mboten sare* (Tuhan tidak tidur)," ujar seorang pemain ludruk dalam sebuah dialog pementasan ludruk di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 1965. "*Gusti Allah gak turu, wong gak duwe kloso* (Tuhan tak tidur karena tak punya alas tikar)," celetuk pemain lain mengomentari lawan bicaranya.

Dialog dalam adegan ludruk berjudul *Matine Gusti Allah* (*Matinya Tuhan*) itu memancing amarah seorang simpatisan Barisan Ansor Serbaguna, yang ikut meriung di antara ratusan penonton. Ia meloncat dan mengamuk di atas panggung. Pemain dan penonton kocar-kacir.

Anggota Banser itu menganggap dialog dalam lakon tersebut sebagai bentuk penistaan agama. Pementasan lakon yang sama dalam sebuah hajatan di Desa Kerjen, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, juga berakhir ricuh. Banser mengorak-arik makanan yang disuguhkan kepada tamu, lalu membuangnya ke sawah. Pentas ludruk bubar.

Kisah itu dituturkan Wakil Ketua Lembaga Seni-man dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Agus Sunyoto, yang mengaku mendapat penuturan dari saksi mata Tamyiz Djisman yang sudah meninggal. Lakon itu dimainkan grup ludruk yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat, tapi ia tak ingat lagi nama grup

dan asalnya.

Cerita dalam lakon tersebut sebenarnya sedemikian: menggambarkan kondisi masyarakat saat itu yang serba susah karena perekonomian yang tidak berkembang. Kidung dan parikan yang dibawakan dalam ludruk mengandung kegetiran dan kekecewaan hidup di masa itu. "Mungkin ini bentuk sindiran. Tapi di desa, yang tidak terdidik, mana paham?" kata penulis kepada *Tempo* tiga pekan lalu.

Di Jombang, yang merupakan basis massa NU, Lekra juga berani *manggung* dengan lakon ludruk *Gusti Allah Ngunduh Mantu* (Tuhan Mengambil Mantu). Lakon ini dimainkan grup ludruk paling terkenal di Jombang waktu itu, Arum Dalu. Allah yang bagi orang Islam hanya satu atau tunggal dipersepsikan pada anak dan menantu. Ada lagi cerita *Kawine Mal Jibril*. "Itu menyinggung dan membuat panas orang Islam," ujar Nasrul Ilahi, budayawan Jombang yang juga adik tokoh Emha Ainun Nadjib, kepada *Tempo*, tiga pekan lalu.

Suwardi, 80 tahun, anggota grup ketoprak dari Jombang yang orang Ngesti Wargo (binaan Lekra), Bojonegara, membenarkan pernah memainkan lakon *Gusti Allah Dadi Manten*. Ia memerankan tokoh Gareng, paman yang dikenal loyal terhadap tuannya. "Sebelumnya, saya ikut pelatih (sutradara) saja," katanya. Kediannya di Kampung Pinggiran, Ledok Kidul, Bojonegoro.

Sepanjang 1965 itu, grup ludruk dan ketoprak di Jawa Timur semakin berani dan kritis. Lakon-lakon yang provokatif, seperti *Gusti Allah Dadi Manten*, *Malaikat Kimpoi* (*Malakat Bersetubuh*), sering dipentaskan. Pentas hampir merata di semua daerah yang memiliki basis kesenian binaan Lekra. Seniman ketoprak dari Yogyakarta, Bondan Nusantara, menuturkan pernah sebuah kelompok ketoprak lokal Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta, mem-

SEPANJANG 1965 ITU, GRUP LUDRUK DAN KETOPRAK DI JAWA TIMUR SEMAKIN BERANI DAN KRITIS. LAKON-LAKON YANG PROVOKATIF, SEPERTI *GUSTI ALLAH DADI MANTEN* DAN *MALAIKAT KIMPOI* (*MALAKAT BERSETUBUH*), SERING DIPENTASKAN





pentas dengan lakon *Patine Gusti Allah*.

Berbeda dengan ludruk di Jawa Timur, menurut Bondan, mengutip penuturan Ketua Barisan Tani Indonesia, almarhum Pujono kepadanya saat masih hidup, sebenarnya pentas itu untuk perayaan Paskah, yaitu penyaliban Yesus. Tapi, biar populer, judulnya diganti menjadi *Patine Gusti Allah*. Pentas pun heboh. Tapi buntutnya jadi isu besar bahwa Lekra anti-Tuhan. "Lakon itu hanya sekali muncul. Setelah itu, habis karena peristiwa September 1965," ucapnya.

Faktanya, kata Bondan, kesenian yang mudah diterima rakyat memang digarap betul oleh Lekra. Ada ketoprak, ludruk, dan wayang orang yang sangat digemari masyarakat bawah. Bekas anggota Lekra Surabaya, Gregorius Soeharsojo Goenito, 77 tahun, menuturkan ludruk berkembang pesat setelah dihimpun Lekra. "Saat itu, tidak ada ludruk yang tidak masuk Lekra," ujarnya. Ada juga ludruk non-Lekra, tapi jumlahnya sangat sedikit.

Ketika Lekra masuk, kata dia, tema pentas pun berubah ke tema kritik sosial, seperti buruh yang tak dibayar. Penonton membeludak karena penasaran. Sebelumnya, menurut Greg, ludruk di Jombang banyak mementaskan lakon bertema mistik.

Di tangan Lekra, kata Bondan, seni menjadi progresif revolusioner. Visi partai ditularkan lewat seni agar segera sampai ke masyarakat. Cerita asli *Suminten Edan*, misalnya, mengisahkan tentang Suminten, anak warok, yang batal dipersunting Subroto, anak Adipati Trenggalek. Subroto justru memilih Wartiyah,

anak warok lain. Suminten pun gila. Tapi dia disembuhkan ayah Wartiyah. Akhirnya Subroto menikahi keduanya.

Di tangan seniman Kridomardi yang bernaung bawah Lekra, cerita berubah menjadi pengepungan kadipaten oleh para warok. Kegilaan Suminten membuat warok bersatu. Cerita diubah karena PKI anti religius.

Ada pula lakon Bandung Bondowoso yang dikisahkan membuat seribu candi dalam waktu semalam dengan bantuan jin. Namun Kridomardi mementaskan lakon berupa pembangunan candi dengan cara kerja paksa. Tak mengherankan jika petani, buruh, dan nelayan amat menyukai kisah ketoprak yang menyuarakan perlawanan mereka.

Begitu pula ludruk. Rakyat Jawa Timur, yang ekspresif dan terbuka budayanya, memainkan ludruk dengan lakon *Malaikat Kipo*. Kata "kipo" mempunyai arti pipa, yang berfungsi sebagai penyalur. Lakon mengisahkan perlawanan rakyat terhadap para pemilik tanah dalam program *land reform*.

Para kiai adalah simbol masyarakat kelas menengah atas (priayi) yang menguasai banyak tanah. Mereka pun menjadi pembela rakyat untuk mendapatkan atas tanahnya. "Kiai kan takut kepada malaikat. Jadi rita itu memojokkan para kiai," tutur Bondan.

Pelawak senior Cak Kartolo, 68 tahun, mengemukakan saat meletus peristiwa 1965, semua pementasan ludruk dilarang dan vakum selama dua-tiga tahun. Masyarakat menanggapi seniman yang terlibat partai dilarang. Tak sedikit yang hilang atau tewas. Namun akhirnya kesenian ini dihidupkan kembali di bawah pengawasan militer.

Kartolo muda, yang mulai mengudara berbudaya Grup Ludruk RRI Surabaya pada 1968, mengungkapkan seniman ludruk saat itu mengikuti ritual "penyucian diri" lebih dulu agar bisa bergabung dengan RRI. Kartolo, salah satunya, menandatangani surat pernyataan tidak ikut partai politik.

Nama grup ludruk pun tiba-tiba bertabur dengan hasa Sanskerta, yang biasa digunakan institusi militer. Misalnya grup ludruk Putra Bhairawa binaan Komando Distrik Militer Jombang, ludruk Gema Tribatra binaan Brigade Mobil Balongsari, dan Bhayangkara binaan kepolisian Resor Jombang. "Bahkan setiap pementasan selalu dimulai dengan tembakan salvo," ujar Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto Eko Edy Susanto.

Itu jadi penanda bahwa ludruk setia kepada rakyat atau pemerintah. Sebelumnya, saat menjadi binaan Lekra, pentas ludruk dibuka dan ditutup dengan ucapan "wajib" *Genjer-genjer*. Menurut Eko Edy, sejak Orde Baru, ludruk yang tajam kritiknya tenggelam. "Sejak itu berubah menjadi corong Orde Baru," katanya.

**Pementasan ketoprak** pada pembukaan Kongres Lekra di Solo, Januari 1959.



# EULOGI KEPADA PARTAI

[ PUISI DAN PROSA SENIMAN LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT MENCERITAKAN HIDUP MASYARAKAT BAWAH YANG RUDIN. SEBAGIAN KECIL MENEPI DARI SLOGAN REVOLUSI. ]

**M**ENGHIMPUN 14 puisi, antologi *Kepada Partai* adalah kado 12 seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat untuk Partai Komunis Indonesia, yang berulang tahun ke-45, pada 23 Mei 1965. Bagi Lekra, tahun itu juga istimewa karena tepat berusia 15 tahun.

Menurut Amarzan Ismail Hamid, yang menyumbangkan puisi "Memilih Jalan", ketika itu pengurus Lekra meminta para penyair yang aktif di organisasi ini mengumpulkan puisi yang bertema partai atau komunisme. "Jadi puisi itu lebih dulu ada, bukan dibuat khusus untuk menyambut ulang tahun PKI," kata Amarzan, 72 tahun, dua pekan lalu.

Meski begitu, kata "partai" ditemukan di hampir semua puisi. Dalam puisi Amarzan, partai ditulis dengan "P" bergandeng dengan kata revolusioner. Ber cerita tentang seorang penyair yang menemukan komunisme, "jalan yang benar", sajak panjang lima babak ini memikat justru karena tak menempatkan partai di teras depan—ciri umum puisi Amarzan. Ideologi dan revolusi sayup sebagai latar belakang. Yang tampil adalah renungan tentang simpang jalan masa depan dengan diksi yang melankolis.

di bus atau oplet

dalam siang dan malam

kadang-kadang datang juga

mimpi lama yang mendarahkan luka

Keith Foulcher, sarjana Australia yang menelaah karya-karya seniman Lekra dalam *Social Commitment in Literature and the Arts* (1986), menyebut Amarzan sebagai penyair paling menonjol di Lekra karena eksplorasi bentuk dan bahasa syair-syairnya. Puisi bebasnya berupa balada yang tak selalu patuh pada rima di tiap stanza, tapi memainkan bunyi kata pada satu pokok pikiran dalam kalimat—satu corak yang masih dipakai para penyair hingga kini.

Gaya yang mirip terdapat pada sajak-sajak Suti W.S. Dalam kumpulan *Kepada Partai*, penyair Cila yang diasingkan ke Pulau Buru ini menyumbangkan satu puisi: "Menjanjikan Partai". Tapi puisi ini terlempang jika dibandingkan dengan banyak puisi yang ia bukukan dalam *Nyanyian dalam Kelam* (2010).

Dalam antologi itu, peristiwa tak lagi dilaporkan dari sudut pandang jurnalistik. Sutikno terasa mengendapkan peristiwa sebagai peristiwa yang ia alami sehari-hari, renungan renungannya ketika dibui di penjara Salemba, dan menuangkannya dalam puisi dengan diksi yang terlempang. Karena itu, seperti Amarzan, sajak Sutikno melankolis bahkan ketika bercerita tentang "petani tam di dampar padi menguning".

Barangkali itu karena kumpulan tersebut ditulisnya setelah 1971, jauh setelah peristiwa Gerakan September 1965, yang memberi legitimasi kepada Orde Baru untuk "membabat dan membungkam" niman yang dianggap kiri. Realitas yang menyedihkan itu kemudian hadir dalam sajak sedih. Renuhan personal menyublim menjauh dari kata "Rakyat" yang disanjung dengan slogan dan teriakan revolusi.

Dalam karya-karya sebelum 1964, sajak-sajak seniman Lekra didominasi syair dengan diksi *grande* dan menggelembung, garang, kokoh, tapi tak menyentuh. Kita hanya membaca sederet kata hebat tapi pa bisa masuk ke dalamnya untuk menyelami peralaman penyair ketika menuliskan bait-bait itu.

Puisi-puisi Agam Wispi, misalnya, yang dimuat dalam buku *Gugur Merah* (2008) dari *Harian Rakjat Minggu* banyak memakai judul wah: "Kisah Tukang Obat Kebudayaan" atau "Kongres ke-22", yang ia buat untuk Dipa Nusantara Aidit, Ketua Central Komite PKI, menjelang kongres partai itu.

ayo kawan, mari keluar

ke jalan-jalan

komunisme berkibar

selamat datang zaman

ayo kawan, mari keluar

hati kita lebih keras dari lapar

genggamlah salam kata bergetar

solidaritas! kuat - tegar - benar

Jenis puisi seperti ini banyak sekali dibuat seniman Lekra. Bahkan Putu Oka Sukanta, yang menulis sajak liris, tak urung membuat puisi sanjungan kepada pa



tai. Dalam "Kepada Adik", yang menjadi subjudul sajak panjang "Surat-surat", kalimat penutupnya berbunyi: *hati dan pikiran dipadukan/ untuk mencapai satu tujuan/ jalannya hanya satu, adikku/ marilah berlomba menjadi komunis maksimum!*

Pelopor sajak poster seperti ini tentu saja Aidit dan Njoto, dua pentolan PKI yang mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Selama kurun 1946-1965, Aidit banyak menulis puisi seperti pentolan PKI lainnya, semacam M.H Lukman, Sudisman, dan Alimin. Puisi-puisi Aidit, yang kadang memakai nama samaran Amat, adalah komentar atas peristiwa besar atau anjuran revolusi.

Dalam sajak "Untukmu Pahlawan Tani" yang ditulis Aidit pada Desember 1964, alinea pertama berbunyi: *di kala senja, mencari cerah, petani menggarap sawah, mencari seuli padi, sisa pembagi, dari tuan-tanah keji.* Juga stanza penutup sajak "Sepeda Butut": *ku-yakin sepenuh hati, Rakyat pekerja bebas pasti, PKI pemimpin sejati, sepeda bututku turut berbakti.*

#### Penyair Lekra,

Mayor Angkatan Udara Dodong Djiwapradja, SH (tengah), di kantor Lekra, Jalan Cidurian 19, Cikini, awal 1960-an.

Njoto agak mending karena ia mencoba mengeksplorasi bentuk puisi yang umum dipakai waktu itu. Dalam "Variasi Cak", Wakil Ketua II Central Committee PKI ini menjadikan "cak" sebagai bunyi sehingga sajaknya ritmis—satu dekade kemudian, puisi mania seperti ini dipopulerkan Sutardji Calzoum Bachri lewat kumpulan *O, Amuk, Kapak*.

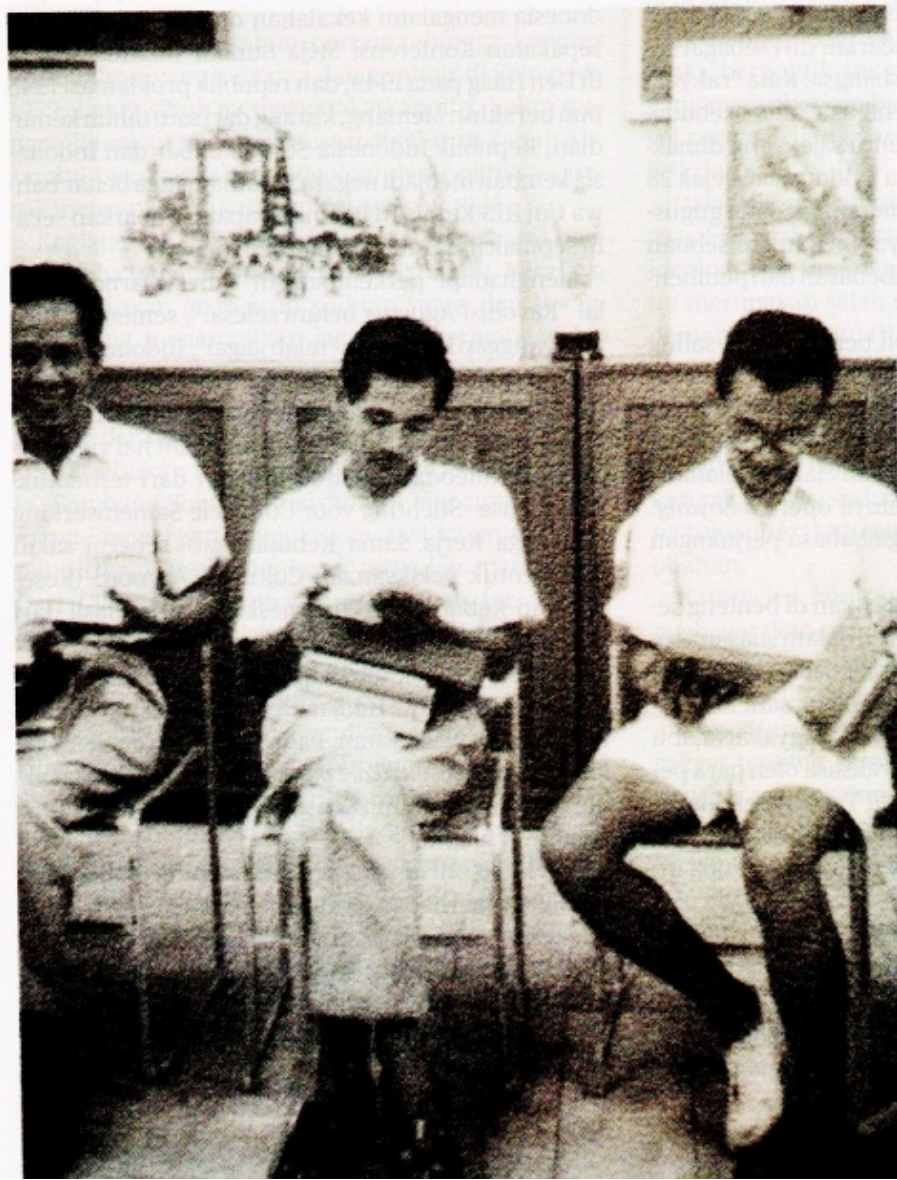
Namun, ketika puisi tak membicarakan para pemimpin atau hal-hal besar lain menyangkut ideologi, sajak seniman Lekra bisa menyentuh juga. "Membaca puisi Seorang Petani" dari Agam Wispi adalah puisi sajak panjang mencekam tentang penembakan seorang petani yang mempertahankan hak atas tanahnya di depan kantor bupati. Dalam puisi itu, Agam mengulang beberapa kata horor secara ritmis: tanah, darah, hitam, kelam....

Puisi menjadi karya sastra yang paling banyak dihasilkan seniman Lekra dan mendapat tempat. Dalam rapat-rapat akbar selalu ada pembacaan puisi. Lomba yang diadakan *Harian Rakjat* juga lebih banyak menyoroti kategori puisi. Agaknya, ini karena waktu itu puisi alat paling ampuh untuk menyampaikan gagasan partai atau ideologi Lekra lantaran cangkupan dan bentuknya paling sederhana serta mudah diterima masyarakat bawah.

Padahal prosa tak kurang gemilang. Novel dan cerita pendek Pramoedya Ananta Toer adalah rekam jejak sejarah yang kuat, baik struktur maupun alur ceritanya. Prosa panjang Ira Iramanto atau Oey Hay Djeng memikat karena kisah yang ajek ditopang oleh gaya yang kuat: sublim, tak sekadar tentang rakyat jelata yang hidup dan masa depannya perlu ditolong komuniste dan dewa revolusi.

Barangkali itu karena prosa jauh lebih praktis menyampaikan gagasan yang diperoleh dari "turun ke bawah". Turba adalah metode seniman Lekra untuk menyerap denyut hidup rakyat yang menjadi tugas besar mereka. Menurut Putu Oka, seusai turba, seniman menuliskan pengalaman tinggal di desa selama sebulan atau lebih ke dalam karya sajak. "Banyak yang membuat cerita pendek atau novel atau reportase perjalanan," kata Putu Oka.

Dan prosa seniman Lekra bisa lucu juga. Cerita pendek *Komunis Pertama* karya T. Iskandar yang dimuat *Harian Rakjat* edisi 1 Desember 1964 mengisahkan seorang pemuda komunis muda di Aceh setelah lama merantau di Jakarta. Ia kecewa melihat orang-orang kampungnya masih berpegang dengan adat dan agama yang menghambat gerakan revolusi. Paman dan ibunya lebih kecewa atas perilaku si pemuda. Di akhir cerita, ibunya berpesan: "Komunis pun kau, Ismet, jangan tinggalkan semesta yangmu." ■





# MENGAPA SAYA MEMILIH LEKRA

**L**EMBAGA Kebudayaan Rakyat adalah pernyataan tentang keberadaan: sebagai sebuah organisasi, juga sebagai roh atau konsep. Lekra juga pernyataan tentang jati diri. Ia pernyataan politik dalam pengertiannya yang paling sublim: asas dan haluan, upaya, serta kebijakan dari kebudayaan rakyat yang siap bertumbuh. Lekra lahir pada 1950—lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Lekra adalah perjuangan pemerdekaan diri sebagai obyek dan perjuangan pencarian diri sebagai subyek di tengah pergaulan antarbangsa. Kata "rakyat" yang menjadi inti bagi kata "lembaga" dan "kebudayaan" yang mendahuluinya, tentu saja, yang dimaksud ialah rakyat Indonesia. Kata "Indonesia", sejak 28 Oktober 1928, bukan sekadar menunjuk pada gugusan kepulauan dan penghuninya, melainkan sebuah pernyataan politik. Politik pembebasan dan pembentukan diri.

Seni dan politik selalu tampil bersama dan saling tunjang. Di kampung-kampung di era lampau, seni menjadi bagian dari kehidupan. Seusai musim panen, musik lesung terdengar berdentam-dentam. Anak-anak petani mempergelarkan "lakon dolanan" di bawah sinar purnama, misalnya opereta *Soyang*. Saat itu, bahasa seni adalah juga bahasa perjuangan hidup sehari-hari.

Seni dan politik juga bisa disaksikan di benteng selatan Keraton Yogyakarta. Saat itu, dalam suasana revolusi Indonesia yang menggelora, poster-poster perjuangan digelar pada tembok sepanjang satu kilometer dengan tinggi empat meter. Kota Yogyakarta, ibu kota RI, diubah menjadi kanvas raksasa oleh para pelukis yang tergabung dalam Pusat Tenaga Pelukis Indonesia. Barangkali inilah poster terbesar dan terpanjang yang pernah ada dalam sejarah seni rupa Indonesia.

Di kalangan pemikir kebudayaan, bergulir adu wacana tentang apa itu kebudayaan nasional dan bagaimana kebudayaan nasional harus dibangun. Debat atau polemik besar kebudayaan itu tak pernah terselesaikan hingga sekarang. Debat besar itu mencuat se-

kurang-kurangnya tiga kali: pada pertengahan 1950-an, pada tahun-tahun pertama proklamasi kemerdekaan RI, serta pada 1959-1965 antara kaum Manik (Manifest Kebudayaan) dan kaum Manipol (Manifest Politik) sejak pidato 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita".

\*\*\*

DALAM medan politik untuk pembebasan diri di meja perundingan dan di medan pertempuran Indonesia mengalami kekalahan demi kekalahan. Sepakatan Konferensi Meja Bundar ditandatangani di Den Haag pada 1949, dan republik proklamasi 17 Agustus 1945 pun berakhir. Memang, kurang dari satu tahun kemudian, Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Juga benar bahwa Uni RIS-Kerajaan Belanda dapat dibubarkan setelah sembilan tahun kemudian (1954).

Menghadapi perkembangan ini, Sukarno menyatakan "Revolusi Agustus belum selesai", sementara menganggap Indonesia "telah gagal". Indonesia tidak lagi merdeka dan berdaulat, tapi menjadi negara semikolonial dan semifeodal, termasuk dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal yang terakhir, semifeodalisme itu tecermin dari terbentuknya Sticusa-Stichting voor Culturele Samenwerking (Lembaga Kerja Sama Kebudayaan)—sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Culturele Accord (Kesepakatan Kebudayaan) Indonesia-Belanda, hasil dari Konferensi Meja Bundar.

Pada satu pihak dari kubu kebudayaan nasional yang dipelopori Ki Hadjar Dewantara, lahir konsep kebudayaan kerakyatan. Pada kubu lain, yang mempromosikan seni untuk seni (*l'art pour l'art*) melalui Sutan Tjipto Dir Alisjahbana, lahir konsep kebudayaan humanisme universal.

Dua kubu inilah yang setelah 1959—terutama pada 1962-1965—berhadapan. Dalam perdebatan ini, Lekra menolak "seni untuk seni". Lekra mempromosikan seni dan ilmu yang "memiliki *engagement*" pada ideologi, politik kemerdekaan, dan kerakyatan.

\*\*\*



DEMIKIANLAH Lekra lahir pada 17 Agustus 1950—tanggal ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan diri.

Didirikan di Jakarta, di tingkat nasional Lekra dipimpin sekretariat yang terdiri atas enam orang—seorang di antaranya merupakan sekretaris umum. Lekra menyatakan diri sebagai wadah para pekerja kebudayaan rakyat. Semua berhimpun di dalamnya menuju cita-cita kebudayaan rakyat yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan. Lekra bukan tempat bagi kaum seniman dan selebritas yang suka berkenes-kenes. Sebagai organisasi, Lekra adalah organisasi dari suatu gerakan kebudayaan. Ya, suatu gerakan!

Bagi Lekra, pekerja kebudayaan rakyat bukanlah seniman dan ilmuwan yang mengisolasi diri dari rakyat dan tak acuh pada persoalan hidup mereka. Lekra tidak ingin kehidupan kebudayaan dikuasai kaum priayi kota dan desa, yang secara tidak sadar—apalagi jika dilakukan dengan sadar—menjadi kepanjangan tangan kapitalisme asing dan sisa-sisa feodalisme pribumi.

Selama delapan tahun pertama—hingga kongres nasionalnya yang pertama dan terakhir di Solo pada 1959—Lekra sibuk memasyarakatkan diri. Lekra mengembangkan sayap organisasi di seluruh Tanah Air, sambil mendakwahkan ideologi dan politiknya untuk mencapai amanat Revolusi Agustus 1945.

Kegiatan itu diterjemahkan melalui berbagai bentuk usaha penciptaan karya seni dan ilmu. Misalnya pembentukan grup-grup paduan suara dan keroncong yang menampilkan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan dan lagu rakyat daerah. Lekra juga menggalakkan seni pertunjukan rakyat, seperti ludruk, ketoprak, dan lenong.

Lekra bukan tak mengkritik Sukarno. Dari Jakarta, Bambang Sokawati Dewantara menciptakan tari *Enam-Empat*, yang melukiskan aksi kaum tani menuntut bagi hasil yang layak terhadap tuan tanah. Dari Cilacap, Sudarno As mengubah tari *Menjalla Ikan*, yang melukiskan ketidakberdayaan nelayan dan buruh menghadapi tengkulak dan "tuan ikan". Di Salatiga, Suyud melukiskan membunganya harga kebutuhan pokok dalam gending dan tari *Blanja Wurung* ("Urung Berbelanja"). Di Semarang, Oey Giok Siang mengubah langgam keroncong *TST*—sebuah kritik terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa itu. Syairnya, "*Aku baru mengerti, yang itu TST, tahu sama tahu....*"

Dalam umurnya yang terlalu pendek—dibanding Humanisme Universal dan Pujangga Baru yang mendahuluinya—Lekra mendapat tempat di hati rakyat. Di Yogya, jika orang mengatakan "melihat Lekra", itu artinya melihat pertunjukan gratis di panggung ter-

buka—panggung yang dibangun dengan papan-papan yang disusun di atas drum kosong, dengan hiasan banyak penjor, tampah, dan kukusan yang dilukis indah-indah.

Jika di desa-desa di Jawa Tengah orang mengatakan "melihat dalang Lekra", itu artinya mereka menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang dalangnya "runtut" dan lakonnya *nges* karena *nyambung* dengan situasi aktual. Adegan *goro-goro*-nya berisi kritik tajam tapi kocak dengan memperkenalkan banyak gending baru.

Kondisi ini mengancam seniman dan budayawan menengah kota dan pimpinan militer (Angkatan Darat). Karena itu, Kodam lalu membentuk Badan Kerja Sama Budayawan dan Militer (BKS Bumil), yang mencari celah-celah "artistik" sebagai alasan. Mereka menilai karya seniman Lekra bermutu rendah karena tidak memisahkan dunia artistik dari dunia politik.

Kritik ini dijawab dengan tegas oleh Njoto dalam Kongres Nasional I Lekra di Solo pada 1959, dengan mengatakan dalam kebudayaan "Politik adalah Panglima". Politik bagi Lekra adalah basis kebudayaan, maka berpolitik itu penting. Lekra menolak kritik yang menyebutkan banyak karya seniman Lekra gagal secara artistik karena menolak memisahkan politik dan seni.

Dalam kongres nasional itu, Lekra merumuskan asas 1-5-1, yakni "asas dua tinggi", yaitu tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik. Asas "dua tinggi" ini merupakan salah satu dari "lima kombinasi" pedoman kerja, yaitu (1) meluas dan meninggi, (2) tinggi mutu ideologi dan mutu artistik, (3) tradisi baik dan kekinian revolusioner, (4) *kreativitet individu* dan kearifan massa, dan (5) realisme sosialis dan romantik revolusioner. Tujuan prinsip itu adalah memberdayakan rakyat dari sudut sosial-budaya dan politik karena tujuan terakhir gerakan ini ialah melakukan perubahan.

Karena itu, ketika saya memimpin Lekra Jawa Tengah, gerakan pemberantasan buta huruf digelar sebagai gabungan dari aktivitas kebudayaan dan penyadaran politik. Saya menyusun diktat "Pemberantasan Buta Huruf" yang merupakan upaya penyadaran rakyat tentang kemiskinan dan sebab-musababnya dengan pendekatan kebudayaan seperti tembang, tari, dan pedalangan. Misalnya teks-teks seperti ini: ba-wo-n, e-na-m em-pa-t, u-pa-h, ba-gi ha-si-l, -bu-ru-h..., dan seterusnya.

Dengan "Politik sebagai Panglima" sebagai basis, semua ketentuan kombinasi yang lima itu akan bisa dicapai jika melalui metode kerja "Turun ke Bawah". Itulah yang disebut garis 1-5-1 Lembaga Kebudayaan Rakyat. ■



**Hersri Setiawan**

Penulis dan eks-tahanan politik. Buru; pernah menjadi Sekretaris Umum Lekra di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Wakil Ketua Lembaga Sastra Indonesia, wakil Indonesia Pengarang Asia Kolombo, Sri Lanka.

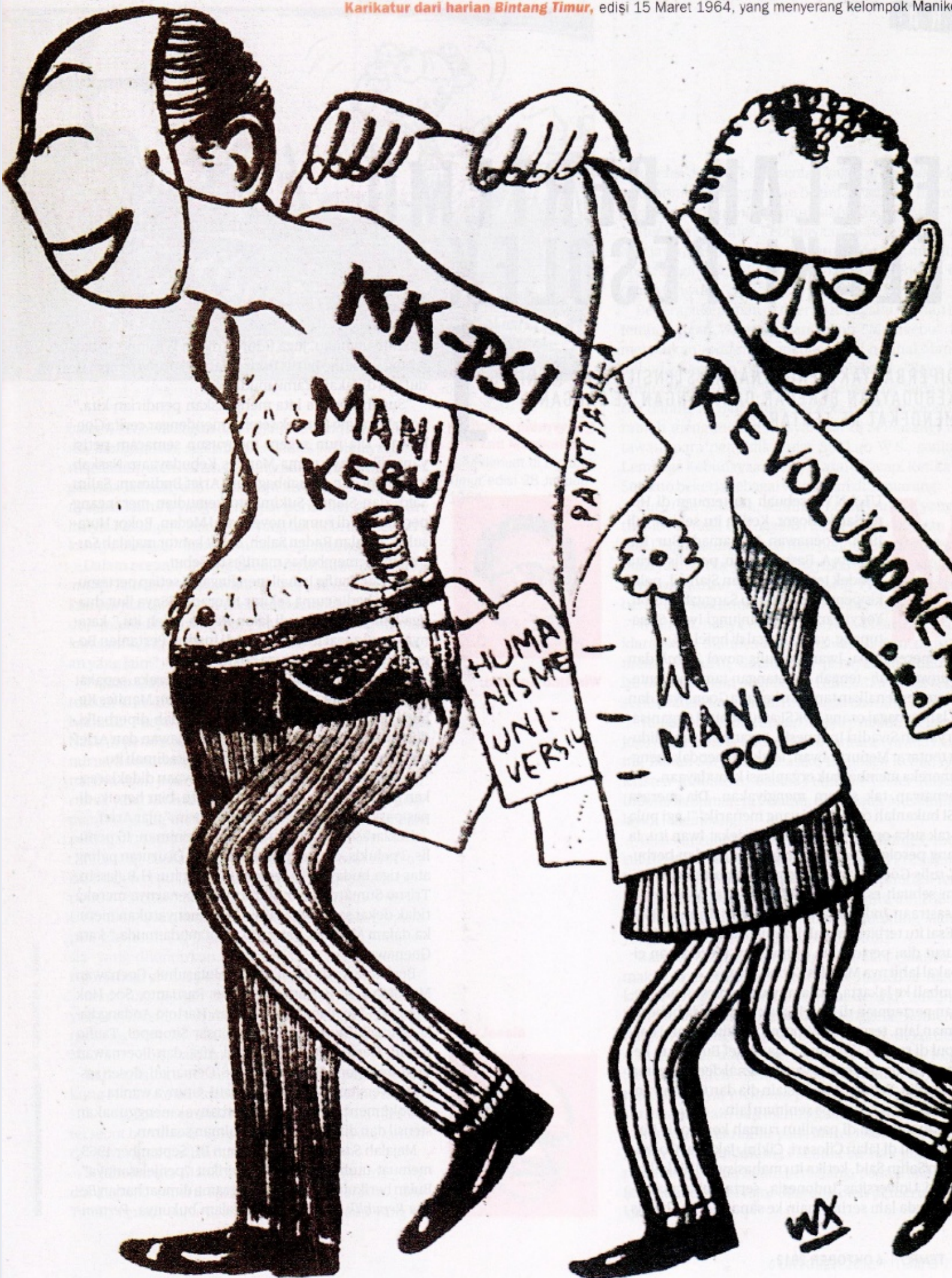


LIPUTAN KHUSUS

# SETERU YANG SENASIB

[SITUASI POLITIK YANG SERBA TERPIMPIN PADA AWAL 1960-AN MENGOMBANG-AMBIGKAN BANYAK SENIMAN. MEREKA YANG TAK INGIN DIATUR-ATUR PARTAI POLITIK MENOLAK DOGMA "POLITIK SEBAGAI PANGLIMA", DAN AKHIRNYA BERGABUNG DENGAN GERAKAN MANIFES KEBUDAYAAN. CELAKANYA, MANIFES MALAH MENGANTAR MEREKA JADI SASARAN TEMBAK PEMERINTAH SUKARNO, PARTAI KOMUNIS INDONESIA, LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT, DAN KELOMPOK PRO-MANIPOL USDEK LAINNYA. TAPI NASIB PARA PENDUKUNG "MANIKEBU" MASIH JAUH LEBIH BAIK DIBANDING SENIMAN LEKRA PASCA-6-30-S, YANG DIKEJAR-KEJAR, DISIKSA, DIPENJARAKAN, DIASINGKAN, DAN DIBUNUH.]







# SETELAH BERTEMU LELAKI PESOLEK

[ DIPERBANYAK MENGGUNAKAN STENSIL, TEKS MANIFES  
KEBUDAYAAN BEREDAR DARI TANGAN KE TANGAN.  
MENDEKAT KE TENTARA. ]

**M**ULANYA sebuah pertemuan di Hotel Salak, Bogor. Ketika itu sekitar Juli 1963. Goenawan Mohamad; Bur Rasuanto; A. Bastari Asnin, penulis cerita pendek terkemuka; dan Sjahwil, pelukis penting dari Grup Sanggar Bambu, Yogyakarta, mengunjungi Iwan Simatupang, yang tinggal di hotel itu.

Saat mereka tiba, Iwan—penulis novel *Ziarah* dan *Merahnya Merah*—tengah kedatangan tamu perlintas. Dia memperkenalkan tamu itu kepada Goenawan dan yang lain sebagai orang SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, organisasi yang didukung tentara. Menurut Iwan, lelaki itu hendak mengajak mereka membentuk organisasi kebudayaan.

Goenawan tak segera mengiyakan. Dia merasa SOKSI bukanlah organisasi yang menarik. "Lagi pula saya tak suka orang yang duduk di dekat Iwan itu. Ia seorang pesolek. Peci beludrunya tinggi dan berbunga," tulis Goenawan, mengisahkan pertemuan itu, dalam sebuah esai berjudul "Peristiwa 'Manikebu': Kesusastran Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an". Esai itu terbit di majalah *Tempo* edisi 21 Mei 1988. Menurut dia, pertemuan di hotel itu merupakan cikal-bakal lahirnya Manifest Kebudayaan.

Kembali ke Jakarta, malamnya, Goenawan menceritakan pertemuan di Hotel Salak itu kepada beberapa teman lain, terutama Wiratmo Soekito. "Kami berkumpul di rumah Wiratmo," ujar Arief Budiman, ketika itu penulis esai muda yang dikenal dengan nama Soe Hok Djini. Seingat Arief, selain dia dan Goenawan, ada Rendra dan beberapa seniman lain.

Wiratmo tinggal di paviliun rumah komponis Binsar Sitompul di Jalan Cilosari, Cikini, Jakarta. Goenawan dan Salim Said, ketika itu mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, serta beberapa seniman muda lain sering main ke sana. Mereka bebas



Wiratmo Soekito

meminjam buku, juga tidur di dipan Wiratmo. Jarang Wiratmo harus tidur di lantai karena temannya dipakai tetamu mudanya.

"Sudah saatnya kita menjelaskan pendirian ucap Wiratmo pendek setelah mendengar cerita nawan. Dia pun segera menyusun semacam yang diberinya nama Manifest Kebudayaan. Naskah itu dikopi dan dibagi-bagikan. Arief Budiman, Said, dan Slamet Sukimanto kemudian merencanakan pertemuan di rumah novelis asal Medan, Bokor Suhut, di Jalan Raden Saleh, dekat kantor majalah *Tempo*, untuk membahas manifest tersebut.

Penyair Taufiq Ismail mengingat di setiap pertemuan yang hadir cuma sekitar 10 orang. "Saya ikut tiga kali pertemuan di Jalan Raden Saleh itu," katanya. Taufiq saat itu mengajar di Institut Pertanian Bogor. Dia penyair, tapi juga dokter hewan.

Setelah beberapa kali bertemu, mereka sepakat menulis sebuah mukadimah. Sedangkan Manifest Kebudayaan buatan Wiratmo, yang sudah diperbaiki, dijadikan sebagai "penjelasan". Goenawan dan yang lain mendapat tugas merampungkan mukadimah itu.

Beres semuanya, Manifest Kebudayaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1963. "Waktu itu, biar heroik pas-paskan dengan hari kemerdekaan," ujar Arief.

Deklarasi itu ditandatangani 20 seniman: 16 penulis, 3 pelukis, dan seorang komponis. Di urutan pertama tiga budayawan terkemuka saat itu: H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan Wiratmo. Sebenarnya mereka tidak dekat satu sama lain. "Yang menyatukan mereka adalah dalam Manifest, ya, kami yang muda-muda," kata Goenawan.

Berikutnya ada Zaini, Bokor Hutasuhat, Goenawan, Mohamad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djini, D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartojo Andanegara, Sjahwil, Djufri Taanissan, Binsar Sitompul, Taufiq Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi Afri, dan Poernama Tjondronagoro. Terakhir Boen S. Oemarjati, dosen Sastra Universitas Indonesia. Dia satu-satunya wanita yang ikut.

Dokumen tersebut lalu diperbanyak menggunakan stensil dan dikirim ke para seniman sealiran.

Majalah *Sastra* edisi 9/10 tahun III, September 1963, memuat utuh teks Manifest berikut "penjelasan". Bulan berikutnya, naskah yang sama dimuat harian *Republik*. Yahaya Ismail dalam bukunya, *Perjalanan*





buhan, *Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*, mengatakan, setelah itu, Manifes Kebudayaan sering dikutip oleh harian-harian, radio, dan berbagai organisasi kebudayaan. "Akhirnya ia menjadi suatu pernyataan kulturil yang mendapat perhatian ramai," tulisnya. Kelompok-kelompok yang tak suka memelesetkannya menjadi "Manikebu" alias sperma kebo.

Dalam preambule yang cuma empat alinea, Manifes antara lain menyatakan bahwa kebudayaan merupakan perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Karena itu, "Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain."

Tujuan Manifes lebih lanjut dijelaskan oleh sebuah tulisan lain di majalah *Sastra*, tanpa nama penulis, berjudul "Sejarah Lahirnya Manifes Kebudayaan". Naskah pendamping itu dibuat oleh Goenawan. Menurut Goenawan, dasar Manifes Kebudayaan sebenarnya agak jelas: "suatu ikhtiar untuk memperoleh ruang yang lebih longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri—yang independen dari desakan politik dan pelbagai tata cara revolusioner tahun 1960-an".

Memang suasana berkesenian pada awal 1960-an itu tidak terlalu baik bagi seniman yang enggan berpolitik. Slogan Manipol Usdek-Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia—yang dilontarkan Sukarno dipaksakan menjadi rambu bagi proses penciptaan karya seni.

Seni yang sejalan dengan "garis Manipol" adalah yang revolusioner. Beberapa harian yang berani menentang dibredel. Pemimpin harian *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis, bahkan dikebloskan ke penjara.

Barangkali itu sebabnya banyak seniman mendukung Manifes. Penyair Sapardi Djoko Damono termasuk yang ikut menandatangani Manifes, saat naskah tersebut beredar di Yogyakarta. Waktu itu dia kuliah di Universitas Gadjah Mada.

Selain karena Manifes didukung nama-nama yang dia kagumi, seperti H.B. Jassin, D.S. Moeljanto, dan Taufiq Ismail, Sapardi mengaku merasa ada yang ti-

#### Karikatur menyerang gerakan Manikebu

yang dimuat di *Bintang Timur* edisi 28 Januari 1964.



H.B. Jassin



dak beres dengan berkesenian kala itu. Banyak teman agar menulis begitu dan begini. "Padahal, menulis, saya, nulis itu, ya, nulis. Untuk siapa? Ya, terserah."

Stensilan Manifes Kebudayaan beredar hingga luar Jawa, dari tangan ke tangan. Di Medan, misalnya, Sori Siregar, penulis novel dan cerita pendek, ikut tanda tangan.

Beberapa seniman di daerah mengaku pernah bertemu dengan Wiratmo dan tokoh "Manikebu" melakukan *road show*, menjelaskan perihal Manifes Kebudayaan dan humanisme universal. "Saya bertemu dengan Pak Wiratmo di Semarang pada 1964. Dia datang ke Balai Kota. Mereka bikin semacam ramah mengundang masyarakat di Semarang, wartawan, para pendidik," ujar Sutikno W.S., seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat asal Cilacap. Ketika itu Sutikno bekerja sebagai wartawan di Semarang.

Putu Oka Sukanta, seniman Lekra lainnya yang waktu itu berada di Yogyakarta, bertemu dengan Djajakusuma, tokoh film pendukung Manifes Kebudayaan. "Dia yang ke Yogyakarta. Waktu itu saya bersama Kusno Sulang dan Avip Priyatna. Djajakusuma berbicara soal humanisme universal," ujar Putu.

Walhasil, hanya dalam beberapa bulan sejak diumumkan, Manifes mendapat dukungan di mana-mana. Menurut Goenawan, pernyataan dukungan itu dikumpulkan oleh Bokor Hutasuht. "Ada sekiranya seribu tanda tangan dari berbagai daerah," katanya.

Yang mendukung bukan hanya pribadi, melainkan juga organisasi kebudayaan. Di antaranya ada Lembaga Ikatan Sarjana Pancasila, Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia, Badan Pembina Teater Nasional Indonesia Sumatera Selatan, dan Teater Muslimin Palembang.

Terus bertambahnya pendukung Manifes, menurut Arief Budiman, membuat Lekra dan Presiden Sukarno gerah. Maka mulailah terjadi intimidasi terhadap para pendukung Manifes. Lantaran itu, H.B. Jassin menghitamkan nama-nama pendukung Manifes yang telanjur dicetak di majalah *Sastra*.

Karena tekanan terhadap seniman "Manikebu" makin kuat, beberapa tokohnya mencoba masuk ke tentara. Bokor Hutasuht, dengan dukungan kenalan tentaranya kemudian menggelar Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia. Eh, di konferensi itu Manifes malah menjadi bulan-bulanan. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution, misalnya, meminta peserta konferensi menandatangani manifes lain dan meninggalkan "Manikebu".

Konferensi berakhir pada Maret 1964. Tekanan terhadap para pendukung "Manikebu" tak juga berkurang. Hingga dua bulan berselang, pada 8 Mei, Manifes Kebudayaan resmi dilarang oleh pemerintah Sukarno. ■



# PAHIT-GETIR SETELAH MENDUKUNG

**[** PARA SENIMAN YANG MENANDATANGANI ATAU MENDUKUNG MANIFES KEBUDAYAAN MENDAPAT BERBAGAI TEKANAN: DICACI-MAKI, DIPECAT SEBAGAI DOSEN, DAN TIDAK DITERIMA SEBAGAI PEGAWAI. **]**

**K**EGEMARAN Sori Siregar menonton teater menjadi tak leluasa setelah dia membubuhkan tanda tangan mendukung Manifes Kebudayaan. Ia saat itu berusia 24 tahun dan tinggal di Medan. Dia hanya berani masuk Gedung Kesenian Medan jika lampu sudah dimatikan. Jika lampu masih menyala, selalu ada orang meneriaki atau mengejeknya. "Meski saya datang setelah lampu dimatikan, tetap saja ada yang melihat dan berteriak kencang, 'Manikebu!'" kata Sori, kini 73 tahun, yang terlihat sehat.

Saat mendukung Manifes Kebudayaan, Sori bekerja sebagai Sekretaris Redaksi Mingguan *Waspada Teruna*. Selain bekerja di koran itu, dia kerap mengirim cerita pendek ke berbagai media. Salah satu karyanya pernah muncul di majalah Ibu Kota, *Aneka*, yang saat itu banyak mengulas berita film dan olahraga. Di Medan, Sori aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk teater. Pada 1962, dia bahkan terpilih sebagai aktor terbaik dalam Festival Drama Sumatera Utara II.

Sejak Presiden Sukarno melarang dan menyatakan "ganyang Manikebu karena melemahkan revolusi" pada 8 Mei 1964, kehidupan Sori berubah 180 derajat. Dia dipecat dari kantornya. Ia pun tak lagi bebas melakukan aktivitas kesenian. "Saya kembali bergantung pada orang tua, tanpa pekerjaan," ujarnya.

Bersama 22 seniman Medan, Sori Sutan Sirovi Siregar—demikian nama lengkapnya—menjadi pendukung Manifes karena setuju kesenian dan politik mesti dipisahkan. "Aktivis Lekra dan PKI menuduh kami kontrarevolusi, padahal tidak," katanya.

Sementara Sori sudah bekerja ketika mendukung Manifes, Sapardi Djoko Damono saat itu mahasiswa

wa tingkat akhir Fakultas Sastra Universitas Gadjarda Mada. Sama seperti Sori, setelah ia mendukung Manifes, berbagai tekanan datang mendera.

Sapardi ingat, beberapa waktu setelah Sukarno melarang Manifes Kebudayaan, dia tengah menyutradai pentas drama. Pentas itu hampir selesai—juga kacau-balau—karena para pemainnya, mahasiswa junior, waswas lantaran tahu sang sutradara musuh pemerintah. "Ada adegan mengangkat topi, tapi lupa dibunyikan deringnya," ucapnya.

Sapardi tertarik menandatangani Manifes Kebudayaan karena sejak awal ia menilai tidak beres bila kesenian dikaitkan dengan kepentingan politik. "Meskipun saya, *nulis* itu ya *nulis*, tidak harus diarahkan atau dipaksakan. Karena itu, saya setuju menandatangani manifesto tersebut." Saat itu, umurnya 23 tahun.

Dampak tanda tangan itu terasa setelah Sapardi lulus kuliah pada 1964. Ia tak bisa bekerja di Balai Pustaka seperti impiannya. Pemimpin Balai Pustaka melakukannya mentah-mentah. "Ngapain ke sini? Kamu akan diterima," ujar Sapardi. Ia sangat ingat kali



Sori Siregar



Taufiq Ismail





yang dilontarkan kepadanya itu. Sapardi lalu malang-melintang, bekerja apa pun, untuk mencari uang. Belakangan seorang temannya berkirim surat, menawarinya mengajar sastra Inggris di Universitas Malang Cabang Madiun. Ia pun berangkat ke Madiun.

Di lingkungan kampus, Sapardi melihat betapa kuatnya friksi di antara mereka yang berbeda keyakinan politik, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Itu terutama antara Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). CGMI memusuhinya. Namanya ditulis di tembok kampus dan kemudian ditembloki lumpur. "Saya dianggap sesuatu yang berbeda dengan yang lain," ucapnya. Meski merasa tertekan, ia terus bertahan karena kebutuhan pekerjaan untuk hidup.

Saat Orde Lama tumbang, Sapardi tetap mengajar. Pada mata kuliah sastra dunia, ia memperkenalkan para sastrawan Rusia, seperti Anton Chekhov dan Tolstoy. Tindakannya ini ternyata dicurigai aktivis kampus dari HMI, yang menuduhnya komunis. "Saya bingung. Sebelumnya saya dianggap antikomunis, tapi selanjutnya dianggap komunis. Jadi saya harus berdiri di mana?" katanya mengenang situasi sulit yang menyimpannya setelah Orde Lama jatuh itu.

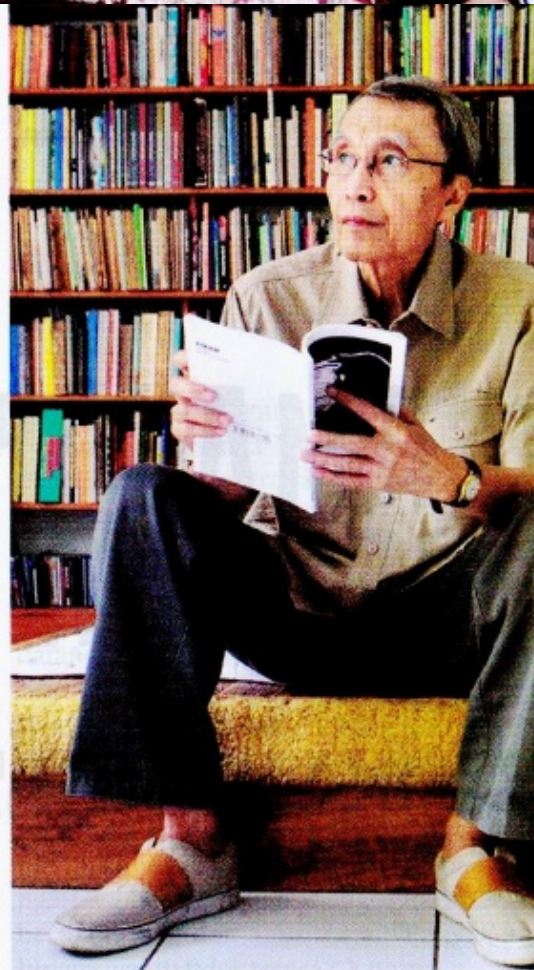
Sama seperti Sapardi yang tak bisa meraih keinginannya bekerja di Balai Pustaka, Taufiq Ismail kehilangan kesempatan kuliah di Amerika Serikat lantaran menandatangani Manifes Kebudayaan. Ketika mendukung Manifes, ia bekerja sebagai dosen Institut Pertanian Bogor. Kala itu, ia bersiap-siap melanjutkan studi S-2 di Kentucky University. Taufiq mendapat beasiswa untuk belajar ilmu peternakan di sana.

Dukungan terhadap Manifes membuat Taufiq diberhentikan sebagai dosen. "Otomatis beasiswa saya hilang karena sudah tak terdaftar sebagai dosen," tuturnya. Pemecatannya sebagai dosen terjadi tiga bulan setelah Presiden Sukarno melarang gerakan Manifes Kebudayaan. Taufiq terhitung aktivis gerakan itu. Ia ikut rapat dan merumuskan Manifes, yakni di sebuah rumah di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Usianya saat itu 29 tahun.

Di kampus, para mahasiswa kerap mengejeknya dengan teriakan "Manikebu" berulang-ulang. "Anak-anak kiri berteriak 'Manikebu' setiap bertemu dengan saya," ujarnya. Masa penuh tekanan berbaur dengan kisah percintaannya yang berakhir kelam. "Pada saat yang sama, saya putus cinta dengan pacar. Bayangkanlah kondisinya saat itu."

Sejak kehilangan pekerjaan, Taufiq banting setir menjadi pedagang batik. Dia pulang ke rumah orang tuanya di Pekalongan untuk mengambil batik dan menjualnya di Jakarta. "Setiap kembali ke Jakarta, saya membawa dua-tiga kodi kain batik," ujarnya.

**Sapardi Djoko Damono**, Desember 2009.



Pekalongan yang memiliki murid ribuan. Beridnya banyak yang berdiam di Jakarta, Bekasi. Ke sanalah Taufiq menjajakan batik yang saya tawarkan, mereka terharu dan membeli," katanya.

Dari berdagang batiklah Taufiq bertahan. Dia indekos di Jakarta dan melanjutkan aktivitasnya melawan pemerintah Orde Lama. Berjumlah temannya, Taufiq membuat berbagai tulisan yang isinya mengkritik Orde Lama. Aktivitasnya itu terutama di tempat para seniman berkumpul, di Jalan Raden Saleh dan Bayu. Selama dua tahun ia menjadi pedagang "batik getan". Setelah Orde Lama jatuh, ia mendapatkan bekerja di Dewan Kesenian.

H.B. Jassin (almarhum) juga merasakan getir akibat mendukung Manifes Kebudayaan.ecat dari tempatnya bekerja, Lembaga Bahasa, teman Pendidikan dan Kebudayaan, dan seniman Universitas Indonesia.

Sejak 1962, Pramoedya Ananta Toer dari Kebudayaan Rakyat dan Jassin bersitegang. wnat majalah *Lentera*, menuduh novel Hamka *lamnya Kapal Van Der Wijck*, merupakan plagiarisme karya pengarang Arab, Manfaluthi. Jassin, pemimpin majalah *Sastra*, membela Hamka dan menerbitkan terjemahan asli karya itu.

Ketegangan Pram dan Jassin terus berlanjut ga lahirnya Manifes Kebudayaan. Dalam wawancara dengan majalah *Tempo* pada 10 Mei 1999, Pramoedya menjelaskan sikapnya terhadap para pendukung Manifes Kebudayaan. "Saya cuma membuat polemik dengan menulis. Yang tidak setuju, ya, *minggir* saja. Saya kan dalam keadaan bahaya."



# SULAMAN PUISI DI CELANA DARI PENJARA

**[** PENJARA DAN PULAU BURU TAK MENGEKANG  
SEMANGAT MEREKA BERKARYA. MENYIASATI HIDUP  
DENGAN MENYAMARKAN NAMA. **]**

**H**ARI itu, 1 Oktober 1965, Putu Oka memasuki kelas tempat dia mengajar, Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembangunan dan Pendidikan. Sekolah tersebut terletak di Jalan Toko Tiga, Tambora, Jakarta Barat. Putu, 26 tahun, heran hanya ada murid segelintir di kelasnya.

"Shi (guru) tidak tahu? Semalam terjadi kup," ujar Putu menirukan ucapan Mei Lan, muridnya, 48 tahun silam. Guru bahasa Indonesia itu makin bingung dan balik bertanya arti "kup". "Jenderal Nasution mengambil kekuasaan," sang murid menambahkan.

Tentu itu keterangan tak benar. Saat itu belum jelas apa yang terjadi. Belakangan baru diketahui, dihari itu Letnan Kolonel Untung memimpin pasukan menculik enam jenderal dan satu perwira muda Angkatan Darat dengan alasan melindungi Presiden Sukarno dari rencana kudeta.

Jenderal Abdul Haris Nasution, saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan, lolos dari penculikan. Sejumlah pemimpin Partai Komunis Indonesia terlibat Gerakan 30 September tersebut. Angkatan Darat, di bawah Jenderal Soeharto, menyatakan PKI dan sederet organisasi di bawahnya sebagai musuh negara.

Tanpa menyadari hal yang terjadi sebenarnya, Putu menuju tempat kongko favorit aktivis Lembaga Kebudayaan Rakyat di Jalan Cidurian, Menteng, Jakarta Pusat. Tempat itu kosong.

Tiga bulan kemudian, Putu diberhentikan dari sekolah tanpa alasan. "Tapi kami paham kami jadi orang yang diburu," katanya. Itu jelas karena terkait dengan kegiatannya di Cidurian. "Lekra dicap sebagai PKI," ujarnya.

Merasa tidak bersalah, Putu tidak ke mana-mana. Dia menggunakan pesangon yang diberikan sekolah



**Putu Oka Sukanta**

untuk membuka warung kelontong di rumah pangannya—bekas kantor surat kabar *In Hoan* lan Mangga Besar Raya 101. Tanpa diduga, pada 1966, sekelompok tentara menggerebek rumah. Dia ditangkap. Semua barang dagangannya dia dengan alasan sebagai barang bukti. "Seorang ra memenuhi kantong-kantong bajunya dengan kecap dagangan saya," kata Putu, kini 74 tahun.

Selama empat bulan dia ditahan di Markas Komando Distrik Militer Jakarta Pusat, Jalan Budi Kemuliaan. Putu diinterogasi seputar keberadaan Joebaar, Sekretaris Umum Lekra, yang buron. Gebukan senjata jadi makanannya sehari-hari. Penyiksaan berlanjut hingga Putu dipindahkan ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

Di Salemba, dia kembali diinterogasi. Seorang sa dengan titel sarjana muda menuding puisi Putu menghasut pembaca untuk memberontak. "Puisi saya yang mana? Saya yang tahu puisi, Bapak," ujar Putu. Sang jaksa menggebrak meja memintanya masuk sel. Selama sepuluh tahun berikutnya, Salemba jadi rumah Putu. "Begitu saya tidak pernah ada sidang," katanya mengenang.

Saat Putu menjalani hari-hari di Salemba, rumahnya di Cidurian, Sutikno Wirawan Sigit, jadi pelindung. Penyair itu berganti-ganti "peran", dari penjaja kopi sampai tukang batu. Dua kali sepekan, dengan disamarkan, Sutikno mengirimkan tulisannya ke rumah Dwi Warna. "Saya lihai, baru tertangkap April 1966," ucap Sutikno, kini 74 tahun, terkekeh.

Sutikno dibekuk tentara di rumahnya di Jalan Cidurian, Cidurian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia ada tetangga yang mengenalinya sebagai "Putu Oka Lekra". Dia dibawa ke Gang Buntu di kawasan Cidurian Lama, Jakarta Selatan, bekas studio film aktor Tan Tjeng Bok yang disulap jadi rumah tahanan oleh tentara. "Ya digebukin di sana," katanya.

Empat bulan di Gang Buntu, Sutikno dibawa ke Rumah Tahanan Salemba. Lalu ia dipindahkan lagi ke penjara Tahanan. Dia mengaku hasratnya menulis saat itu tertahan. "Tapi dilarang menulis. Kalau melanggar, hukuman bisa ditambah," ujarnya. Penulisan kertas merupakan barang haram di penjara.

Itu membuat Sutikno "menulis" puisi di dalam





Puisi itu lalu dihafalkan atau dinyanyikannya dalam hati. Ada juga yang kemudian, agar tak ketahuan, ia sulam di ujung celana atau punggung bajunya. Sutikno beruntung mendapat benang dan jarum peninggalan temannya sesama tahanan. Beberapa puisinya yang disulam itu ada yang lolos dari sensor penjaga. Ini salah satunya:

#### **Sonata untuk Iwan-ku**

...  
iwan o iwanku  
alangkah manis warna matahari  
yang mengintip dari terali jendelaku

wahai, kalaulah langit-langit tidak serendah ini  
dan dinding-dinding  
tidak membingkai kelam warna dan pengap udara  
...  
dan burung-burung pun riang bernyanyi, manisnya  
mengubur gemerincing kunci

(1970-Salemba)

Pada 1971, Sutikno dipindahkan ke Buru, pulau seluas 8.400 kilometer persegi di Kepulauan Maluku, yang jadi tempat pembuangan tahanan politik Orde Baru. Di sana ada 30 unit rumah tahanan, masing-masing berkapasitas 500 orang. Tidak diketahui jumlah aktivis Lekra yang dibuang ke sana. Yang jelas ada sederet nama seniman terkenal, seperti Bachtiar Siagian (Ketua Lembaga Film Indonesia) dan Pramodya Ananta Toer (Wakil Ketua Lembaga Sastra Indonesia). Dua institusi itu ada di bawah Lekra.

"Di Buru ada kebebasan," kata Sutikno. Karena itu, semua sajak yang ia ciptakan di penjara Jakarta "ditumpahkan" di Buru. Sutikno akhirnya menciptakan banyak puisi, 29 di antaranya dibukukan tiga tahun lalu dengan judul *Nyanyian dalam Kelam*.

Gregorius Soeharsojo Goenito, aktivis Lekra di Surabaya, membenarkan mereka bisa berkarya di Buru. "Bahkan di sana ada gedung pertunjukan," ujar Gregorius, 77 tahun. Hanya, karena perlengkapan terbatas, mereka mesti kreatif. Untuk mementaskan ludruk, misalnya, para seniman itu menggunakan

#### **Tahanan politik**

Pulau Buru tiba  
di Surabaya, 1977.

drum sebagai pengganti gamelan. Jika ada pemementaran drama, biasanya "pemegang kendali" acara Bachtiar Siagian, sutradara peraih Piala Citra 1960.

Pernah juga di Buru digelar konser mini yang menampilkan orkestra terdiri atas 20 pemain biola dan gitar. Gitar dibuat di sana karena ada tahanan yang nyata lihai membuat alat musik itu, sementara biola datang dari Jawa. Penontonnya bukan hanya sesama tahanan, melainkan juga warga setempat, penjaga, dan "petinggi"—para pejabat—penjara Pulau Buru. "Kalau sudah begitu, banyak pejabat yang tidak berani beranjak dari tempat duduknya," ucap Gregorius.

Di Pulau Buru, Gregorius, misalnya, biasa melukis. Lukisannya kemudian ia barter kepada penjaga dengan tembakau. Ia juga mengisi hari-harinya dengan bermain bola dan tenis meja. "Banyak kegiatan hingga waktu tidak terasa," katanya.

Putu Oka mengenang, saat di penjara namanya "memanjang" jadi Putu Oka Sukanta. "Kata orang yang menginterogasi, harus ada 'bin'-nya. Saya ingat leluhur yang namanya Sukanta," ujarnya. Nama bapaknya itu datang hampir bersamaan dengan keahlian anjing yang ia dapat: teknik penyembuhan ala Cina. Ceritanya, di Salemba, Putu satu sel dengan Lee Chuan Sin. Sinse itu menurunkan ilmu akupunktur hingga safah *yin-yang* yang juga mengajarkan keseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Awalnya yang diajarkan totokan. Lalu meningkat: mencocokkan jarum tubuh. "Teman membuatkan jarum dari senar gitar yang diasah di batu," ucapnya.

Setelah Putu keluar dari Salemba pada 1976, akupunktur menjadi sumber penghidupannya. Ia kemudian mendalami ilmu ini hingga ke Hong Kong. Sekarang, Putu masih membuka praktek di Jalan Bakti, Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sutikno tidak seberuntung Putu. "Saya cuma menulis," katanya. Selepas dari Buru pada 1979, ET alias eks tahanan politik di kartu tanda penduduknya ditolak di mana-mana. Lalu ia memutuskan untuk hanya menggunakan nama belakang. Maka namanya yang muncul "S. Wirawan Sigit". Lisansinya dengan nama ini muncul terutama pada rita anak-anak di majalah *Kawanku* dan *Tomtom*. Lisansinya ini mendapat honor Rp 15 ribu. "Saya butuh laporan tulisan per bulan untuk bisa bertahan hidup bersama istri dan dua anak," ujarnya.

Dua tahun kemudian, noveletnya dimuat di berita terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul *Anak Republik*. Belakangan Sutikno mengajak seorang teman menjadi wartawan di majalah *Poultry Indonesia*. "Saya tidak tahu soal peternakan tapi karena butuh uang, saya terima," katanya. Ia kemudian menjadi pemimpin umum di majalah yang kantor di Mangga Dua, Jakarta Utara, itu. ■



# MATI SUNYI PENCIPTA GENJER-GENJER

[IA BERKARYA SEJAK ZAMAN JEPANG. BANYAK MEMBUAT LAGU MARS.]

*Genjer-genjer nong kedokan pating keleler  
Emake thole teko-teko mbubuti genjer....*

**L**AGU *Genjer-genjer* adalah potret Banyuwangi yang miris. Dari daerah yang surplus pangan sejak era Majapahit, Banyuwangi jatuh menjadi daerah kurang pangan saat pendudukan tentara Jepang mulai 1942. Kaum pria harus menjalani kerja paksa, meninggalkan sawah-sawah yang tak tergarap. Untuk bahan pangannya, masyarakat pun mengolah daun genjer (*Limnocharis flava*), tanaman pengganggu yang sebelumnya hanya untuk pakan ternak.

Kala itu, Muhammad Arief, seniman Banyuwangi, menyuarakan kondisi tersebut dengan mengubah lagu *Genjer-genjer* dari lagu dolanan setempat. Mengubah lirik sang lagu, dia mengajukan protes terhadap pendudukan Jepang sambil menggambarkan betapa pahitnya Banyuwangi saat itu.

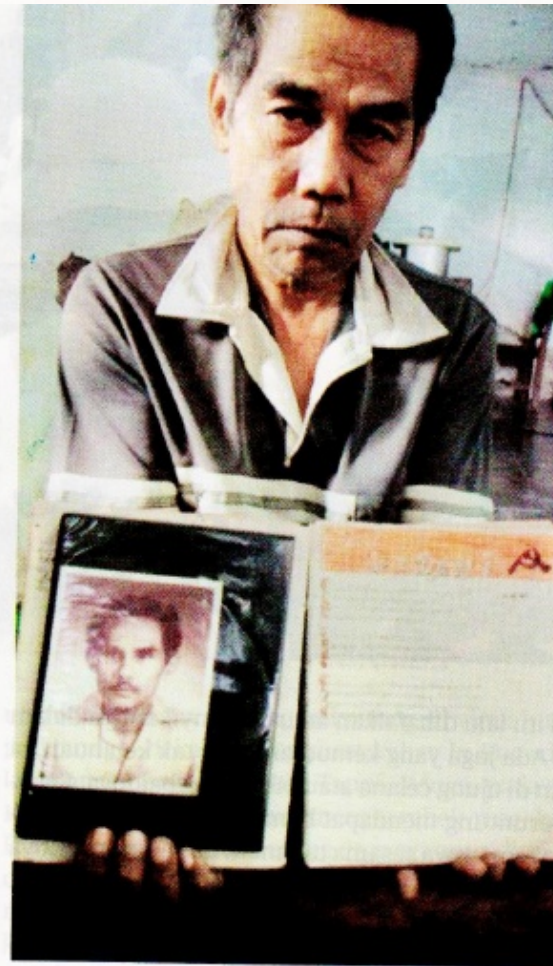
Dalam perkembangannya, lagu yang meminjam melodi dari dolanan *Tong Alak Gentak* ini diidentikkan dengan Partai Komunis Indonesia. "Lagu *Genjer-genjer*, lagu rakyat yang diangkat oleh Njoto itu, sangat penting," kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Syahdan pada 1962, Njoto, seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat yang juga tokoh PKI, terpikat mendengar *Genjer-genjer* ketika singgah di Banyuwangi dalam perjalanannya ke Bali. Tak lama kemudian, lagu sederhana ini mencapai popularitas yang mengesankan: sering diputar di RRI dan ditayangkan di TVRI.

Bahkan, di bawah label Irama Records, penyanyi kondang era itu, Lilis Suryani dan Bing Slamet, mere-

## Sinar Syamsi

menunjukkan naskah asli *Genjer-genjer* dan foto ayahnya, Muhammad Arief, pencipta *Genjer-genjer*, 16 September lalu.



kam lagu ini pada 1965 dalam bentuk album koleksi *Mari Bersuka Ria*. Inilah popularitas yang membungkan nama penggubahnya: Muhammad Arief.

Muhammad Arief adalah petani dan seniman angklung yang pandai mencipta lagu di Banyuwangi setelah Indonesia merdeka, ia bergabung dengan Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi yang didirikan A Sjarifuddin, yang kemudian menjadi Pemuda Rakyat. Pada 1950-an, dia masuk Lekra dan menjabat ketua bidang kesenian. Setelah pemilihan umum pertengahan 1955, Arief diangkat sebagai anggota legislatif menggantikan wakil dari perwakilan seniman.

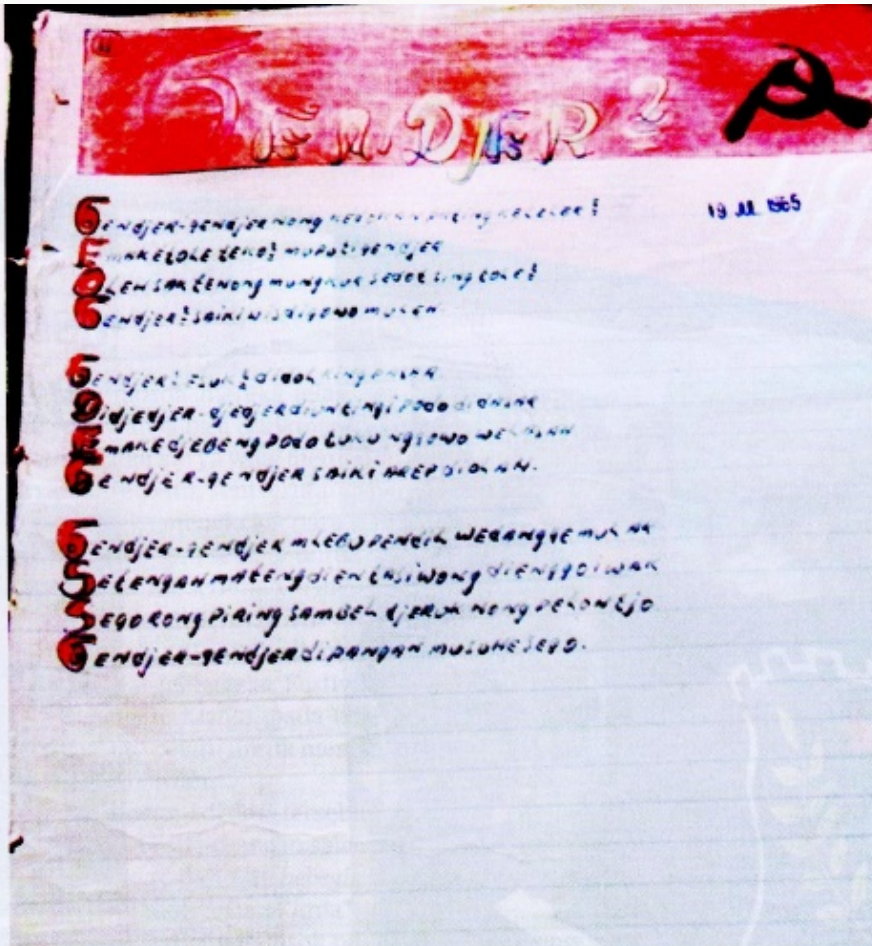
Sejak bergabung dengan Lekra, Arief mendirikan grup angklung Srimuda—kependekan dari Seni Rakyat Indonesia Muda. Anggotanya 30 orang, terdiri atas pemain angklung, pesinden, dan penari. Srimuda berlatih setiap hari di rumah Arief, kala itu di Jalan Kyai Saleh Nomor 47, Kelurahan Temenggungan.

"Kalau latihan mulai sore sampai malam," ujar Sinar Syamsi, 60 tahun, anak Arief, kepada *Tempo*, 16 September lalu, di rumahnya di Jalan Basuki Rahma, Banyuwangi.

Srimuda cukup terkenal dan sering mengisi acara politik PKI di Surabaya, Jakarta, dan Semarang—dengan "lagu wajib" *Genjer-genjer*. Dalam perhelatan perhelatan PKI, syair lagu ini acap kali disesuaikan dengan propaganda partai.

Andang Chatib Yusuf, 79 tahun, bekas Ketua Karang Sastra Lekra, menyebut Arief sebagai perintis musik tradisional Banyuwangi. Sebelum karya-karya Arief, kata Andang, lagu Banyuwangi masih kental dengan seni tradisional klasik, yang berasal dari gending-gending tarian Gandrung sebelum awal abad ke-19.





Arief komponis yang produktif. Dia menggubah sejumlah mars paduan suara, seperti *Ganefo*, *Lekra*, *Aksi Tani*, dan *Harian Rakjat*. Pada 1940-an, Arief menciptakan lagu-lagu kritik sosial dan memadukannya dengan angklung. Selain *Genjer-genjer*, dua lagu lain karya Arief yang terkenal adalah *Nandur Jagung* dan *Lerkung*. "Ini juga ditulis saat pendudukan Jepang," ucap Andang.

Selain menyumbang lagu, Arief berjasa mempopulerkan seni angklung. Setelah mendirikan Srimuda, ia membentuk kelompok kesenian angklung di hampir semua desa. Saat itu, antusiasme masyarakat Banyuwangi sangat tinggi. Setiap kali ada tokoh PKI, seperti Njoto dan D.N. Aidit, datang, kata Andang, kelompok Srimuda selalu tampil menjadi penarik massa.

Kesenian angklung pun menjadi semacam alat propaganda dan kunci keberhasilan PKI di Banyuwangi. Jenis seni lain, seperti teater dan sastra, saat itu juga berkembang pesat, "Tapi tak sefenomenal angklung," ujar Andang. Seni angklung baru meredup bersamaan dengan runtuhnya PKI. Para senimannya diburu dan dibunuh, tak terkecuali Arief.

\*\*\*

SYAMSI ingat benar kejadian itu. Suatu siang pada Oktober 1965, sekelompok orang yang beringas menyerbu rumahnya. Arief, ayahandanya, sempat menyelip keluar, menyelamatkan diri bersama istrinya, Sayekti, dan Syamsi, yang saat itu berusia 11 tahun. Dua jam berselang, setelah kondisi mereda, mereka pulang dan mendapati rumahnya hancur. Hanya tersisa ratusan buku dan naskah lagu yang tertindih puing-puing.

Sadar bahwa ancaman belum berlalu, Arief berpacu ke rumah istrinya, kemudian keluar dari rumah

**Notasi asli *Genjer-genjer*** yang ditulis Muhammad Arief.

lagi. Istri dan anaknya mengumpulkan buku-buku koleksi. Demi keamanan, mereka membakar buku-buku beraliran kiri. Buku tulis berisi lagu-lagu yang tersisa.

Esok harinya, Syamsi mendengar kabar bahwa ayahnya ditangkap tentara dan ditahan di markas polisi militer. Bersama ibunya, dia sempat menjenguk. Ruhnya, ini pertemuan keluarga terakhir. "Saat itu, Bapak berpesan supaya saya rajin belajar," kata Syamsi.

Berikutnya, Syamsi mendapat kabar ayahnya ditahan di Kalibaru, perbatasan Banyuwangi dan Jember. Berbekal satu rantang makanan, dia berniat menjenguk ke Kalibaru menggunakan kereta api. Syamsi diminta menemui seorang keturunan Cina bernama Swan, yang kemudian memberi tahu bahwa ayahnya sudah dipindahkan ke Malang dan tak kembali lagi ke Banyuwangi. "Saya langsung menangis histeris," kata Syamsi.

Arief sempat ditahan di Lowokwaru, Malang, sebelum sel dengan Andang Chatib Yusuf, sejawatnya di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Menurut Andang, Arief tak banyak bicara, lebih sering termenung dengan pandangan kosong. Seperti diungkapkan kepada Andang, Arief ternyata memikirkan nasib anggota grup angklung yang tersebar di desa-desa.

Dua bulan mendekam di Lowokwaru, Arief, yang ketika itu berusia 60 tahun, masuk daftar orang yang akan dibawa pergi. Sebelum pergi, Andang meminta maaf, Arief mendekati beberapa orang, termasuk Andang, lalu berkata, "Saya tak ada harapan lagi. Mati mungkin hanya saya rasakan 5 atau 10 detik. Selanjutnya saya serahkan kepada kalian." Semua terdiam, Arief keluar dari sel dan tak pernah kembali.

Arief terbungkam selama-lamanya. Karya-karyanya pun membeku sekian lama. Lagu *Genjer-genjer* dilarang sejak Orde Baru berkuasa.

Kini jejak Arief dan karyanya masih dijaga keluarga. Awal September lalu, kepada *Tempo*, Syamsi memperlihatkan peninggalan komponis ini. Dibungkus kantong plastik putih, tiga buku tulis lusuh memancarkan bau debu menyengat. Warna kertasnya memudar kecokelatan, tapi tulisan tangan di dalamnya masih terbaca jelas. Isinya ratusan lirik lagu dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah Using, lengkap dengan notasinya.

Pada salah satu buku, di lembar kesebelas, judul "*Gendjer-gendjer*" tertulis dengan tinta merah. Di sampingnya tergambar palu-arit—lambang PKI. Ditulis dalam bahasa daerah Using, *Genjer-genjer* berisi bait, masing-masing terdiri atas empat baris.

*Genjer-genjer mlebu kendhil wedang gemulak  
Setengah mateng dientas yo dienggo iwak....*





# BUKAN AHLI WARIS, HANYA TERILHAMI

**[** TARING PADI DAN JAKER MENGHIDUPKAN DAN MENGEMBANGKAN GAGASAN KEBUDAYAAN LEKRA. TURBA DENGAN MENGHIDUPKAN KESENIAN DI DESA. **]**

**D**INDING sepanjang 12 meter digedung serbaguna Dusun Sembungan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, itu semarak dengan aneka gambar. Orang, misalnya, bisa mengenali gambar petani, buruh bangunan, hingga bajak laut bergaya Si Buta dari Goa Hantu.

Sederet slogan yang ditempel di tembok ikut meminta perhatian. Misalnya "Bersatu dalam Perbedaan"; "Sehat Semangat Guyub Rukun"; dan "Berdamai dengan Alam". Tentu ada alasan kenapa semua tema itu dipilih oleh para kreatornya yang ter-

**Deklarasi** Lembaga Budaya Taring Padi, 1994.

gabung dalam sanggar Taring Padi. "Rakyatlah yang menginspirasi kami," kata Muhammad Yusuf, salah seorang pendiri Taring Padi, kepada *Tempo*, dua minggu lalu.

Taring Padi dibentuk mahasiswa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia pada 21 Desember 1998. Mereka ingin meniupkan kembali napas "budaya kerakyatan" yang disuntik mati Soeharto di era Orde Baru.

Nama Taring Padi dicomot dari bahasa Minangkabau yang merujuk pada duri lembut di ujung bulir gabung. Meski kecil, jika mengenai tubuh, duri itu menyebabkan gatal-gatal. "Taring Padi berarti kerja kecil लेकिन karya yang bisa bikin gatal," ujar Yusuf.

Bersama penggagas lainnya, seperti Dodi Irwanto, Samsul Bahri, dan Yustoni Voluntero, mereka berpakat mengusung seni kerakyatan. Saat Taring Padi didirikan, jumlah anggotanya 15 orang. Kini seniman yang bergabung sudah berlipat.

Yusuf tak tahu persis berapa jumlah pasti anggota Taring Padi. Maklum, mereka tak punya struktur organisasi. Mereka juga tak perlu kartu anggota.



Namun filosofi mereka jelas: seni bukan barang elite yang hanya bisa dinikmati di ruang-ruang galeri. Seni adalah karya yang membumi dan melibatkan rakyat. Karena itu, seni terutama harus kritis, bukan puitis. Mereka mengkritik para seniman yang mengusung konsep seni semata untuk seni. Konsep ini dinilai mengurung seniman di menara gading yang terpisah dari rakyat. Seni dan rakyat seharusnya satu.

Konsep seni untuk rakyat ini pertama kali mereka terapkan saat menggelar Festival Memedi Sawah di Desa Delanggu, Klaten, pada 1999. Saat itu, mereka "menghasut" petani untuk menolak penggunaan bahan kimia di sawah.

Bersama petani di desa tersebut, mereka membuat *bebegig* atau orang-orangan sawah, kemudian mengarakannya. Pada salah satu *bebegig* itu ditempel poster bertuliskan "Emoh Bahan Kimia".

Mereka juga melukis sosok puluhan petani mengacungkan tangan pada sebuah poster besar. Di bagian atas poster itu tertera kalimat: "Rebut Kembali Hak Rakyat atas Pengembangan Kebudayaan Rakyat".

Setelah kegiatan itu, karya mereka membanjir di berbagai medium dan di banyak tempat. Ada di baliho-baliho, poster cukil kayu, dan mural-mural di sudut kota. Salah satunya menghiasi gedung serbaguna di Dusun Sembungan itu.

Penulis buku *Taring Padi: Seni Membongkar Tirani*, Kiswondo, menilai para seniman Taring Padi tak hanya mengkritik seniman penganut paham seni untuk seni, tapi juga menghantam militer. Mereka selalu menggambarkan militer sebagai manusia berkepala anjing, lengkap dengan sepatu lars dan seragam loreng. "Mereka menggunakan ekspresi apa pun untuk menyuarakan ketertindasan," kata Kiswondo.

Heidi Arbuckle dalam buku *Taring Padi: Praktik*

**Pameran terakhir**  
yang diselenggarakan  
Jaringan Kerja  
Kebudayaan Rakyat,  
1994.



*Budaya Radikal di Indonesia* menilai sikap kritis seniman-seniman Taring Padi membuat karya mereka sarat nuansa politis. Karya mereka mirip propaganda, meski dalam keseharian jauh dari politik.

Gagasan seni yang diusung Taring Padi ini tentu mengingatkan pada paham yang dianut Lembaga Kebudayaan Rakyat pada 1960-an. Menurut Sutikno W.S., penyair Lekra, setiap ekspresi Lekra pasti bercerita tentang rakyat. Ia mencontohkan, Lembaga Tari Lekra Jawa Tengah pernah menciptakan *Blonjo Urung* pada 1963. Tarian itu mengisahkan rakyat yang susah. "Mereka mau pergi ke pasar tapi jadi belanja karena tak punya uang," ujar Sutikno.

Yustoni Volunteero mengakui mereka belajar dari Lekra. Selain gagasan seni untuk rakyat, mereka mengadopsi konsep turun ke bawah atau turba. Di antara para seniman Lekra harus hidup bersama rakyat beberapa waktu, sebelum berkarya. Taring Padi melakukan hal yang sama, tapi menyebutnya Live In.

Meski begitu, Yustoni emoh komunitasnya dianggap sebagai ahli waris Lekra. Alasannya, mereka terlibat politik praktis. "Kami independen," katanya.

Komunitas seni lain yang terinspirasi dari Lekra adalah Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau biasa disebut Jaker. Salah seorang pendirinya, Moelyono mengatakan sejumlah pentolan Jaker bahkan sempat belajar langsung dari seniman Lekra.

"Dulu Widji Thukul pernah mengajak saya ketemu Mas Pram (Pramoedya Ananta Toer) di rumahnya. Kami bertanya apa itu Lekra," ucap Moelyono. "Di situ kami mendapat inspirasi bagaimana menghidupkan jaringan."

Dari Lekra, mereka juga mempelajari gagasan seni untuk rakyat dan konsep turun ke bawah. Namun, mereka tak menelan mentah-mentah gagasan tersebut. Moelyono mencontohkan, konsep turba yang dipraktikkan para seniman Lekra masih perlu dikritik. Sebab, mereka hanya turun ke desa, kemudian membuat karya. "Seharusnya seniman juga menghidupkan kesenian di desa dan memfasilitasi rakyat untuk menumbuhkan kesenian mereka sendiri."

Seperti Taring Padi, Jaker enggan disebut ahli waris Lekra. Apalagi, kata Moelyono, Jaker juga belajar dari beberapa forum kesenian lain. "Kami juga terinspirasi Asian Council for People's Culture," ujarnya.

Bertahannya gagasan seni rakyat ala Lekra, menurut Putu Oka Sukanta, salah satu seniman Lekra, merupakan bukti bahwa filosofi Lekra mengenai seni masih terus hidup.

Putu mengaku tak tahu banyak mengenai komunitas seni sekarang, yang mungkin terinspirasi dari Lekra. Hanya, satu hal ia yakini, "Sebagai organisasi Lekra mungkin sudah mati. Tapi, sebagai roh, ia tetap hidup." ■



# ESTETIKA SENI RUPA LKRA

**P**ELUKIS Kaboel Suadi (1935-2010)—yang pada 1964 bersama sejumlah rekan sejawatnya di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung menyiarkan dukungannya kepada kubu Manifes Kebudayaan—pernah meneliti seni rupa Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Saat itu, pada awal 1990-an, sebagai mahasiswanya, saya sering berbincang-bincang terkait dengan prinsip estetika seni rupa yang dianut seniman-seniman Lekra. "Masalahnya," kata Kaboel, "analisis terhadap estetika seni rupa Lekra akan menemukan jalan buntu. Lukisan, ilustrasi, karikatur, gambar, cukilan kayu, baliho, poster, patung, dan aneka karya Lekra lainnya sudah terkunci rapat-rapat. Saya tidak yakin generasi di masa depan bisa melihatnya lagi."

Tebakan almarhum benar. Kini di mana kita bisa melihat barisan lengkap hasil karya seni rupa seniman Lekra? Barang dua, tiga, atau empat buah mungkin bisa kita jumpai di museum dan Istana Presiden. Itu pun mata kita harus jeli mengeja tahun pengerjaannya. Lukisan-lukisan Trubus, Basuki Resobowo, Affandi, Hendra Gunawan, atau S. Sudjojono yang dikerjakan pada 1948, misalnya, sudah barang tentu tidak relevan mewakili seni rupa Lekra, yang berdiri pada Agustus 1950. Lalu saya bertanya, "Apakah muatan karya-karya Lekra sepenuhnya propaganda politik dan ideologi?" Yang saya ingat, Kaboel menjawab, "Tidak juga. Banyak karya mereka yang masih memperlihatkan kekuatan artistik dan menawarkan nilai estetika."

Kajian atas seni rupa Lekra harus dibedakan dengan kajian terhadap produksi karya-karya lain, seperti sastra, musik, gambar, dan seni pertunjukan. Semua itu tak bisa dipukul rata. Dalam kajian ini juga dibedakan antara kategori "gaya/style", yang mengulas soal elemen visual, teknik, jenis, serta metode melukis, dan "estetika", yang lebih membahas soal falsafah/teoretisasi seninya.

Estetika seni rupa Lekra sendiri secara spesifik menyimpan persoalan yang sangat rumit. Kita tak bisa

menjuruskannya ke satu dimensi saja dan langsung mengerti. Kenyataan ini disebabkan cara kita menilai estetika seni rupa Lekra belum sepenuhnya terbebaskan dari konstruksi sejarah, memiliki kepentingan politik. Kita ketahui, dalam tulisan sejarah seni rupa Indonesia, tema-tema rakyat dan keseharian yang lazim dimaknai sebagai "Realisme", yang direkam para pelukis Lekra dalam kanvas-kanvas mereka, sering kali dijadikan parameter tunggal penilaian. Cara pandang ini menyesatkan. Sering diasumsikan pula bahwa seni rupa Lekra melulu bermuatan agitasi dan propaganda. Sampai di sini, saya ingin mengatakan bahwa kita masih kesulitan dalam membedakan disiplin nologi estetika, teknik, dan medium dalam seni rupa. Faktanya, dalam kajian seni rupa, hal-hal itu memiliki cakrawala yang luas.

\*\*\*

DALAM bekerja, imaji pelukis Lekra dibedakan tak cuma doktrinal organisasi semata. Corak, gaya, dan suasana keseharian, ataupun potret diri, bagaimana terlihat dalam lukisan-lukisan mereka menunjukkan bahwa Lekra, baik sebagai organisasi maupun gerakan kebudayaan, toleran dengan "kepribadian individu" sang pelukis. Perhatikan laporan pameran seni rupa di berbagai cabang pada medio 1950-an yang tercatat dalam majalah kebudayaan. Pada masa ini seorang Tri Mardjo masih mengagumi pencapaian estetika dalam lukisan Trubus, *Main Biola*, yang jauh dari kesan propaganda.

Dari situ pula kita bisa membayangkan betapa luasnya para pelukis Lekra "melukiskan apa yang dialami", kata S. Sudjojono di tengah Konferensi Seni Rupa cabang Yogyakarta, "Ditujukan untuk memperbaiki hidup dan kehidupan manusia." Bahkan janji mukadimah pun dimaklumkan bahwa Lekra menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya seni rupa selama ia mengusahakan keindahan artistik yang tinggi-tingginya. Tapi kaum seniman yang ber-



kanan ragu: sungguh tuluskah maklumat ini? Mereka mencurigai, pada tahap-tahap awal, organisasi ini memang tak akan memaksakan paham mereka. Ceritanya menjadi lain bila tujuan jangka panjang mereka sudah tercapai. Besar kemungkinan terjadi pemaksaan untuk memberlakukan "Realisme ala Soviet dan Cina". Tentu saja kecurigaan ini cukup beralasan.

Dalam bukunya, Keith Foulcher (1986) mengatakan "realisme sosialis" dalam konteks Indonesia pada dasarnya adalah sebuah sikap ketimbang gaya. Namun kenapa dituntut sebuah "persyaratan", dengan cara melarang para pelukis Lekra mementingkan "bentuk ketimbang isi", seperti tampak pada lukisan bergaya abstrak? Apakah hal ini harus diterima sebagai genderang perang dari segelintir "oknum Lekra" ataukah "suara resmi" organisasi ini? Orang pun mencari rujukannya. Terlepas apakah Lekra terkait dengan Partai Komunis Indonesia, dalam *Konfernas Seni dan Sastra* (1964), D.N. Aidit memang pernah mengecam keras: "Abstraksionisme di lapangan sastra dan seni adalah bagian dari bentuk-bentuk agresi kebudayaan imperialis yang dilakukan melalui aparatus kebudayaan Amerika." Lukisan bergaya abstrak yang dituding lukisan kaum borjuis ini kemudian jadi bulan-bulanan dan obyek cemoohan Lekra. Lalu di mana janji mukadimah Lekra yang konon "menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya"?

Sepanjang hidupnya, S. Sudjojono sendiri telanjur dicap sebagai pelukis yang "mengharamkan" gaya abstrak. Masalah ini, sejatinya, tidaklah sesederhana itu. "Yang ingin saya sasar adalah mencegah pelukis-pelukis muda menjadi medioker. Merasa diri sudah menjadi seniman besar hanya dengan mencorat-coret kanvas," Sudjojono menegaskan. Kritikus Sanento Yuliman malah menimpali, "Kecenderungan abstrak sudah tampak di kanvas-kanvas pelukis Persagi, terutama dari sang motor penggeraknya: S. Sudjojono."

\*\*\*

SEPERTI apa dan bagaimana seharusnya gaya dan estetika seni rupa sebenarnya tidak terumuskan secara rinci oleh Lekra. Dan di sini Keith Foulcher benar karena, di lapangan, rumusan-rumusannya cenderung dibangun dari ideologi pribadi tiap pelukis selama mereka berkomitmen menempatkan empatinya kepada rakyat dan membangun "Kepribadian Nasional". Tapi sempat ada desakan dari "Partai" dengan tawaran konsep yang mengandaikan terciptanya integrasi antara seniman dan rakyat dengan menerapkan poros 1-5-1, yaitu 1 asas "Politik sebagai Panglima"; 5 pedoman penciptaan, yakni meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi dengan kekinian revolusio-

ner, memadukan kreativitas individu dengan kearifan massa, serta memadukan realisme revolusioner dengan romantisme revolusioner; dan 1 cara kerja, yaitu turun ke bawah (turba). Metode yang juga harus dianut seniman adalah "metode tiga sama": sama kerja, sama makan, dan sama tinggal dengan kaum petani, terutama buruh dan petani miskin. Sampai di sini kita lihat ihwal proses penciptaan seni yang melibatkan khalayak. Seniman, sebagai individu, lebur. Mereka lebih berperan sebagai "pekerja seni".

Ketika masalah ini saya diskusikan dengan Kabeol Suadi, dia berkata, "Itulah masalah lainnya. Banyak proses penciptaan karya Lekra yang berpadu dengan rakyat. Di luar reputasi pelukis-pelukis yang sudah kita kenal secara individu, kenyataan ini tak hanya menyulitkan kita memberi penilaian atas pencapaian kesenimanan mereka orang per orang, tapi juga mengaburkan banyak hal lain, terutama dalam menilai gayanya."

\*\*\*

ESTETIKA seni rupa Lekra berayun ibarat pendulum: mengarah pada "Realisme Sosial Soviet" dan "Realisme Kerakyatan ala Cina". Yang kemudian menarik untuk diperhatikan adalah terciptanya sebuah rongga abu-abu di tengah-tengah, suatu interval di antara dua titik ayunnya. Pada interval inilah "estetika lokal", yang bertumpu pada kenyataan sosial-budaya masyarakat Indonesia, dieksplorasi seniman-seniman Lekra. Barangkali inilah sebabnya mengapa kita merasakan kehadiran "dua estetika" tersebut bercampur-baur dengan aroma lokal yang khas. "Inilah realisme kita," ucap S. Sudjojono sembari menunjuk lukisannya yang berjudul *Tetangga*. "Itulah 'Realisme S. Sudjojono'," ujar Trisno Sumardjo, yang berusaha menganalisis estetika ini. Dengan terma inilah kita kemudian bisa membedakannya dengan "Realisme Gustave Courbet", apalagi "Realisme Sosial Soviet" atau "Realisme Kerakyatan Cina".

Karisma "Realisme S. Sudjojono" memang memukau para pelukis Lekra dan bahkan, dalam beberapa hal, diakui atau tidak, prinsip estetika ini tak hanya berkontribusi terhadap pengembangan konsepsi seni rupa Lekra, tapi juga dijadikan fundamen bersama. Karena itu, nilai estetika seni rupa Lekra, mau tak mau, harus ditelusuri jejaknya melalui "Realisme S. Sudjojono", yang pernah ia serukan pada akhir 1940-an. Kendati kemudian pelukis berjudulan "Bapak Seni Lukis Modern Indonesia" ini keluar dari Lekra, "hantu" konsepsinya terus "menggentayangi" seni rupa kita sampai sekarang.

Perkara itu belum sempat saya diskusikan dengan Kabeol Suadi. Beliau keburu berpulang. ■



**Aminudin T.H. Siregar**

Dosen Seni Rupa  
Institut Teknologi  
Bandung.





## PARA PENDIRI LEKRA

### ★ D.N. Aidit

Ketua Central Komite PKI. Ia terus berusaha membawa Lekra menjadi *onderbouw* PKI.

### ★ Njoto

Wakil Ketua Central Komite PKI. Ia yang memperluas wacana "Politik adalah Panglima", tapi menolak keras menjadikan Lekra sebagai *onderbouw* PKI.

### ★ Joebaar Ajoeb

Lulusan Akademi Jurnalistik Jakarta ini pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, dan anggota Dewan Film. Ia menjabat Sekretaris Umum Lekra setelah A.S. Dharta.

### ★ Sudharnoto

Lulusan Kedokteran Universitas Indonesia ini pencipta lagu *Garuda Pancasila* dan dikenal pula sebagai ilustrator film. Ia pernah menjabat Kepala Seksi Musik RRI Jakarta, Ketua Lembaga Musik, dan pemimpin Lekra bidang musik.

### ★ Hendrik H

Joel Ngantun (Henk Ngantun) Gubernur DKI Jakarta ke-7. Ia dikenal sebagai pelukis tanpa dikawatirkan formal. Ia ikut mendirikan Gelanggang Seni Chairil Anwar Sani.

### ★ Adi Sidharta (A.S. Dharta)

Seniman yang menjadi sekretaris umum pertama Lekra. Ia pernah memimpin Serikat Buruh Kendaraan Bermotor, Serikat Buruh Batik, dan Serikat Buruh Pelabuhan, termasuk di lembaga induknya, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.

### ★ M.S. Ashar

Anggota Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), partai yang menjadi peserta Pemilihan Umum 1955.

### ★ Herman Arjuno

## LIPUTAN KHUSUS

# SENIMAN

TANGGAL 17 AGUSTUS 1950. DI JAKARTA, SEJUMLAH TOKOH MASA ITU, DARI POLITIKUS, SENIMAN HINGGA POLITIKUS-SENIMAN, MENDIRIKAN LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT. MAKSUD PENDIRIAN SEPERTI TERTULIS DALAM PARAGRAF PERTAMA MUKADIMAH LEMBAGA INI: "MENJADARI BAHWA ADALAH SATU-SATUNYA PENTJIPTA KEBUDAJAAN, DAN BAHWA PEMBANGUNAN KEBUDAJAAN INDONESIA BARU HANJA DAPAT DILAKUKAN OLEH RAKJAT, MAKA PADA HARI 17 AGUSTUS 1950 DIDIRIKAN LEMBAGA KEBUDAJAAN RAKJAT, DISINGKAT LEKRA." KITA SEMUA TAHU AKHIR CERITANYA. TAK BISA DI-POLAKSI OLEH SALAH SATU PENDIRINYA, D.N. AIDIT, LEKRA JUSTRU DI-PKI-KAN DI ZAMAN SOEHARTO. INI SEPENGGAL SEJARAH GAGASAN INDONESIA, KETIKA SENI AMAT DIGELORAKAN SEKALIGUS SANGAT DIKERANGKENG.

"LEKRA ADALAH ORGANISASI SENIMAN-SENIMAN PEJUANG ATAU PEJUANG SENIMAN. SESUAI DENGAN ISI INI, LEKRA SELALU BERLAWAN TERHADAP KETIDAKADILAN, BERLAWAN TERHADAP KEPATIDAKADILAN, BERLAWAN TERHADAP YANG LAMA ADALAH SYARAT UNTUK MEMBANGUN YANG BARU. UNTUK MEMAKAI ISTILAH MANIPOLIS, LEKRA SELALU MENJEROL DAN MEMBANGUN."



"ADA KAWAN-KAWAN KITA AHLI SEJARAH YANG BANYAK TAHU TENTANG ZAMAN DAHULU, TAPI HAMPIR TIDAK TAHU TENTANG ZAMAN SEKARANG. ADA KAWAN KITA YANG AHLI INI-ITU, YANG BANYAK TAHU TENTANG HUKUM ALAM, TETAPI HAMPIR TIDAK TAHU TENTANG HUKUM MASYARAKAT. ADA LAGI KAWAN SENIMAN YANG PANDAI MENCERITA RAJA, TETAPI TIDAK PANDAI MENCERITA KAUM IMPERIALIS DAN TUAN TANAH."

—Njoto, *Harian Rakjat*, 7 Februari 1959

## KONSEP UNGGULAN 1-5-1

1

**POLITIK ADALAH PANGLIMA. POLITIK SEBAGAI CARA DAN ORIENTASI BERPIKIR, BUKAN ORGANISASI DAN BUKAN ORANG.**

1

**TURUN KE BAWAH. MELALUI WAWANCARA, INVESTIGASI MENDALAM TERKAIT DENGAN KONDISI DAN HARAPAN MASYARAKAT.**

1-5-1

**MEMADUKAN KREATIVITAS INDIVIDU DENGAN KEARIFAN MASSA. AGAR KARYA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TRADISI BAIK, ADAT, DAN CITA-CITA RAKYAT.**

2

**MELUAS DAN MENINGGI. SEBARAN KARYA MELEBAR DAN KUALITASNYA TETAP UNGGUL.**

4

**MEMADUKAN TRADISI BAIK DENGAN KEKINIAN REVOLUSIONER. TRADISI YANG POSITIF DIPADUKAN DENGAN CITA-CITA MODERN.**

5

**MEMADUKAN REALISME REVOLUSIONER DENGAN ROMANTISISME REVOLUSIONER. REALITAS YANG MENGARAH KE PEMBARUAN YANG LEBIH BAIK DALAM SENI YANG DIUNGKAPKAN DENGAN ESTETIKA YANG ROMANTIS, INDAH, DAN PENUH**

3

**TINGGI MUTU ARTISTIK DAN IDEOLOGI. ISI DAN BENTUK SENI AGAR TERPADU HARMONIS.**

## LEKRA (1950-1965)

**17 Agustus 1950** Lekra berdiri.

**6 Oktober 1951** Di Kongres Kebudayaan di Bandung, Lekra mencetuskan Konsepsi Kebudayaan Rakyat. Isinya: perjuangan kebudayaan rakyat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat, yaitu kelas buruh dan tani.

**28 Oktober 1957** Konferensi Lekra memunculkan pandangan-pandangan baru setelah banyak kritik bahwa Mukadimah sudah tidak sesuai lagi.

**27 Januari 1959** Kongres Nasional pertama di Solo. Lekra memperkuat struktur organisasi. Pandangan baru dalam konferensi disahkan menjadi perubahan Mukadimah Lekra. Wacana "Politik sebagai Panglima" mencuat.

**28 Januari 1959** Rapat Pleno I, menyusun kepengurusan Sekretariat Pimpinan Pusat dan menyerahkan tugas yang paling mendesak: membentuk lembaga-lembaga kreatif.

**31 Agustus 1960** Rapat Pleno II, menegaskan kembali kebulatan tekad untuk melaksanakan Mukadimah.

**Juli 1961** Sidang Pleno Pimpinan Pusat, menyepakati "Politik sebagai Panglima" sebagai asas kerja kreatif bersama dengan lima tuntutan lain. Kemudian menjadi Prinsip 1-5-1.

**25 Februari 1962** Konferensi Nasional II, memunculkan resolusi yang mendukung amanat Presiden Sukarno bertajuk "Tavip" yang meneruskan pemboikotan total film-film imperialis dan perlawanan terhadap Amerika di Asia Tenggara.

**17 Agustus 1963** Lahirnya Manifesto Kebudayaan. Para seniman merasa konsepsi-konsepsi kebudayaan sudah tidak berfungsi dan muncullah liberalisme yang mengabdikan kepada politik.

**Sepanjang 1964** Pimpinan Pusat Partai Komunis Indonesia berusaha mem-PKI-kan Lekra. Namun upaya ini ditolak mentah-mentah anggota Lekra, salah satunya Njoto.

**2 September 1964** PKI menggelar Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner. Langkah ini diambil setelah gagal menggaet Lekra menjadi *onderbouw* PKI.

**1 Oktober 1965** Setelah peristiwa G-30-S, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan. Lekra, yang dianggap sebagai *onderbouw* PKI terkena imbasnya. Pelaku kebudayaan Lekra—termasuk pelukis, pematung, dan pegrafis pembuat poster yang pernah bergabung dalam sanggar-sanggar seni rupa beraroma Lekra—ditangkapi, disiksa, serta dijebloskan ke bui.

**30 November 1965** Pemerintah melarang peredaran karya-karya Lekra dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1381 Tahun 1965. Mereka dilarang menulis dan berkreasikan.



# REALISME SOSIALIS, DI SUATU

**R**EALISME Sosialis lahir di Jalan Malaia Nikitskaia Nomor 6, Moskow, 26 Oktober 1931. Di rumah megah gaya *art nouveau* itulah asas kesenian itu dirumuskan—dan dari kediaman sastrawan Maxim Gorky itu pula ia dikembangkan jadi diktat yang disambut partai dan gerakan komunis di seluruh dunia.

Di tahun itu, pada usia 63 tahun, Gorky, pengarang novel yang termasyhur itu (yang diterjemahkan Pramodya Ananta Toer dengan judul *Ibunda*), telah jadi pujangga yang dielu-elukan pimpinan negara. Pertemuan di rumahnya hari itu dihadiri Stalin dan para pejabat puncak lain yang datang dari Kremlin.

Agenda hari itu: menyusun sebuah kanun kesenian. Tentu saja ide-ide tak datang mendadak. Benih gagasan sudah berkembang dalam seni dan sastra Rusia sebelum Revolusi Oktober 1917. Juga ketika revolusi itu menang, dan Lenin memegang kendali "kediktatoran proletariat" hingga ia wafat dan kemudian Stalin menggantikannya.

Kanun yang hendak disusun itu diharapkan Gorky akan mampu "menyatukan realisme dan romantisisme", untuk menggambarkan "masa kini yang heroik", dengan suara "lebih cerah".

Sekitar 50 sastrawan duduk di ruangan besar itu (meskipun penyair Akhmatova dan Pasternak tak ada di sana; kelak mereka disingkirkan, Mandelstam dibuang). Ivan Gronsky, juru bicara sastra, mengusulkan agar kanun baru itu dinamai "Realisme Sosialis". Stalin setuju.

Di hari itulah ia mengucapkan kata-katanya yang terkenal: "Pengarang harus menjadi insinyur jiwa manusia." Dalam Kongres Pertama Persatuan Pengarang Soviet di tahun 1934, Andrei Zhdanov, pejabat urusan kebudayaan pemerintah, menegaskan kalimat itu sebagai petunjuk dasar.

Kata "insinyur" mencerminkan apa yang sedang dikobarkan. Rusia (kemudian disebut Uni Soviet) sedang meluncurkan Rencana [Pembangunan] Lima Tahun yang pertama. Dengan gemuruh, negeri agraris itu bergerak jadi negeri industri. Sosialisme sedang dilahirkan, dengan tekad, disiplin, dan pengorbanan. Gaya hidup, cara berpikir, dan cara kerja rakyat harus diubah.

Dalam konteks inilah "Realisme Sosialis" dapat dilihat sebagai bagian strategi modernisasi yang berbeda dengan jalan kapitalisme: dari sebuah masyarakat yang setengah feodal ke arah zaman baru melalui dahsyatnya "revolusi sosialis".



"REALISME" selalu punya daya tarik bagi mereka yang bergerak untuk perubahan zaman. Di Eropa abad ke-19, Realisme dalam seni dan sastra datang bersama perkembangan ilmu dan teknologi optik, terutama kamera. Teknologi ini memperkuat keyakinan bahwa "realitas" dapat ditangkap dan dihadirkan kembali ("di-representasikan") sebagaimana adanya, tanpa waham dan angan-angan. Di Prancis, Emile Zola—salah satu pionir Realisme dalam sastra (ia sebut "naturalisme")—membawa kamera ke mana-mana.

Orang yakin realitas—benda hidup dan mati yang terpapar mata—bisa dibersihkan dari ilusi dan misteri.

Tapi Realisme tak cuma datang dari situ. Dalam sejarah seni sastra, aliran ini berkaitan dengan sikap menolak apa yang dianggap sebagai dusta sosial.

Di Indonesia, di awal masa Revolusi, S. Sudjojono menegaskan pentingnya Realisme untuk menentang seni rupa zaman kolonial yang hanya memaparkan alam "Mooi Indie", Hindia Belanda yang molek. Sudjojono ingin melukiskan manusia Indonesia tak dipercantik: orang kampung yang berkerumun mendengkur, radio umum, gerilyawan yang bertubuh pendek, peserta tawar-menawar Cap Go Meh yang *grotesk*.

Di Prancis abad ke-19, Realisme menyertai oposisi terhadap kebijakan kekuatan konservatif, setelah Revolusi 1848. Realisme adalah niat melucuti tata rias kehidupan kelas borjuis yang bergeraknya ke arah aristokrasi baru. Statemen perupa Courbet menegaskan pentingnya kengangannya: "Aku... seorang partisan dalam semua revolusi seni atas segalanya seorang Realis." Proudhon, pemikir sosialis itu, mengkritik lukisan Realis Courbet, *Para Pemecah Batu*, sebagai "ironi" diarahkan ke hadapan peradaban industri... yang tak mampu melepaskan manusia dari tugas yang berat".

Dengan kata lain, dalam Realisme Eropa abad ke-19, realitas adalah indikasi protes. Hakikat Realisme, kata Courbet, adalah "nampikan terhadap apa yang ideal".

Mungkin karena apa "yang ideal" sering ditentukan kelas yang berkuasa.



TAK terasa ada indikasi protes dalam "Realisme" yang dirumuskan di rumah kediaman Gorky hari itu. Realisme Sosialis diadopsi oleh *nomenklatura* yang sedang memimpin. Mereka bukan akan menggugat keadaan dan menafikan dunia ideal yang mereka gapai.

Bahkan kemudian, sejak 1946, dari atas itu dikumandangkan "teori *bezkonfliknost*" (tanpa konflik): karya seni harus mempromosikan masyarakat Soviet yang tak berkelas, masyarakat hampir mencapai cita-cita komunisme.

Mereka memang sedang membangun masa depan dengan keyakinan dan optimisme. Dalam pendirian mereka, "realitas" yang harus ditampilkan seni dan sastra adalah kenyataan yang tengah dikonstruksikan. Seniman, kata Stalin, harus menunjukkan hidup "secara benar" dan bila ia menggambarkan "secara benar", ia pasti akan memperlihatkan bahwa hidup bergerak ke arah sosialisme.

Bisa dilihat, di sini "benar" punya arti tersendiri. Bagi Soviet yang "benar" adalah yang mengikuti tujuan yang ideal—yaitu di masa depan. Osip Beskin, editor majalah seni rupa resmi *Kusstvo*, menegaskan pandangan ini: seniman revolusioner bukanlah seorang "obyektivis", yang menangkap dan melukiskan apa yang ada. Ia adalah "pembangun komunisme, dengan



# SA, DI SUATU TEMPAT



**Roses for Stalin** karya Boris Eremeevich Vladimirski.

yeksi yang luas ke masa depan”.

Di masa depan itu, dalam citra “yang ideal”, tak akan ada yang busuk dan yang bobrok. Maka gerak menuju yang ideal adalah gerak yang sungguh dan berani. Agaknya itu yang dikehendaki Gorky: karya sastra dan seni harus menggambarkan “masa kini yang heroik”, dengan suara “lebih cerah”. Di tahun 1933 Gorky bahkan menganjurkan para perupa menghasilkan karya-karya yang “gembira” (lihat gambar).

Dan mengikuti “teori *bezkonfliknost*”, kanvas muram dari tahun 1920-an, misalnya lukisan Bogorodski tentang anak jalanan, dicipot dari museum.

Maka yang terjadi bukan *mimesis* atas realitas, bukan cerminan atau kehadiran kembali kenyataan yang ada. Yang terjadi sebuah pemanggungan apa yang ideal. Karya seni rupa Uni Soviet sesudah pertengahan 1930-an meneguhkan gaya akademis dengan kanvas besar, gambar yang mendetail, selesai, terang, seperti fotografis yang mendokumentasikan peristiwa dan tokoh heroik.

Memakai kata-kata Mao Zedong tentang “romantisisme revolusioner”, karya Realisme Sosialis itu menekankan apa yang “lebih mendekati yang ideal, dan sebab itu lebih universal ketimbang hidup sehari-hari”.



MENEKANKAN yang ideal, Realisme Sosialis dirumuskan sebagai asas yang normatif. Tiap karya harus punya “isi” yang secara politis benar: *ideinost*. Pesannya harus mudah dipahami. Perupa Lvov menegaskan: “Dalam seni rupa tak boleh ada keremang-remangan; tiap hal harus terang dan dapat dimengerti siapa saja. Musuh bisa bersembunyi hanya selama ada ketidakjelasan.”

Novel, misalnya, harus menampilkan “hero yang positif”. Sang

tokoh mesti seorang manusia yang teguh, tenang, serius, waspada, setia, sadar akan perjuangan—seperti Pavel Valov dalam *Ibda* atau Zukrai dalam novel Ostrovsky yang versi Inggrisnya berjudul *How the Steel Was Tempered*.

Sang “hero positif” ini tentu lebih berfungsi sebagai tauladan untuk menyampaikan ajaran. Ia ada berdasarkan ide, bukan dari kehidupan konkret. Ia mengikuti satu tipe ideal tertentu. Ia “tipikal”—dan itu penting. Malenkov berpesan di depan Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-9: “Para seniman, sastrawan, dan pementas kita mesti selalu menyadari, bahwa... yang ‘tipikal’ adalah wilayah vital mana semangat Partai dimanifestasikan dalam seni...”

Malenkov menegaskan perlunya memanifestasikan “semangat Partai”: *partiinost* adalah wajib. Yang tak pernah bisa dijelaskan adalah bagaimana cara mengetahui ada atau tidaknya “semangat Partai” dan siapa yang menentukan.

Dalam praktek, yang menentukan pejabat Partai. Tapi penentu an bisa berubah karena arah politik berubah. Dalam *Socialist Realism Paintings* (1998), Matthew Cullerne Bown mencatat satu peristiwa karya besar Aleksander Gerasimov, *Para Komandan Kavaleri Pertama* (1936), yang resmi dipajang di Pameran Internasional di Paris, diopot. Di tahun berikutnya Stalin menembak mati sebagian besar tokoh yang diabadikan dalam lukisan itu. Ketakutan, Gerasimov menyipkan karyanya di lantai studionya sampai Stalin wafat.



SEJARAH Realisme Sosialis memang tak selurus yang dibayangkan para penyusun kanun itu di tahun 1932.

Penekanan agar mendekati “yang ideal” memang telah mendorong kemajuan teknik seni rupa yang mengagumkan, karena meneladankan karya-karya “akademis”. Namun tak ada lagi ledakan kreativitas seperti di masa menjelang dan segera setelah kemenangan kaum Bolsyewik ketika pelbagai ekspresi berkembang dan bersaing. Di bawah pengawasan Zhdanov, seni dan sastra diharamkan bereksperimen dengan sesuatu yang beda. Itu akan disebut “formalisme” dan akan ditindak sebagai “kontrarevolusi”.

Tampak, begitu penting ide, seni, dan sastra diperlakukan waktu itu. Para pemimpin Bolsyewik awal memang kaum inteligensia: Lenin penulis risalah filsafat dan Trotsky penulis esai yang menghargai puisi. Sejarah Realisme Sosialis tak bisa dipisahkan dari semboyan *kulturnost* atau “pembudayaan”. Tapi kemudian Partai jatuh ke tangan Stalin, dan para birokrat, dan polisi rahasia. Mereka tetap menganggap seni bukan perkara main-main—tapi dengan mata yang waswas.

“Hanya di Rusia puisi dihormati; ia bisa menyebabkan orang bunuh,” kata penyair Osip Mandelstam. Benar saja: ia menulis buah sajak yang dianggap menghina Stalin. Di tahun 1938, ia ditangkap, dibuang ke Siberia, dan mati.

**Goenawan Moham**

Bukunya tentang estetika dan politik, *Mimesis dan Prabangkara*, akan terbit tahun depan.